



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

TAHUN
2024



KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas berdasarkan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan dan pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing sehingga dapat mendukung perekonomian wilayah termasuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat baik layanan transportasi perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan peran sebagai regulator transportasi perkeretaapian. Capaian Indikator Kinerja Program mengacu pada target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang secara berkala dilakukan pemantauan dan selanjutnya dilaporkan melalui Laporan Kinerja setiap tahun sebagai bagian penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

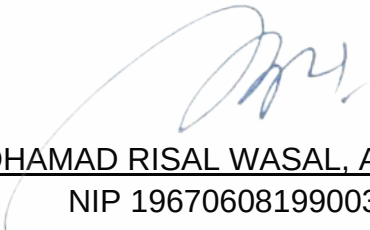
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan laporan pelaksanaan terhadap rencana kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis pada Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 digunakan sebagai acuan dan referensi dalam rangka evaluasi kinerja tahunan serta upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode berikutnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja yang juga memuat monitoring kinerja periode Triwulan IV Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian mempunyai tugas untuk pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian nasional guna memastikan terwujudnya tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Tahun 2020-2024 adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

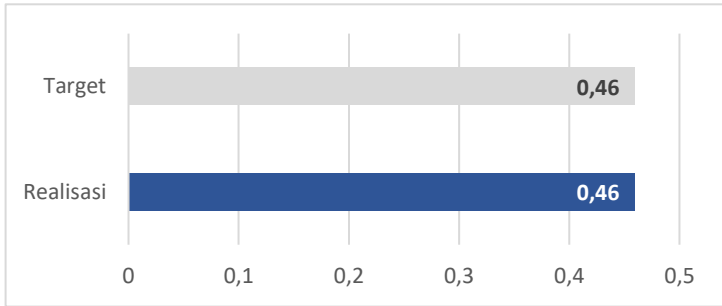
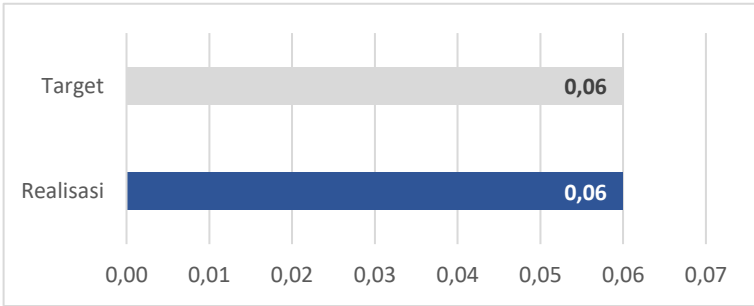
1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

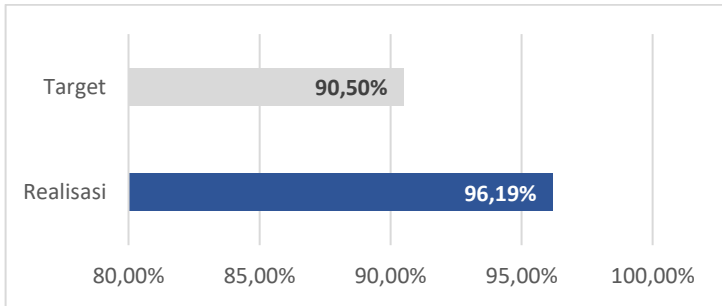
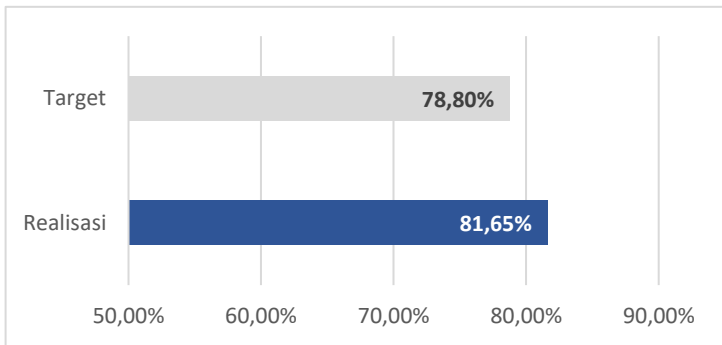
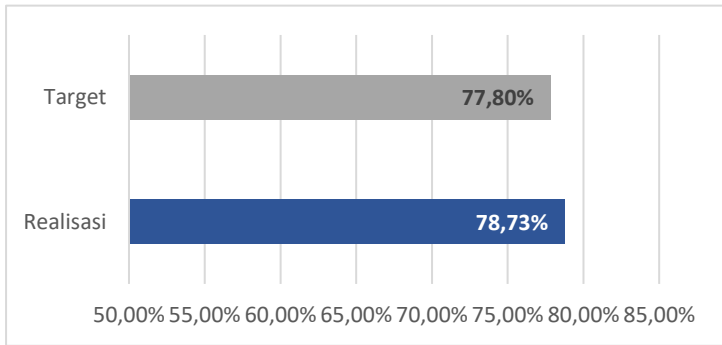
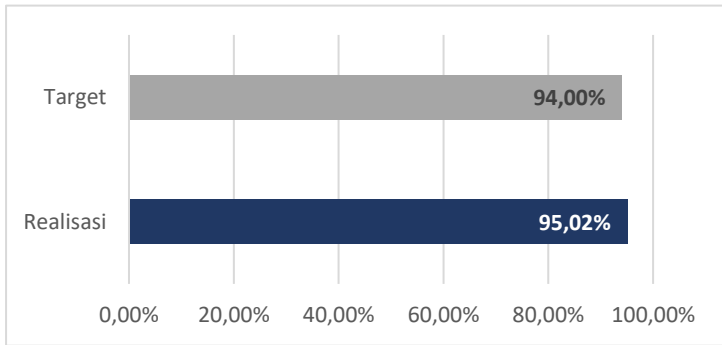
Untuk memastikan perwujudan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas, maka telah ditetapkan 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) telah ditetapkan target kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja program sebagai berikut:

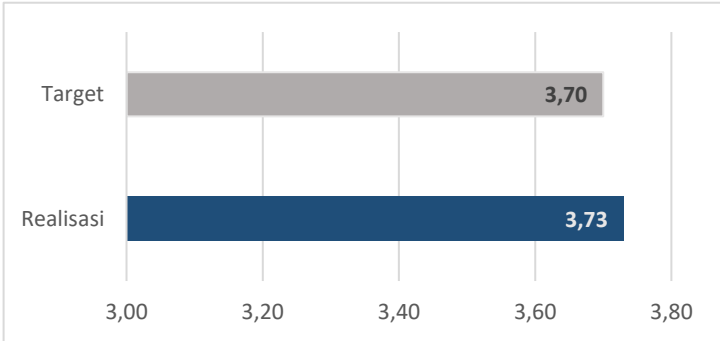
Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,46
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	0,06

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	90,5%
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	78,80%
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	77,80%
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	94,00%
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3,70

Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,75% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja
Sasaran 1 : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur		
IKP 1: Rasio Konektivitas Antar Wilayah	 A horizontal bar chart with a scale from 0 to 0,5. The 'Target' bar (grey) and 'Realisasi' bar (blue) both extend to the 0,46 mark on the scale.	100,00
Sasaran 2 : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal		
IKP 2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)	 A horizontal bar chart with a scale from 0,00 to 0,07. The 'Target' bar (grey) and 'Realisasi' bar (blue) both extend to the 0,06 mark on the scale.	100,00

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja				
Sasaran 3 : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan						
IKP3: Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	 <table><tr><td>Target</td><td>90,50%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>96,19%</td></tr></table>	Target	90,50%	Realisasi	96,19%	106,29%
Target	90,50%					
Realisasi	96,19%					
IKP4: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	 <table><tr><td>Target</td><td>78,80%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>81,65%</td></tr></table>	Target	78,80%	Realisasi	81,65%	103,62
Target	78,80%					
Realisasi	81,65%					
IKP5: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	 <table><tr><td>Target</td><td>77,80%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>78,73%</td></tr></table>	Target	77,80%	Realisasi	78,73%	101,20
Target	77,80%					
Realisasi	78,73%					
IKP6: Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	 <table><tr><td>Target</td><td>94,00%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>95,02%</td></tr></table>	Target	94,00%	Realisasi	95,02%	101,09
Target	94,00%					
Realisasi	95,02%					

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target dan Realisasi Tahun 2024	% Capaian Kinerja						
IKP7: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	 <table><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr></thead><tbody><tr><td>Target</td><td>3,70</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>3,73</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Target	3,70	Realisasi	3,73	100,81
Kategori	Nilai							
Target	3,70							
Realisasi	3,73							

Selain itu, disampaikan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 diperoleh sebesar Rp5.828.724.850.876,- atau **54,35% dari alokasi sebesar Rp10.723.868.768.000,-**. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran periode sebelumnya (84,18%) serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Tahun 2024 (92,61%). Terkait PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan pula realisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.167.640.051.880 atau 92,57% dari target Tahun 2024 sebesar Rp1.261.333.553.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1-2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	1-3
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	1-6
1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	1-6
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN.....	1-10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	2-1
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	2-1
2.2 PERJANJIAN KINERJA	2-4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	3-1
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	3-4
3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	3-62
3.4 DUKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BIDANG PERKERETAAPIAN	3-1
3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA	3-4
3.6 REALISASI ANGGARAN	3-6
BAB 4 PENUTUP	4-3
4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA.....	4-3
4.2 KESIMPULAN	4-10
4.3 REKOMENDASI.....	4-11
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024	2-2
Tabel 2-2	Indikator dan Target Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2-3
Tabel 2-3	Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	2-1
Tabel 2-4	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	2-1
Tabel 2-5	Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	2-1
Tabel 2-6	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2-1
Tabel 2-7	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2-1
Tabel 3-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian ..	3-2
Tabel 3-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2024	3-4
Tabel 3-3	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024	3-7
Tabel 3-4	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2020-2024	3-8
Tabel 3-5	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024	3-9
Tabel 3-6	Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah	3-13
Tabel 3-7	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2024.....	3-15
Tabel 3-8	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2024	3-16
Tabel 3-9	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-17
Tabel 3-10	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024	3-18
Tabel 3-11	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 ..	3-19
Tabel 3-12	Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian	3-20
Tabel 3-13	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2024	3-25

Tabel 3-14	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-26
Tabel 3-15	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024.....	3-27
Tabel 3-16	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	3-28
Tabel 3-17	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-34
Tabel 3-18	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2020-2024.....	3-35
Tabel 3-19	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api.....	3-36
Tabel 3-20	Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api	3-37
Tabel 3-21	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024.....	3-42
Tabel 3-22	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2020-2024	3-42
Tabel 3-23	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api.....	3-43
Tabel 3-24	Jumlah Angkutan Barang Kereta Api	3-44
Tabel 3-25	Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI	3-48
Tabel 3-26	Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024	3-48
Tabel 3-27	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024.....	3-49
Tabel 3-28	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-50
Tabel 3-29	Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024	3-51
Tabel 3-30	Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara ASEAN	3-52
Tabel 3-31	Kategori Kinerja Nilai IKM	3-56
Tabel 3-32	Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2024	3-57
Tabel 3-33	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	3-58
Tabel 3-34	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3-59

Tabel 3-35	Perbandingan Nilai IKM	3-60
Tabel 3-36	Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	3-64
Tabel 3-37	PSN Status On Progres Tahun 2024	3-3
Tabel 3-38	Penghargaan/Capaian Kinerja Lainnya	3-4
Tabel 3-39	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024	3-1
Tabel 3-40	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2024	3-1
Tabel 3-41	Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024 ..	3-2
Tabel 3-42	Realisasi PNBK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.....	3-1
Tabel 4-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya.....	4-3
Tabel 4-2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	4-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	1-5
Gambar 1-2	Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja	1-6
Gambar 3-1	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024.....	3-8
Gambar 3-2	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2020-2024.....	3-9
Gambar 3-3	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-10
Gambar 3-4	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024.....	3-17
Gambar 3-5	Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident) Tahun 2020-2024.....	3-18
Gambar 3-6	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	3-19
Gambar 3-7	Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara	3-20
Gambar 3-8	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-26
Gambar 3-9	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024	3-27
Gambar 3-10	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api.....	3-28
Gambar 3-11	Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara	3-29
Gambar 3-12	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-34
Gambar 3-13	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2020-2024	3-35
Gambar 3-14	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api..	3-36

Gambar 3-15	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	3-42
Gambar 3-16	Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2020-2024	3-43
Gambar 3-17	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	3-44
Gambar 3-18	Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024	3-49
Gambar 3-19	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024.....	3-50
Gambar 3-20	Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	3-51
Gambar 3-21	Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024	3-52
Gambar 3-22	Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara Non ASEAN.....	3-53
Gambar 3-23	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	3-58
Gambar 3-24	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian ...	3-59
Gambar 3-25	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang.....	3-2
Gambar 3-26	Peningkatan Stasiun Haurpugur.....	3-2

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan 2024
- Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran III. Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024
- Lampiran IV. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
- Lampiran V. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
- Lampiran VI. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
- Lampiran VII. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2024
serta Uraian Capaian Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan pelayanan baik dalam bentuk pembangunan prasarana, sarana dan SDM maupun regulasi bidang perkeretaapian. Program pembangunan perkeretaapian selaras dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian yang mempunyai peran dan andil untuk meningkatkan serta mendorong perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) serta Rencana Strategis bidang perkeretaapian.

Dalam rangka mewujudkan transportasi perkeretaapian yang handal, diperlukan investasi yang relatif besar untuk meningkatkan daya saing serta daya dukung prasarana dan sarana perkeretaapian. Mengingat transportasi perkeretaapian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan transportasi tersebut baik melalui mekanisme pembiayaan APBN, APBD, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan BUMN/BUMD, maupun Swasta sepenuhnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk memberikan layanan kepada masyarakat umum (publik) yang didalamnya terdapat aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun manajerial sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian

Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebagai laporan pertanggungjawaban dan informasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 (revisi terakhir). Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mencapai target kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
2. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

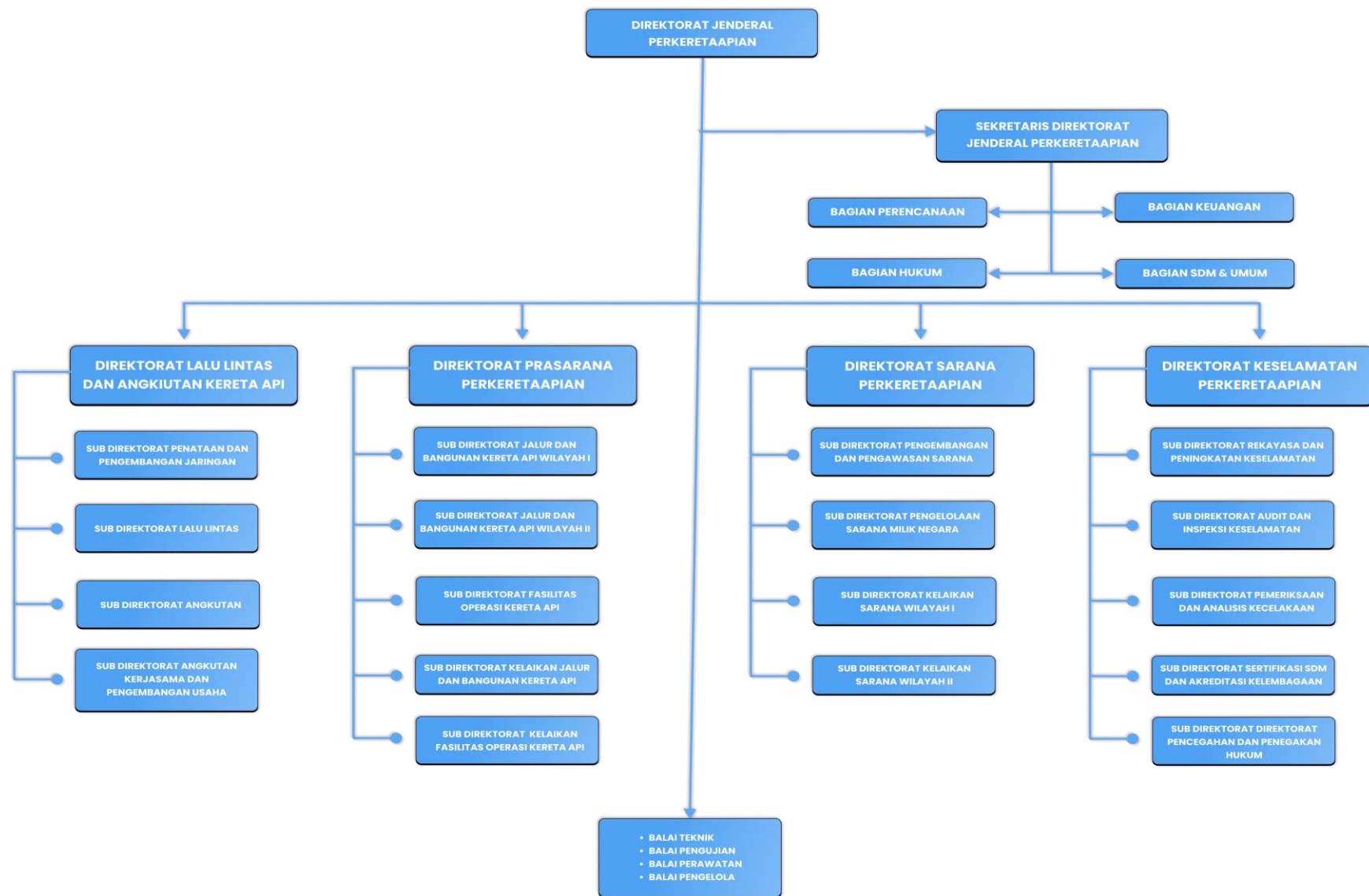
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis/Balai setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);
 - i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
 - k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

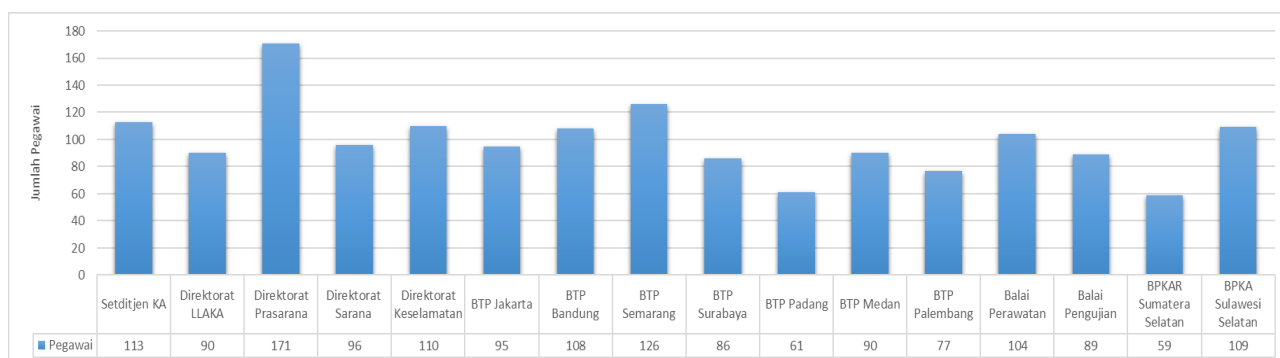
Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 berjumlah sebanyak 1.578 pegawai yang terdiri dari 1.415 PNS dan 163 PPPK yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Perkembangan potensi, isu strategis dan permasalahan terkait penyelenggaraan transportasi perkeretaapian diidentifikasi sebagai berikut:

A. REGULASI

1. Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dengan urgensi perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian.
2. Perlunya penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi NSPK sesuai perkembangan/kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian. Aspek regulasi menjadi isu penting pada periode Tahun 2024 seiring dengan penerapan teknologi baru baik prasarana maupun sarana seperti kereta cepat, LRT (GoA3), dan teknologi lainnya. Selain itu, beberapa

penyempurnaan regulasi dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola perizinan, kemudahan investasi serta penyelenggaraan PSO, IMO dan TAC.

3. Perlunya peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam penerapan regulasi bidang perkeretaapian termasuk melibatkan Pemerintah Daerah.

B. KELEMBAGAAN

1. Kelembagaan dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian perlu perubahan diantaranya dengan pembentukan badan usaha penyelenggara prasarana milik negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai upaya meningkatkan kinerja multioperator pada prasarana perkeretaapian milik negara.
2. Penguatan kelembagaan dan organisasi Ditjen Perkeretaapian perlu didukung dengan penyiapan bisnis proses, penyesuaian struktur organisasi, tata kerja, peta jabatan, dan pendukung lainnya termasuk meningkatkan kapasitas manajemen aset.
3. Sinkronisasi tugas dan wewenang kelembagaan serta perencanaan pembangunan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antar *stakeholders* termasuk dukungan industri perkeretaapian dalam pembangunan prasarana dan sarana serta pengembangan layanan kereta api.

C. PENDANAAN

1. Indikasi kebutuhan investasi untuk pengembangan perkeretaapian nasional sampai dengan Tahun 2030 berdasarkan RIPNAS mencapai USD87.132 juta atau setara dengan Rp1.306,9 triliun. Mengacu pada kebutuhan tersebut, pemenuhan investasi masih memiliki gap yang sangat besar dan bergantung pada APBN.
2. Skema KPBU bidang perkeretaapian saat ini masih terbatas dan belum optimal, dimana mengacu pada RIPNAS seharusnya sumber pembiayaan alternatif (KPBU, swasta, non APBN lainnya) lebih dominan dalam pembangunan perkeretaapian.
3. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset perkeretaapian untuk peningkatan pendapatan negara sebagai alternatif pembiayaan, termasuk pengoptimalan sumber pembiayaan BLU.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kebutuhan SDM sebagai regulator maupun operator penyelenggaraan perkeretaapian masih belum terpenuhi baik kuantitas dan kualitas. Berdasarkan RIPNAS, kebutuhan SDM regulator perkeretaapian sebanyak 2.330 orang dan SDM operator perkeretaapian sebanyak 101.440 orang dengan berbagai kompetensi pada Tahun 2030.
2. SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi teknis bidang perkeretaapian jumlahnya masih terbatas, untuk itu perlu pengoptimalan untuk pengembangan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian.
3. Terdapat kebutuhan pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi SDM bidang perkeretaapian termasuk pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Kebutuhan pengembangan jaringan kereta api dan peningkatan kapasitas prasarana dengan target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada Tahun 2024 sepanjang 7.451 km berdasarkan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan pada Tahun 2030 sepanjang 10.524 km mengacu pada target RIPNAS. Selain itu, pengembangan jaringan dan layanan kereta api di kawasan perkotaan juga semakin mendesak untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan.
2. Dengan rencana pengembangan jaringan kereta api yang tinggi, maka kebutuhan untuk jumlah sarana kereta api juga meningkat. Mengacu pada RIPNAS, terdapat kebutuhan sarana kereta api dari Badan Usaha Penyelenggara Sarana pada Tahun 2030 sejumlah 5.314 lokomotif, 27.949 kereta, 48.364 gerbong, dan 6.229 kereta perkotaan.
3. Kebutuhan untuk penanganan perlintasan sebidang, diantaranya melalui pembangunan perlintasan tidak sebidang (*flyover*, *underpass*), peningkatan fasilitas keselamatan/pintu perlintasan/*early warning system* dan penutupan perlintasan sebidang liar. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan layanan (*on time performance*) dan keamanan perjalanan

kereta api serta kelancaran lalu lintas pada lokasi perlintasan jalur kereta api dengan jalan.

4. Perlunya optimalisasi keterhubungan wilayah (PKN, PKW/Kawasan Strategis Nasional) oleh jaringan kereta api, dimana pemenuhan target RIPNAS masih minim. RIPNAS menargetkan keterhubungan jaringan kereta api sampai Tahun 2030 sebanyak 149 lokasi wilayah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi, sedangkan saat ini yang sudah terhubung sebanyak 68 PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi;
5. Perlunya percepatan penyelesaian kendala pengadaan lahan dimana dapat menghambat kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian yang dominan akibat dampak sosial dan lingkungan.

F. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

1. Pangsa angkutan kereta api penumpang yang masih terbatas dimana *modal share* angkutan penumpang kereta api masih sekitar 4-5%. Kondisi ini masih cukup jauh dari RIPNAS dengan target *modal share* penumpang 7-9%.
2. Keterpaduan/integrasi antar moda transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan *level of service* layanan transportasi perkeretaapian terutama pada simpul stasiun kereta api. Integrasi antar moda diantaranya mencakup keterpaduan jadwal pelayanan, tarif dan tiket serta fasilitas perpindahan antar moda di lokasi stasiun kereta api. Selain itu juga terdapat kebutuhan pengembangan dan penataan stasiun kereta api sebagai pusat pergerakan.
3. Manajemen Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) perlu diterapkan sesuai prinsip multioperator.
4. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kereta api barang dan penumpang termasuk penyelenggaraan skema perintis dan PSO yang tepat sasaran.
5. Kebutuhan perkembangan kereta api angkutan barang dengan metoda *Rolling Highway* (Rola) yang menggabungkan kereta api dengan jalan raya melalui pengangkutan kendaraan truk dan angkutan barang lainnya di atas kereta api.

G. TEKNOLOGI DAN INFORMASI

1. Kebutuhan pembaruan teknologi perkeretaapian saat ini untuk meningkatkan efisiensi, kehandalan, pemenuhan *demand* dan kenyamanan angkutan kereta api, serta mendukung keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api termasuk mengikuti perkembangan teknologi perkeretaapian global yang ramah lingkungan, diantaranya Kereta Cepat, *Light Rail Transit* (LRT), *Mass Rapid Transit* (MRT), Monorel, *Trem Battery*, *Automated Guideway Transit* (AGT), Kereta Gantung (*Cable Car*), *Autonomous Rail Rapid Transit* (ART).
2. Perkembangan teknologi tingkatan otomasi sarana perkeretaapian sejalan dengan perkembangan teknologi khususnya GOA (*Grade of Automation*) yang merupakan tingkat otomatisasi operasional kereta api sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diberikan pada sistem kontrol kereta api.
3. Perkembangan teknologi konstruksi prasarana perkeretaapian antara lain perkembangan jalur dan bangunan (*U-Shape*, *Slab On Pile*, *Slab Track*, *Anti Vibration Track* (AVT), *Long-Span*), komponen dan material (*Fastening System*, *LRB (Lead Rubber Bearing)*, *Platform Screen Doors* (PSD), *Flashbutt*), persinyalan dan telekomunikasi (*Fix Block* dan *Moving Block*, *Fiber Optik*, *Terrestrial Trunking Radio*, *Global System for Mobile Communications – Railway* (GSM-R), serta elektrifikasi (*Third Rail System*).
4. Pengembangan teknologi kereta api ke depan harus didukung manajemen aset yang *smart*, pemanfaatan AI/IoT, serta infrastruktur berkelanjutan. Hal ini harus didukung juga dengan SDM yang handal dan kompeten.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan membandingkan target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), membandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya serta membandingkan pencapaian berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan dan kinerja tahunan unit kerja. Analisis atas capaian

kinerja juga memungkinkan diidentifikasinya celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan APIP Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan diuraikan sebagai berikut:

- A. **BAB 1 PENDAHULUAN**, memuat gambaran singkat mengenai unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, kondisi sumber daya manusia, serta uraian aspek strategis, potensi serta permasalahan yang dihadapi unit kerja.
- B. **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**, menjelaskan uraian singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah. Selain itu juga diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 meliputi Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) serta penjelasan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
- C. **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**, memuat uraian metode dan hasil pengukuran capaian kinerja unit kerja. Setiap pernyataan indikator kinerja terhadap sasaran program unit kerja dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024, perbandingan target dan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Rencana Strategis), perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan alternatif solusi untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga diuraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan juga disampaikan realisasi keuangan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024.
- D. **BAB 4 PENUTUP**, berisikan tindak lanjut rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya, uraian kesimpulan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

- E. LAMPIRAN**, terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) revisi terakhir, komitmen pimpinan untuk peningkatan kinerja, monitoring rencana aksi, data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja program serta dokumentasi laporan dan pembahasan kinerja di internal unit kerja.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan adalah: ***“Mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”***

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. ***Handal*** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman dan tepat waktu dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai didukung sarana dan prasarana mencukupi serta terpelihara.
2. ***Berdaya Saing*** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.
3. ***Berintegrasi*** diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.
4. ***Berteknologi*** diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
5. ***Terjangkau*** diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas merupakan rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan konektivitas, keselamatan dan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian, namun juga upaya pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai regulator. Selanjutnya tujuan dan sasaran ditetapkan untuk mempresentasikan indikasi kinerja mengenai pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta pemenuhan kondisi dan persyaratannya. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tujuan dan sasaran disampaikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Program
Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal.
Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Sasaran program tersebut kemudian diuraikan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan ditetapkan nilai target sebagai tolok ukur kinerja periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2-2 Indikator dan Target Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2024	2024
SP 1. Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
SP2. Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2. Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
SP3. Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3. Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	74	76	78	80	82
	IK4. Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	10	21	47	73	100
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11	27	46	68	100
	IK6. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	83	85	87	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan penetapan terhadap target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya yang tersedia serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu *cascading* sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan 3 sasaran program dan 7 indikator kinerja program serta dukungan Program Infrastruktur Konektivitas.

Mengacu pada hal di atas, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagaimana analisa indikator terhadap kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) sebagai berikut:

Tabel 2-3 Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030. $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate Of Accident)	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>Traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh. $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$ Referensi: • Association of American railroads (https://www.aar.org/charts); • European Union Agency For Railways; • Indian Railway Catering and Tourism Corporation (https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Business</i> Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2020-	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Jumlah angkutan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan	Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.			

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
	peningkatan angkutan barang kereta api dapat mengurangi kerusakan jalan raya termasuk pengurangan emisi.	Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api = Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra X 100%		2024 dan RIPNAS 2030																										
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas jalan rel kereta api yang berdampak terhadap tingkat pelayanan dan kenyamanan transportasi kereta api	Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II = Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan X 100% Referensi : Hasil Pengukuran PT. KAI	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										

2.2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan satu kali revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan kebijakan strategi dan kebijakan optimalisasi/pergeseran/luncuran sumber daya anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, serta perubahan pimpinan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program dengan Program Infrastruktur Konektivitas.

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 2-4 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of Accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80	61,77	68,12	74,82	78,80
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80	64,05	68,77	73,74	77,80

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	%	94,00	93,93	93,93	94,00	94,00
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Tabel 2-5 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian				Target Renstra 2024	Target PK 2024	Target PK 2024 Revisi	Keterangan
			2020	2021	2022	2023				
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,33	0,42	0,44	0,45	0,36	0,46	0,46	• Target tetap. • Baseline: Jumlah PKN/PKW sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi). • Pada Tahun 2024, direncanakan penambahan konektivitas PKW Lhoukseumawe.
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,19	0,23	0,18	0,10	0,22	0,09	0,06	• Target berubah / ditingkatkan (memperhatikan capaian periode Triwulan III 2024 guna memenuhi kriteria <i>on the right track</i>). • Indikasi jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 5 kejadian dengan estimasi Km tempuh sebesar 88.193.652 Km.
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	78,6	91,69	90,57	90,28	82,00	90,50	90,50	• Target tetap. • Rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang).
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10,14	17,86	32,33	55,74	100,00	78,80	78,80	• Target tetap. • Target angkutan penumpang kereta api Tahun 2024 mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dengan target kenaikan 3% dan layanan KA yang baru beroperasi.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian				Target Renstra 2024	Target PK 2024	Target PK 2024 Revisi	Keterangan
			2020	2021	2022	2023				
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	12,45	25,80	40,58	59,71	100,00	77,80	77,80	• Target tetap. • Target angkutan barang kereta api Tahun 2024 mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dengan target kenaikan 3%.
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,83	90,70	91,37	92,87	94,00	94,00	94,00	• Target tetap. • Mengacu pada target RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024.
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,69	-	3,70	3,70	• Target tetap • Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, dan unit kerja BLU (BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian).

2.2.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) sebesar Rp10.723.868.768.000,00 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 2-6 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Awal	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Revisi
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	9.114.700.000.000	10.122.945.239.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.150.000.000.000	2.499.880.834.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.180.000.000.000	4.860.150.516.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.730.000.000.000	2.708.923.828.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	54.700.000.000	53.990.061.000
2.	Program Dukungan Manajemen	573.020.000.000	600.923.529.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	9.720.000.000	9.721.391.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	521.000.000.000	557.104.471.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	21.800.000.000	16.426.314.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	17.900.000.000	15.075.934.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.600.000.000	2.595.419.000
Jumlah		9.687.720.000.000	10.723.868.768.000

Tabel 2-7 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2024	Target PK 2024 Revisi	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Awal	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Revisi
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,460	2.150.000.000.000	2.499.880.834.000
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,09	0,06	2.784.700.000.000	2.762.913.889.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2024	Target PK 2024 Revisi	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Awal	Alokasi Anggaran (Rp) pada PK Revisi
SP3 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	90,50	4.180.000.000.000	4.860.150.516.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80	78,80		
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80	77,80		
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	94,00	94,00		
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70		
Jumlah					9.114.700.000.000	10.122.945.239.000

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, *benchmark* kinerja serta alternatif solusi/upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja periode berikutnya.
2. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis unit kerja.
4. Menyusun analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM).

5. Menguraikan capaian keberhasilan lainnya.
6. Menguraikan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
1.	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030. $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2.	IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh. $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$
3.	IKP3 Persentase <i>On time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
4.	IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
5.	IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
6.	IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan target penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Tahun 2024.

3.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Baseline rasio konektivitas Tahun 2023 sebesar 0,45 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,46 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 68 lokasi. Terdapat 1 rencana penambahan konektivitas jaringan kereta api pada Tahun 2024 yaitu akses menuju PKW Lhokseumawe Provinsi Aceh

Rincian target dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2024

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu	√	√
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
TOTAL		68	68

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh realisasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 68 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52

lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Untuk itu, diperoleh rasio konektivitas antar wilayah pada Tahun 2024 sebesar 0,46 dengan rincian perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah} = \frac{68 \text{ Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{149 \text{ PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}$$

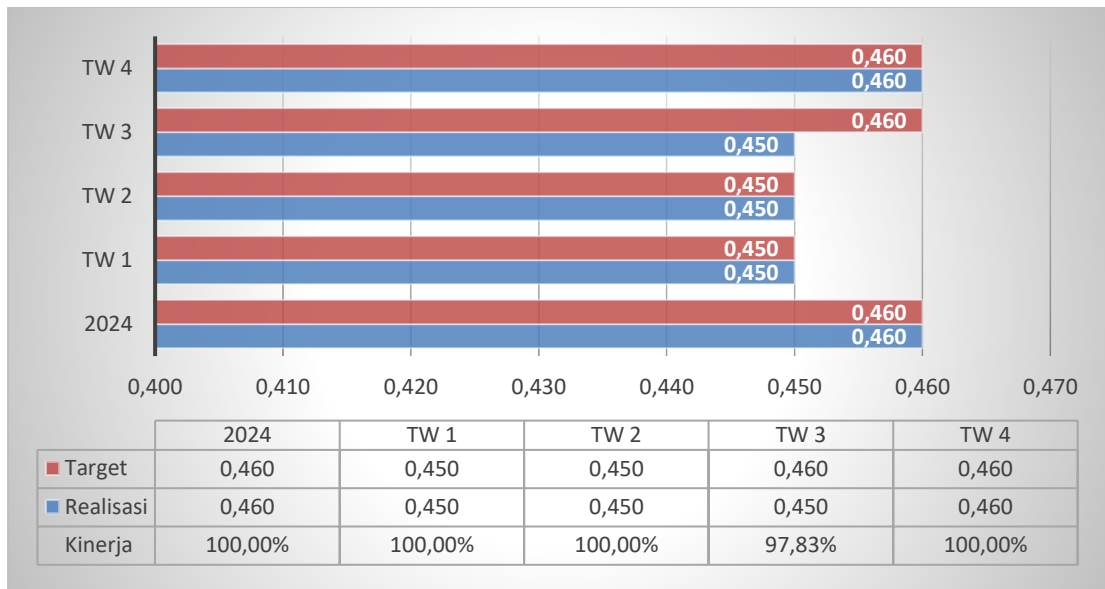
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Tahun 2024 sebesar 0,46, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 0,46. Pada masing-masing periode triwulan, mayoritas capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja 100%), kecuali Triwulan III dimana penambahan realisasi konektivitas PKW Lhokseumawe tertunda karena masih berproses pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian.

Realisasi capaian kinerja kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,46	100,00	100,00	97,83	100,00	100,00



Gambar 3-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024

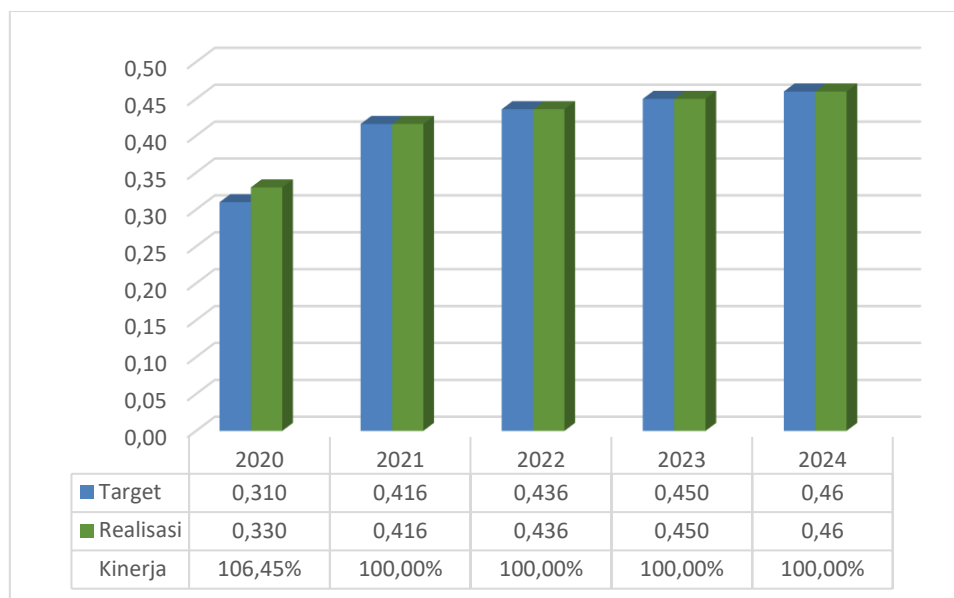
2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan realisasi kinerja pada Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (2020 s.d 2023), diperoleh bahwa capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahun mengalami peningkatan dari rasio 0,416 pada Tahun 2020 menjadi rasio 0,460 pada Tahun 2024 atau mengalami kenaikan dengan penambahan sebanyak 21 lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jaringan dan layanan kereta api mengacu pada target RIPNAS Tahun 2030. Pada periode tersebut juga diperoleh bahwa seluruh target kinerja tahunan dapat tercapai (kinerja >100%).

Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-4 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,310	0,416	0,436	0,450	0,460	0,330 (106%)	0,416 (100%)	0,436 (100%)	0,450 (100%)	0,460 (100%)



Gambar 3-2 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2020-2024

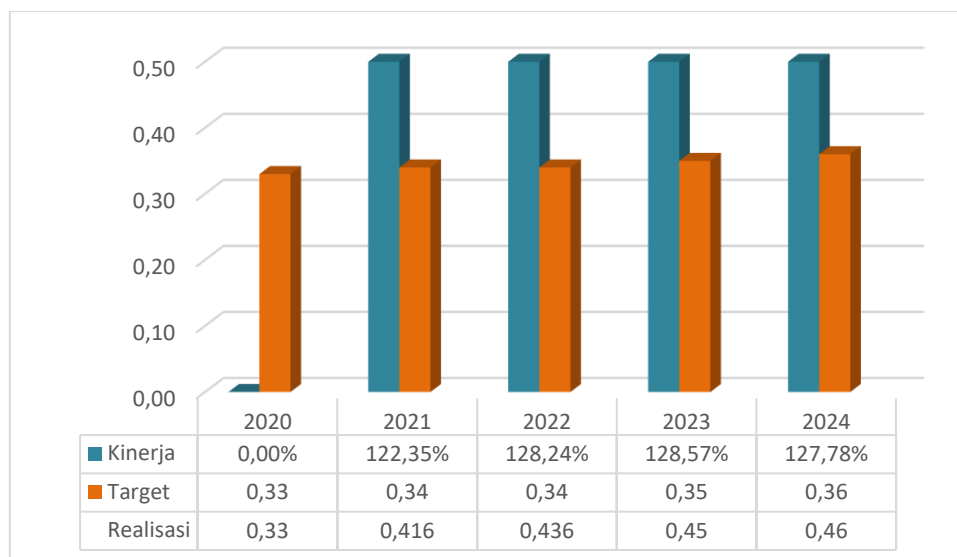
3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2024 sebesar 0,46, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 0,36 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 128%. Mengacu target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Rasio Konektivitas Antar Wilayah setiap tahun dapat terpenuhi (kinerja >100%) dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Demikian juga pada target Rencana Strategis untuk Tahun 2024 telah dapat memenuhi target, namun kedepan diperlukan upaya peningkatan kinerja khususnya dalam proyeksi penetapan target kinerja untuk mencegah capaian kinerja anomali (kinerja >120%).

Tabel 3-5 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,330 (100%)	0,416 (122%)	0,436 (128%)	0,450 (129%)	0,460 (128%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-3 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah mencakup penambahan konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu sepanjang 8 Km'sp yang telah selesai 100% dan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan rangkaian proses pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian.

Pada Tahun 2024 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain:

- a. Kegiatan koordinasi untuk mendukung konektivitas PKW Sawahlunto melalui penyelesaian reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Posisi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen Gambar teknis (*as built drawing*) dan *Shop Drawing*. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu *Detail Engineering Design* dan Spesifikasi Teknis.

Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban. Selain itu, BTP Padang juga telah melakukan *self assesment* pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis.

- b. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan progres mencapai 98,50% dimana masih terdapat bidang lahan yang masih berproses pengadaan/pembayaran untuk *frontage road* (progress pengadaan tanah sebesar 90% atau 479 yang telah terbayarkan dari total keseluruhan bidang sebanyak 532 bidang). Dengan kendala tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kelanjutan pekerjaan utilitas tersebut pada Tahun 2025.
- c. Kegiatan pendukung konektivitas jalur KA Makassar – Parepare diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung di beberapa stasiun (Stasiun Mandai, Stasiun Labakkang, Stasiun Ma’rang, Stasiun Tanete Rilau) belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 (masih dalam proses tender) dan rencana diluncurkan anggaran dan kegiatannya pada Tahun 2025.
- d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang, dimana saat ini masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (tindak lanjut pengujian, *safety assesment*). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 - Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30%).
- e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya pelaksanaan *Proof Of Concept (PoC)* pada Agustus s.d Oktober 2024 dan dilakukan evaluasi terkait kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN. Pada Tahun 2024 juga sedang disusun regulasi teknis terkait Trem Otonom untuk mendukung peningkatan konektivitas.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

- a. Keterhubungan dalam pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu, diantaranya dengan koordinasi pihak internal (Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian) dan pihak eksternal (PT. KAI/BUPP/BUPS).
- b. Koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian kegiatan reaktivasi jalur KA Sawahlunto – Muarokalaban.
- c. Konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN Kementerian Keuangan, BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.
- d. Koordinasi dengan OIKN dan pihak Badan Usaha (*Norinco International Cooperation*) terkait rencana penyelenggaraan trem otonom di wilayah IKN.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

- a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.
- c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan.

5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio konektivitas antar wilayah Tahun 2024 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-6 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,772
2	Perkeretaapian	0,460

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 68 titik dari jumlah 1.039 titik (6,54%) yang terhubung secara nasional (134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 603 Pelabuhan serta 302 Bandar Udara).

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya:

- Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang).
- Monitoring penyelesaian *readiness criteria* kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.
- Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian Strategi/Kebijakan:*

- 1) Percepatan penyelesaian regulasi teknis terkait trem otonom.
- 2) Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

b. *Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:*

- 1) Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 (termasuk kegiatan pendukung konektivitas) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- 2) Antisipasi kegiatan pendukung konektivitas yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.
- 3) Mendorong pendanaan kegiatan pendukung konektivitas infrastruktur melalui alternatif pendanaan/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya.

c. *Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:*

Pengusulan kegiatan pendidikan dan pelatihan/Bimtek untuk SDM inspektur/penguji /teknis lainnya untuk peningkatan pengawasan kegiatan pembangunan prasarana mendukung konektivitas perkeretaapian.

3.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (*RATE OF ACCIDENT*)

Rate of Accident (RoA) merupakan salah satu ukuran untuk menilai kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam satu juta kejadian dibagi dengan Km tempuh (*Km Traveled*) pada periode tersebut. Kategori kecelakaan

kereta api mencakup anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar. Secara lebih detail, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan/perlintasan sebidang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api dengan mengacu:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
 - a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
 - b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), target rasio kejadian kecelakaan kereta api (*Rate of Accident*) sebesar 0,06 Kejadian Kecelakaan/1 juta Km Tempuh. Sampai dengan akhir Tahun 2024 sesuai inventarisasi kejadian kecelakaan kereta api, terdapat 5 kejadian kecelakaan kereta api. Uraian data kejadian kecelakaan kereta api pada Tahun 2024 disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-7 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2024

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	1
2	Anjlokkan	4
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		5

Tabel 3-8 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2024

Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BTP Bandung	Bandung	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Surabaya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pulau Jawa		2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pulau Sumatera		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah (Jawa + Sumatera)		2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5

Dengan kejadian 5 kecelakaan kereta api dan jumlah Km Tempuh sebesar 88.670.350 Km, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 0,06. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut::

$$\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{5 \text{ Kejadian Kecelakaan KA}}{88.670.350 \text{ Km Tempuh}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$$

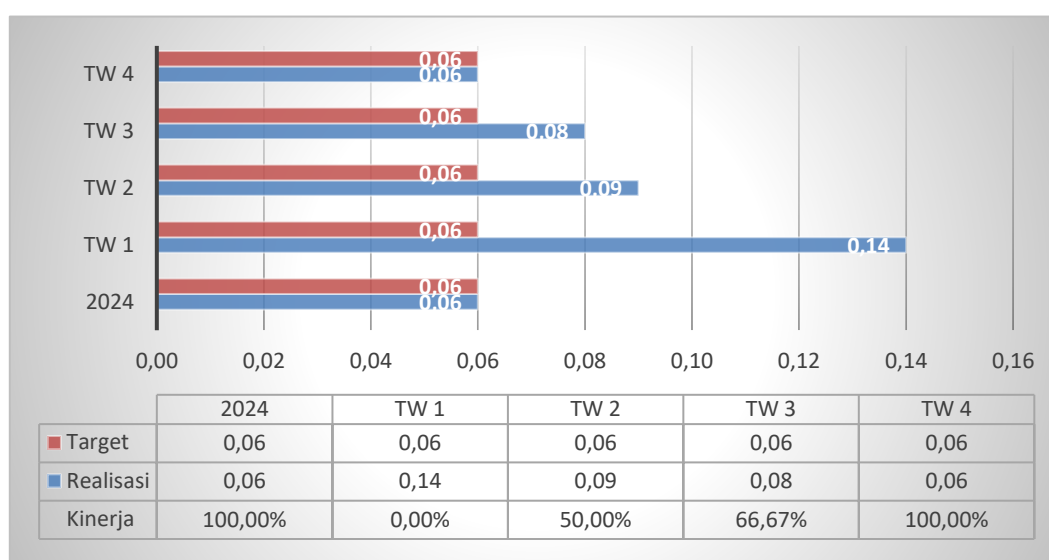
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 0,06, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 0,06. Pada periode Triwulan I, realisasi kinerja sangat rendah dikarenakan banyaknya kejadian kecelakaan yang

terjadi pada periode tersebut. Realisasi capaian kinerja kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-9 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,14	0,09	0,08	0,06	0	50,00	66,67	100,00	100,00



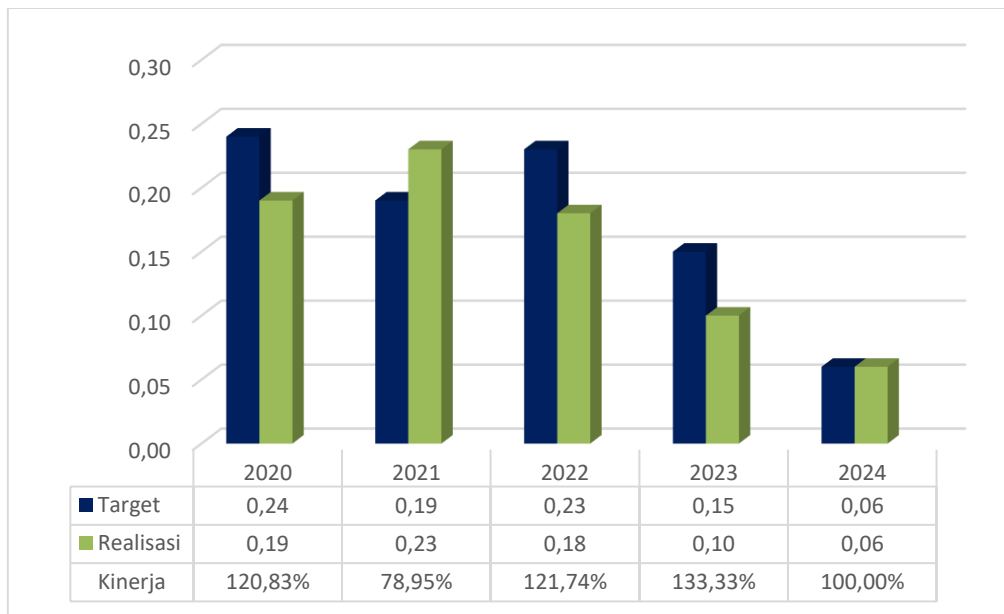
Gambar 3-4 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Pada Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir, realisasi indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*) cenderung berfluktuatif. Kinerja terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai RoA sebesar 0,23, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2024 dengan nilai RoA sebesar 0,06. Dibandingkan dengan target kinerja tahunan, capaian kinerja pada periode Tahun 2020-2024 mayoritas dapat tercapai (kinerja >100%), namun tidak tercapai pada Tahun 2021 (kinerja 79%). Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja Tahun 2020 s.d 2024 untuk indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api diuraikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-10 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of Accident</i>)	Rasio	0,24	0,19	0,23	0,15	0,06	0,19 (121%)	0,23 (79%)	0,18 (122%)	0,10 (133%)	0,06 (100%)



Gambar 3-5 Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of Accident*) Tahun 2020-2024

3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada Tahun 2024 sebesar 0,06 kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 0,22 kejadian kecelakaan/1 juta km, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 172,73%. Secara keseluruhan, capaian rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api selalu tercapai mengacu pada target Renstra Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 135%. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Tahun 2024 masih memenuhi target yang ditetapkan dan diharapkan capaian tersebut tetap dapat dipertahankan pada periode berikutnya menuju *zero accident*.

Tabel 3-11 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,19 (121%)	0,23 (104%)	0,18 (122%)	0,10 (157%)	0,06 (172%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-6 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi data Pemerintah Amerika Serikat periode tahun 2024 dan Belgia periode Tahun 2023 dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokkan) dan *collision* (*rear-end, side, head on*) (tabrakan). Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan di Belgia dan Amerika Serikat. Demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih lebih baik dari Amerika Serikat dan sama dengan Belgia. Uraian data kejadian kecelakaan di negara tersebut disampaikan pada Tabel berikut.

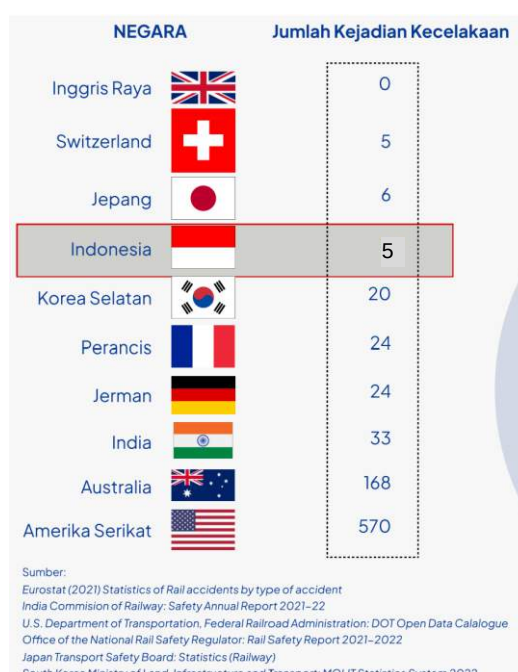
Tabel 3-12 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Rasio Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	930	0,0063
2	Belgia	8.298	6	0,0007
3	Indonesia	6.927	5	0,0007

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu pada beberapa sumber lainnya, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan beberapa negara sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 3-7 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Tahun 2024 diantaranya:

- a. Pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik diantaranya:
 - 1) Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api dan bencana alam di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
 - 2) Inspeksi keselamatan perkeretaapian di beberapa wilayah diantaranya wilayah Divre I Medan, Divre II Padang, Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang;

- 3) Pelaksanaan *Safety Assessment* (SA) pada pekerjaan peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian pada lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota, serta pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api di DAOP I-VIII dan DIVRE I- IV;
 - 4) Pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) kepada PT. KAI (Persero) dengan nilai 77,68% (Baik);
 - 5) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang dihasilkan.
- b. Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* khusus dalam rangka Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru mencakup:
- 1) Inspeksi/*rampcheck* SPM berupa SPM dalam Perjalanan KA dan SPM di Stasiun KA.
 - 2) Inspeksi/*rampcheck* keselamatan di wilayah kerja PT. KAI, LRT Jabodebek, PT. MRT, PT. KCI dan LRT Jakpro.
 - 3) Inspeksi/*rampcheck* sarana di wilayah DAOP - DIVRE dan Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), PT KCI, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta.
- c. Pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian serta kompetensi SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator.
- d. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian.
- a. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui bimbingan teknis/pelatihan bidang keselamatan perkeretaapian untuk mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. Selain itu, inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian (pengukuhan pada Agustus 2024) telah berperan pada kegiatan inspeksi terhadap kondisi sarana dan prasarana sehingga telah didukung dengan SDM yang kompeten.
- e. Penempatan kereta penolong, *crane* dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan dan evakuasi agar jalur dapat segera dilalui.

Selain itu, juga terdapat beberapa isu/kendala yang perlu penyelesaian diantaranya:

- a. Keterbatasan anggaran untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan, termasuk keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan IMO yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran pada Tahun 2025;
- b. Penyelenggaraan IMO Tahun 2024 belum dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta masih perlu dilakukan koordinasi sebagai tindak lanjut penetapan KM 63 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT. KAI untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- c. Masih terdapat fasilitas operasi yang digunakan dengan kondisi telah melewati umur teknis, serta kurangnya pengawasan dan perawatan sistem persinyalan dan telekomunikasi;
- d. Data teknis terkait kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian belum tersedia secara lengkap dan *update (realtime)*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

- a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan berupa inspeksi, *safety assessment*, audit serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian membutuhkan hubungan data dan kinerja BUPP/BUPS/operator perkeretaapian dan Pemerintah Daerah. Keterhubungan *stakeholder* lain juga terealisasi dalam pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian.
- b. Pelaksanaan posko terpadu angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di kantor pusat dan daerah yang mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya).
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan SDM perkeretaapian dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan/akademisi/ perguruan tinggi,

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya diantaranya:

- a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ *rampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.
- b. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.
- c. Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI.
- d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan:***

Penyiapan kebutuhan data teknis terkait kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian secara lengkap dengan koordinasi BUPP/BUPS/operator perkeretaapian sebagai acuan penyusunan program peningkatan keselamatan.

b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:***

Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan keselamatan yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

c. ***Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:***

Penempatan/penugasan inspektur guna mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk inspeksi dan pemeriksaan keselamatan perkeretaapian.

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*) diharapkan dapat seminimal mungkin untuk menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.
- b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga mengganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

3.2.3 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP), Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Penumpang dan Barang, Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)

Target persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) sebesar 90,50% baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan dalam perjalanan kereta api.

Pada Tahun 2024, diperoleh jumlah rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 834.801 KA. Rincian data perjalanan kereta api tepat waktu per bulan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2024

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	72.530	72.530	66.596	66.596	69.973	69.973	68.285	68.285	94,15%	94,15%
Feb	66.718	139.248	60.287	126.883	64.167	134.140	62.227	130.512	93,27%	93,73%
Mar	72.189	211.437	67.847	194.730	70.521	204.661	69.184	199.696	95,84%	94,45%
Apr	71.451	282.888	65.888	260.618	68.734	273.395	67.311	267.007	94,21%	94,39%
Mei	73.351	356.239	70.186	330.804	72.014	345.409	71.100	338.107	96,93%	94,91%
Jun	71.316	427.555	68.324	399.128	69.758	415.167	69.041	407.148	96,81%	95,23%
Jul	74.227	501.782	71.105	470.233	72.659	487.826	71.882	479.030	96,84%	95,47%
Ags	73.922	575.704	71.454	541.687	72.910	560.736	72.182	551.212	97,65%	95,75%
Sep	71.076	646.780	68.655	610.342	70.201	630.937	69.428	620.640	97,68%	95,96%
Okt	74.534	721.314	71.671	682.013	73.436	704.373	72.554	693.193	97,34%	96,10%
Nov	71.447	792.761	67.076	749.089	70.430	774.803	68.753	761.946	96,23%	96,11%
Des	75.151	867.912	71.487	820.576	74.224	849.027	72.855	834.801	96,95%	96,19%

Dengan jumlah rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu pada Tahun 2024 sebanyak 834.801 KA, dibandingkan jumlah realisasi perjalanan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 867.912 KA, maka diperoleh realisasi persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Tahun 2024 sebesar 96,19%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{On Time Performance (OTP)} = \frac{834.801 \text{ KA}}{867.912 \text{ KA}} \times 100,00\%$$

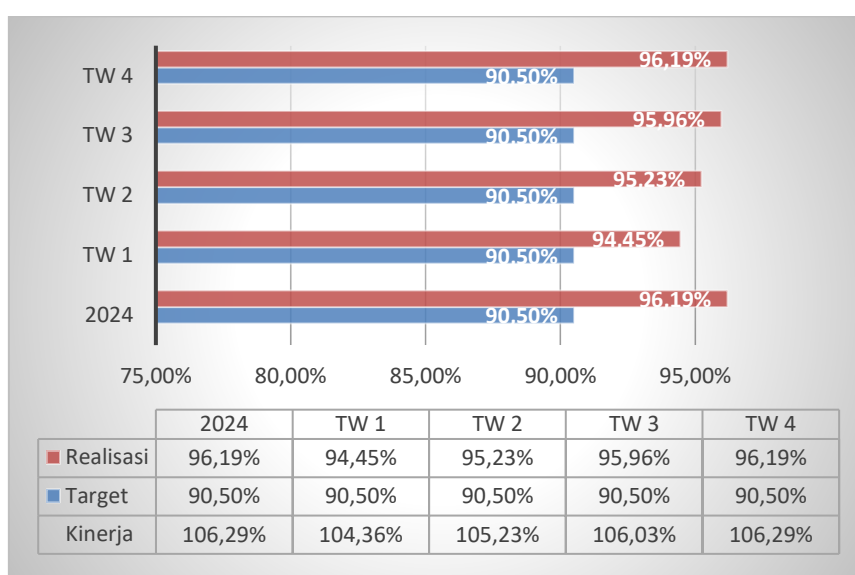
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Tahun 2024 sebesar 96,19%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 106,29% dari target Tahun 2024 sebesar 90,50%. Nilai OTP per triwulan pada periode Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan setiap triwulannya, dengan nilai OTP kumulatif terendah sebesar 94,45% pada Triwulan I dan OTP kumulatif tertinggi sebesar 96,19% pada Triwulan IV. Apabila dirinci per bulan, OTP bulanan tertinggi terjadi pada periode Agustus – Oktober 2024 yang mencapai OTP sebesar 97%.

Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-14 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	94,45	95,23	95,96	96,19	104,36	105,23	106,03	106,29	106,20



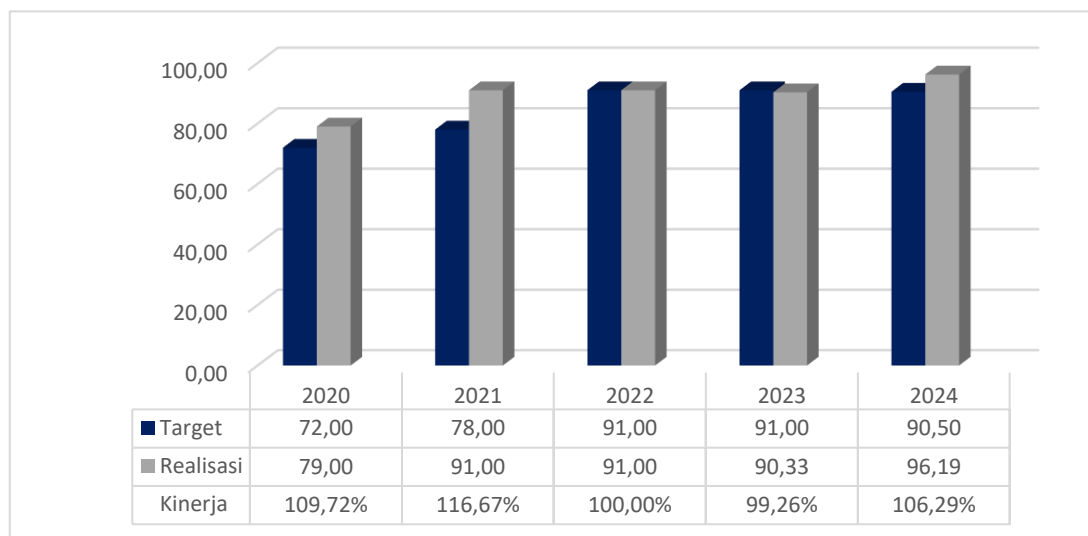
Gambar 3-8 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir untuk persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api diperoleh cenderung berfluktuatif dengan nilai realisasi OTP rata-rata pada periode 2020-2024 sebesar 89%. Kinerja terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai OTP sebesar 79%, sedangkan kinerja tertinggi pada Tahun 2024 dengan nilai OTP sebesar 96%. Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	72	78	91	91	90,5	79 (110%)	91 (117%)	91 (100%)	90 (99%)	96 (106%)



Gambar 3-9 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2020-2024

3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

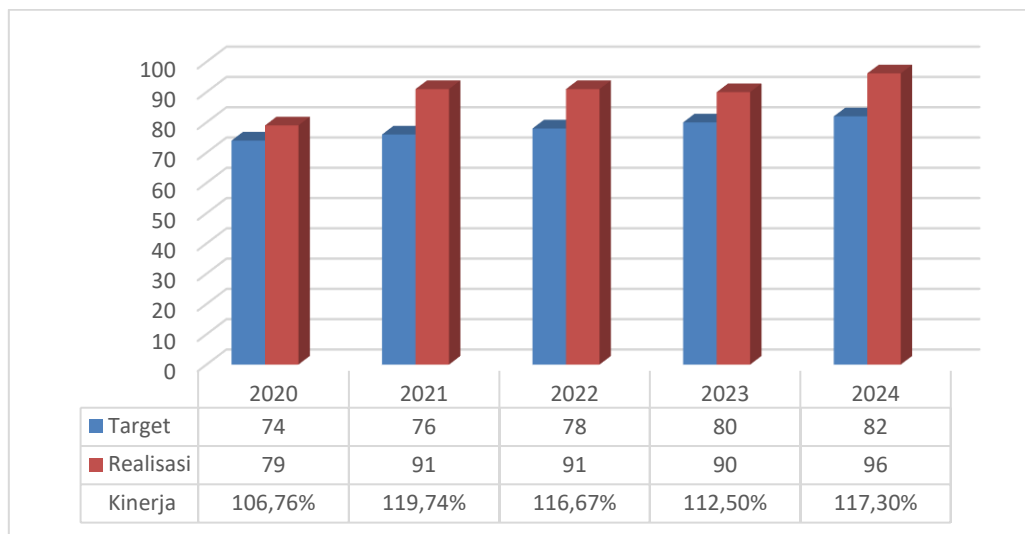
Realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api Tahun 2024 sebesar 96,19%, sedangkan target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 82% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 117%. Secara keseluruhan, capaian indikator OTP dapat tercapai mengacu pada target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (kinerja > 100%) dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 115% dimana capaian kinerja

tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar capaian 120%. Demikian juga perbandingan dengan target Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, capaian Tahun 2024 memenuhi target yang ditetapkan mencapai kinerja 117%.

Tabel 3-16 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Rasio	74	76	78	80	82	79 (107%)	91 (120%)	91 (117%)	90 (113%)	96 (117%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

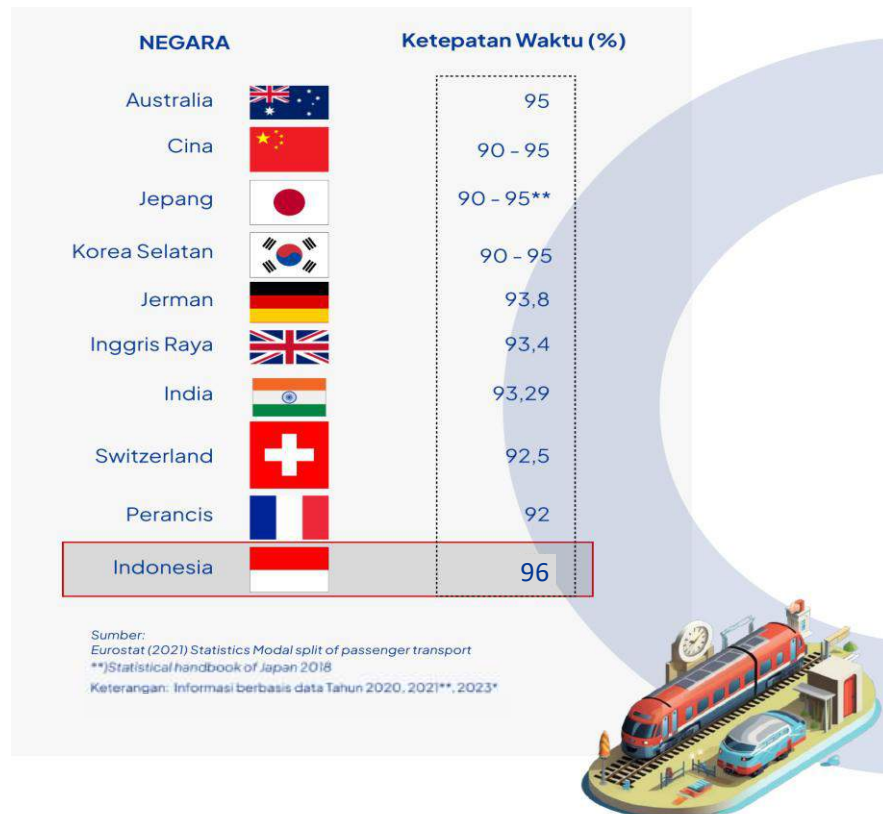


Gambar 3-10 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport)* dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja

90-95%. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 3-11 Perbandingan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada Tahun 2024 diantaranya:

- b. Peningkatan kinerja *On Time Performance* LRT Jabodebek pada periode Triwulan IV mencapai sebesar 98,6%;
- c. Peningkatan jalur kereta api telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya lintas Padang – Bukit Putus – Pauhlina, Cikampek-Cirebon, Kertasemaya-Arjawinangun, Maos-Cilacap, Solo-Wonogiri dan Kisaran-Mambangmuda;
- d. Meningkatnya nilai TQI Kategori I dan II hampir pada setiap wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) terutama pada BTP Bandung dan BTP Surabaya sehingga batas kecepatan laju kereta api dapat meningkat;
- e. Peningkatan pengawasan perjalanan kereta api diantaranya pada momen penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan pengawasan intensif baik oleh Posko Terpadu maupun Posko di daerah.

- f. Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/lainnya.
- g. Peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang sebagai upaya meminimalkan gangguan operasional perjalanan kereta api dan mendukung pencapaian OTP.
- h. Koordinasi dengan operator perkeretaapian dalam penanganan kecelakaan kereta api (5 kejadian pada Tahun 2024), sehingga gangguan operasional KA yang terjadi dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketepatan waktu, termasuk penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.

Selain itu, terdapat kendala/permasalahan mengacu data andil keterlambatan perjalanan kereta api periode Triwulan IV Tahun 2024 antara lain faktor operasi perjalanan KA seperti taktis pengendalian perjalanan KA, penambahan/pelepasan sarana di stasiun antara, penentuan pemindahan persilangan dan lain-lain. Faktor cuaca/alam juga berpengaruh dengan adanya gangguan operasional berupa bencana banjir di beberapa lokasi yang dilalui layanan KA.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

- a. Hubungan kerja BUPP/BUPS/operator perkeretaapian pada kegiatan pengukuran TQI, peningkatan jalur KA, pengelolaan dan pemantauan realisasi GAPEKA;
- b. Pengawasan perjalanan KA melalui pelaksanaan posko terpadu di kantor pusat dan daerah dengan mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya);
- c. Peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang dengan mengikutsertakan Kemendagri, Pemerintah Daerah, PUPR/pengelola jalan, masyarakat sekitar.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

- a. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambringan, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.
- b. Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalioso, Medan – Binjai/*elevated*) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.
- d. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penyesuaian penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

Penetapan dan pengawasan intensif terhadap implementasi GAPEKA Tahun 2025 agar perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

- 1) Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan (termasuk lanjutan kegiatan pembangunan jalur ganda dan peningkatan jalur KA) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- 2) Antisipasi kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
- b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan pemenuhan target angkutan penumpang kereta api sebesar 78,80% untuk Tahun 2024. Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Tahun 2024 diperoleh sebanyak 506.612.015 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial (KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif, bisnis dan ekonomi non PSO, KA Bandara SHIA) sebanyak 37.716.238 penumpang.
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (non KRL Jabodetabek) sebanyak 65.267.081 penumpang.
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 328.153.923 penumpang.
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 4.928.095 penumpang.
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 40.821.422 penumpang.
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 1.226.683 penumpang.

7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspres dan KA Srilelawangsa) sebanyak 1.439.663 penumpang.
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 21.055.870 penumpang.
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 6.003.040 penumpang.

Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 1.097.913.782 penumpang (Tahun 2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, Tahun 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang, Tahun 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang dan Tahun 2023 sebanyak 428.894.610 penumpang) dan jumlah penumpang pada Tahun 2024 sebanyak 506.612.015 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 1.604.525.797 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 81,65%.

Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

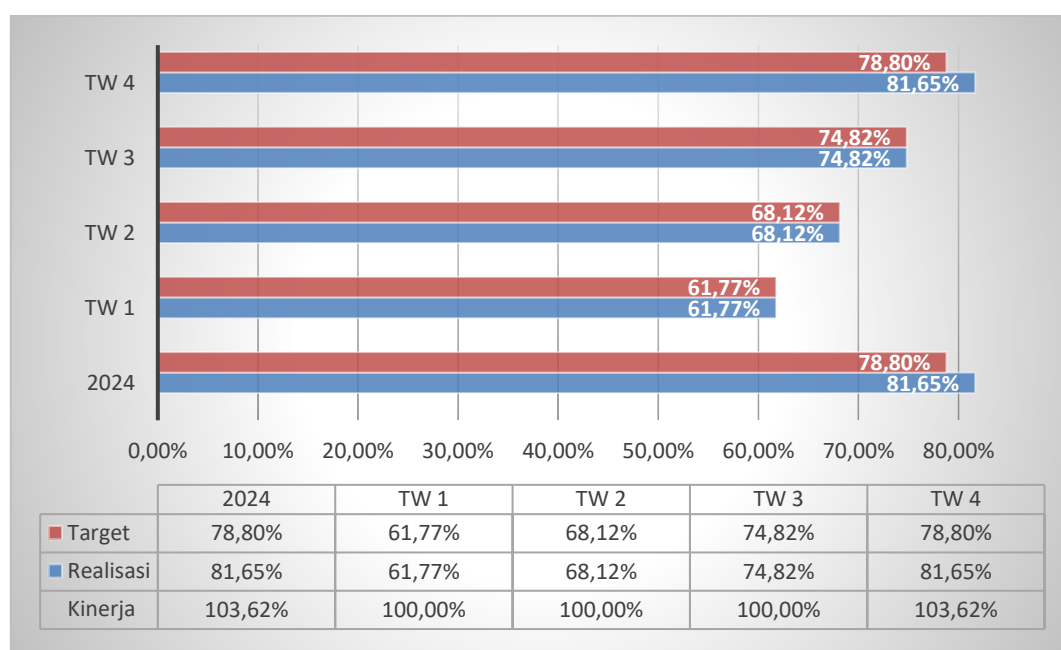
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{1.604.525.797 \text{ pnp (realisasi 2020 – 2024)}}{1.965.065.861 \text{ pnp (target Renstra 2020 – 2024)}} \times 100\%$
---	---	---

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan penumpang Tahun 2024 sebesar 81,65%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,62% terhadap target Tahun 2024 sebesar 78,80%. Pada Tahun 2024, produksi angkutan penumpang cenderung mengalami kenaikan signifikan dengan pengoperasian beberapa lintas pelayanan baru serta masifnya penggunaan angkutan KA perkotaan. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-17 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80	61,77	68,12	74,82	78,80	61,77	68,12	74,82	81,65	100,00	100,00	100,00	103,62	103,62



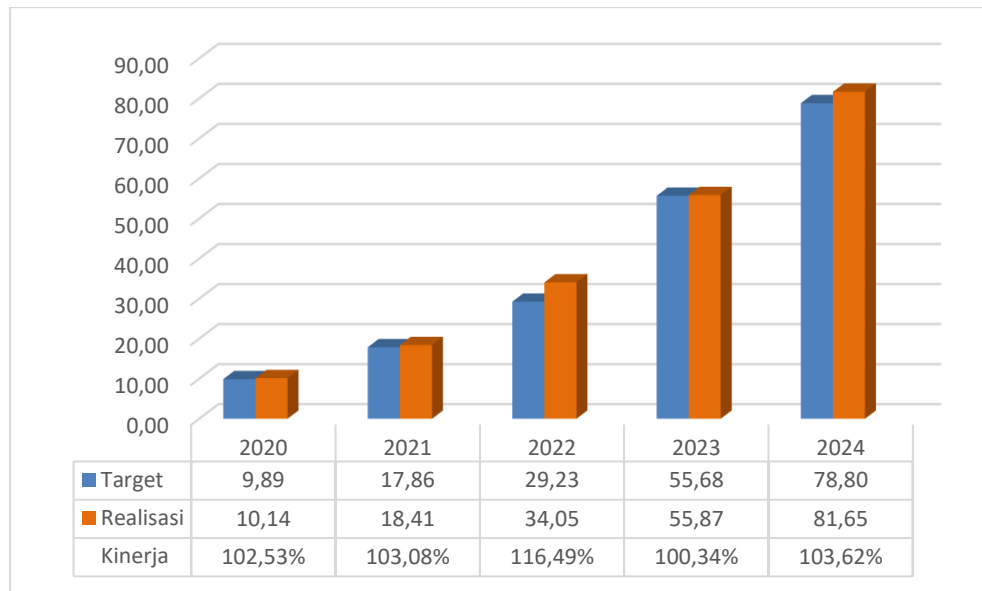
Gambar 3-12 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir untuk pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diperoleh bahwa target dapat terpenuhi setiap tahun (kinerja >100%) dengan rata-rata peningkatan per tahun dari Tahun 2020-2024 sebesar 17,88% dimana peningkatan tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 25,78%. Hal tersebut didukung dengan pengoperasian beberapa pelayanan baru selama Tahun 2023-2024 seperti LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Perbandingan target dan realisasi periode Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-18 Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	9,89	17,86	29,23	55,68	78,80	10,14 (103%)	18,41 (103%)	34,05 (116%)	55,87 (100%)	81,65 (104%)



Gambar 3-13 Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2020-2024

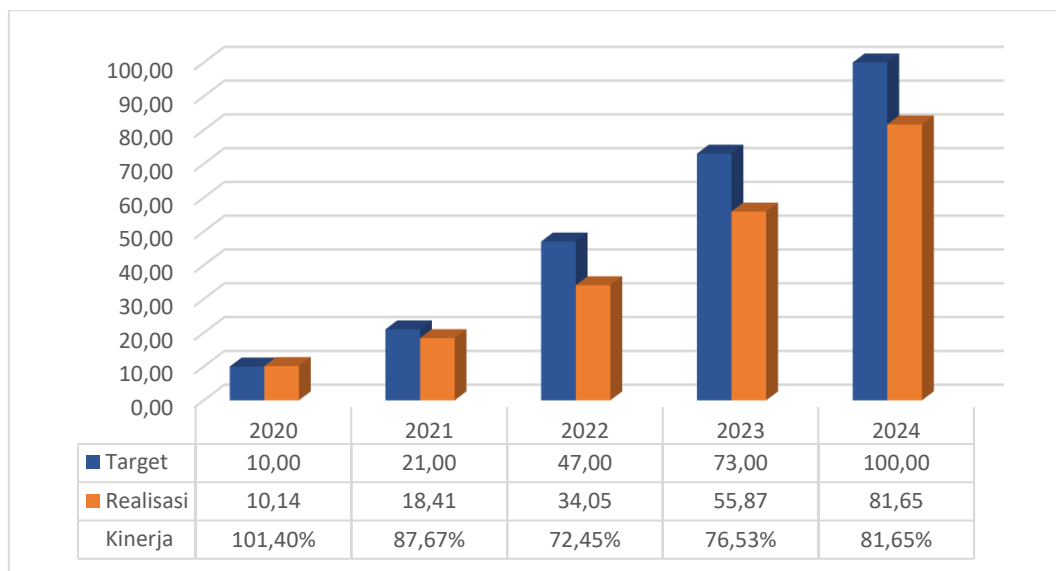
3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 81,65%, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 81,65%. Capaian indikator pemenuhan target angkutan penumpang kereta api mayoritas tidak mencapai target sesuai Rencana Strategis (Tahun 2021-2024). Hal tersebut dikarenakan jumlah angkutan penumpang kereta api turun drastis (terutama Tahun 2021-2022) karena kondisi Pandemi COVID-19, di sisi lain target Rencana Strategis ditetapkan dalam kondisi normal (tidak mempertimbangkan kondisi luar biasa Pandemi COVID-19). Pemerintah secara resmi mencabut status Pandemi COVID-19 pada Juni 2023 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tabel 3-19 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10	21	47	73	100	10,14 (101%)	18,41 (88%)	34,05 (72%)	55,87 (77%)	81,65 (82%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-14 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada Tahun 2023-2024. Perbandingan jumlah angkutan penumpang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-20 Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	139.583.333	4.466
2	Malaysia	1.799	25.119.642	13.960
3	Singapura	259	103.350.000	399.807
4	Indonesia	6.927	42.188.893	6.090

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)

*) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya dan Singapura namun lebih tinggi dari Malaysia. Namun apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih rendah. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih sangat rendah. Dengan panjang jalur kereta api mencapai lebih dari 6.000 km namun hanya mengangkut sedikit penumpang, berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diantaranya:

- Peningkatan jumlah penumpang KA perkotaan yang signifikan (KRL Jabodetabek dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.007.594 penumpang/hari, LRT Jabodebek dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 83.272 penumpang/hari);
- Peningkatan animo masyarakat dalam penggunaan angkutan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang/hari;
- Peningkatan minat masyarakat terhadap angkutan penumpang kereta api dengan stimulasi pemberian subsidi *Public Service Obligation* yang terus meningkat dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4,589 Triliun,

termasuk penyelenggaraan subsidi KA perintis (diantaranya LRT Sumatera Selatan, Solo – Wonogiri, Makassar – Parepare, KA Aceh, dan lainnya).

- d. Peningkatan jumlah penumpang KA antar kota khususnya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru termasuk momen libur panjang yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan.
- e. Peningkatan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan KA sesuai SPM serta peningkatan akses stasiun, integrasi antar moda dan kemudahan memperoleh informasi juga mendorong peningkatan jumlah angkutan KA penumpang.
- f. Beberapa inovasi/peningkatan layanan kereta api didukung sosialisasi/publikasi secara masif oleh operator perkeretaapian, diantaranya perpanjangan rute perjalanan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun, layanan *Direct Train* yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (relasi Gambir-Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja/*crosscutting* terkait peningkatan angkutan penumpang kereta api dengan koordinasi BUPS/operator perkeretaapian melalui kegiatan pengawasan SPM dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat. Upaya peningkatan akses stasiun dan integrasi antar moda juga terdapat keterhubungan kinerja dengan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/operator moda lain. Selain itu juga terdapat hubungan kerja dan data dalam penyediaan/penyelenggaraan subsidi perintis serta pengelolaan *Public Service Obligation* yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Pengurangan kepadatan/kemacetan lalu lintas jalan raya serta pengurangan emisi gas rumah kaca khususnya di wilayah perkotaan dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum massal kereta api dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi.

- b. Peningkatan minat investasi infrastruktur perkeretaapian dengan tingginya *demand* penggunaan transportasi kereta api, termasuk dukungan pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas layanan lainnya.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Muara Satu, Rantauprapat – Pondok S5, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai.
- b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran.
- c. Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang).
- d. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara *realtime* serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran diantaranya:

a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:**

Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 terkait prediksi target angkutan penumpang kereta api dengan data dan analisa yang memadai guna selanjutnya menjadi acuan penetapan target pada masing-masing layanan/lokasi.

b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:***

Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan barang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan barang kereta api periode Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan pemenuhan target angkutan barang kereta api sebesar 77,80%. Adapun realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2024 diperoleh sebesar 69.401.018 ton dengan rincian realisasi per wilayah sebagai berikut:

1. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak 8.630.997 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - a. Peti kemas sebanyak 5.028.352 ton.
 - b. BBM sebanyak 1.269.873 ton.
 - c. Semen sebanyak 1.773.411 ton.
 - d. Batu bara sebanyak 34.596 ton.
 - e. Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 181.147 ton.
 - f. Pupuk sebanyak 24.180 ton.
 - g. Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 319.438 ton.
2. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak 60.770.021 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - a. Batu bara sebanyak 56.291.466 ton.
 - b. Semen sebanyak 1.450.733 ton.
 - c. Karet dan klinker sebanyak 726.025 ton.
 - d. Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 679.668 ton.
 - e. BBM sebanyak 848.373 ton.

- f. Peti kemas sebanyak 634.583 ton.
- g. Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 4.203 ton.
- h. Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 134.970 ton.

Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 217.875.324 ton (Tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, Tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton, Tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton dan Tahun 2023 sebanyak 64.255.998 ton) dan realisasi pada Tahun 2024 sebanyak 69.401.018 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut kereta api dari Tahun 2020 s.d 2024 sebanyak 287.276.342 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 78,73%.

Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

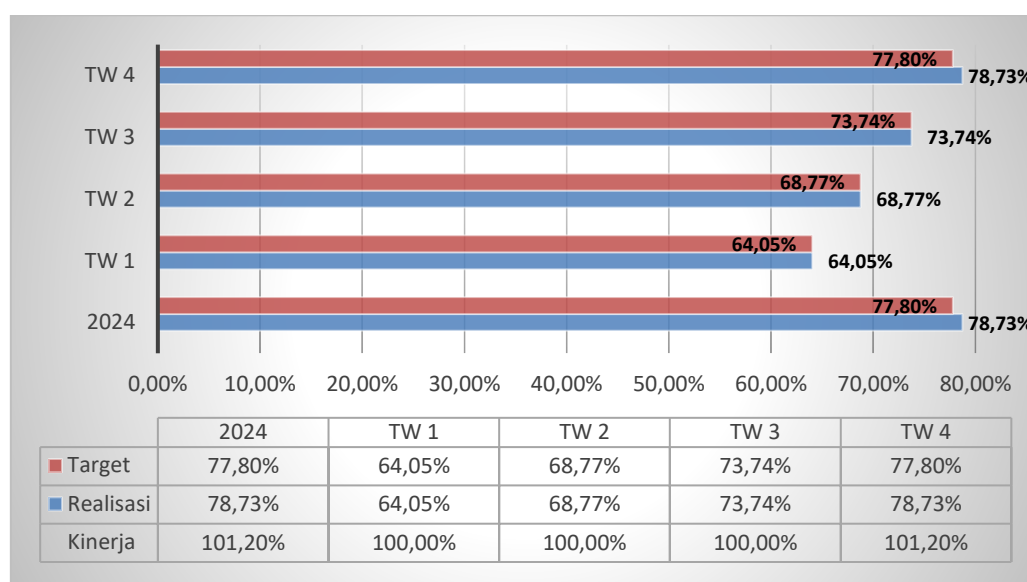
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	=	$\frac{287.276.342 \text{ ton (realisasi 2020 – 2024)}}{364.906.806 \text{ ton (target Renstra 2020 – 2024)}} \times 100\%$
--	---	---

1. Perbandingan Target Triwulan dalam Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api Tahun 2024 sebesar 78,73% dan target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) sebesar 77,80%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,20%. Produksi angkutan barang setiap triwulan pada Tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan yaitu pada Triwulan I sebesar 15.830.337 ton, Triwulan II sebesar 17.225.050 ton, Triwulan III sebesar 18.169.095 ton dan Triwulan IV sebesar 18.176.536 ton. Rincian target dan realisasi per triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-21 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80	64,05	68,77	73,74	77,80	64,05	68,77	73,74	78,73	100,00	100,00	100,00	101,20	101,20



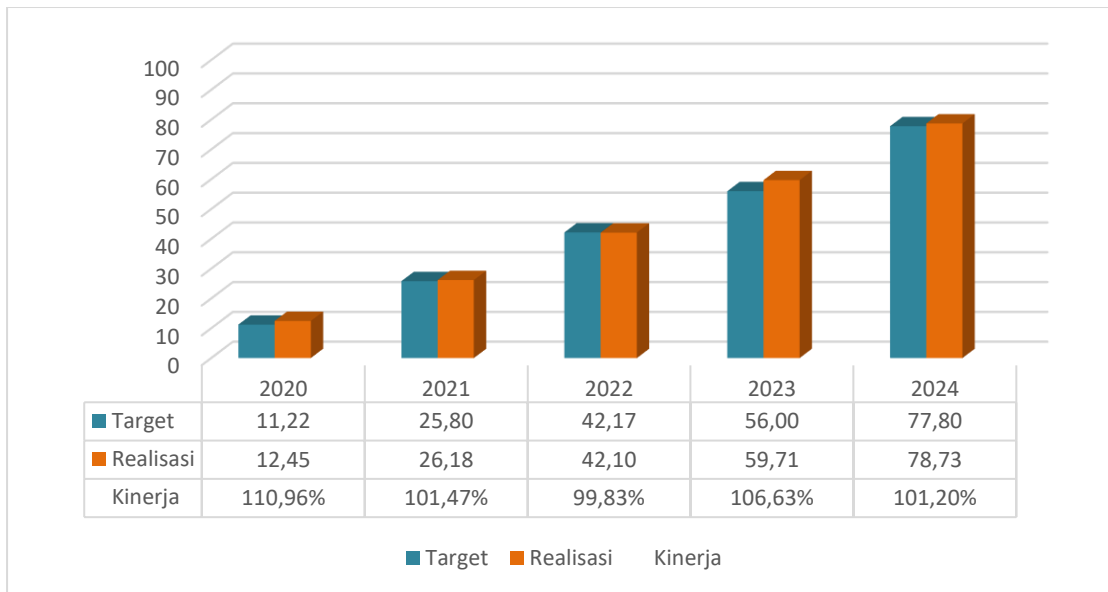
Gambar 3-15 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Pada Tahun 2020-2024, capaian kinerja cenderung berfluktuatif namun secara keseluruhan per tahun dapat memenuhi target tahunan (kinerja >100%). Realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api diperoleh secara kumulatif pada periode Tahun 2020-2024 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 16,57% per tahun. Perbandingan target dan realisasi periode 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-22 Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11,22	25,80	42,17	56,00	77,80	12,45 (111%)	26,18 (101%)	42,10 (100%)	59,71 (107%)	78,73 (101%)



Gambar 3-16 Perbandingan Target dan Realisasi Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2020-2024

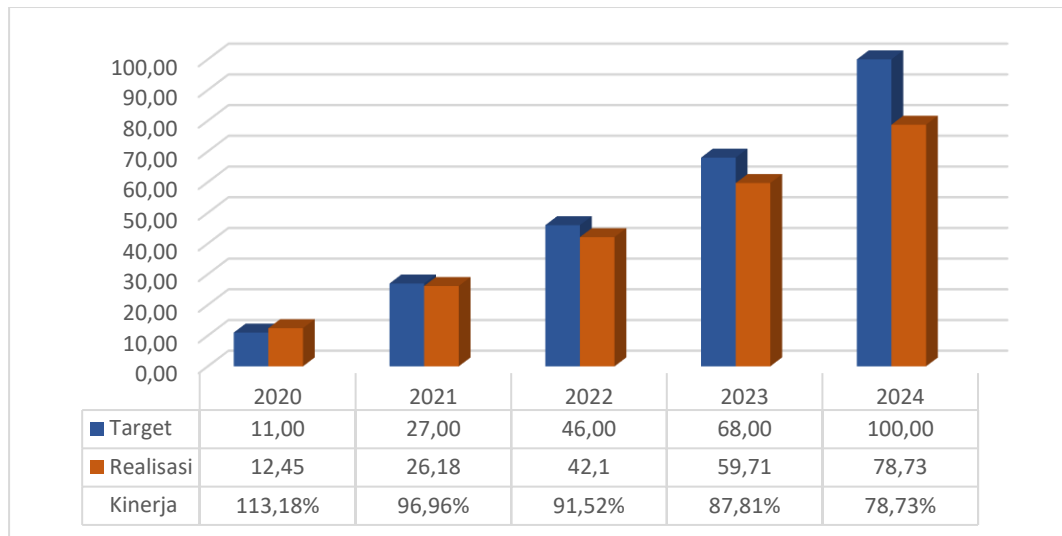
3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 78,73%, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 78,73%. Capaian tersebut terus menurun dari Tahun 2020 yang berkinerja 113% sampai Tahun 2024 yang hanya berkinerja 79% mengacu target Rencana Strategis. Hal tersebut diantaranya karena minat penggunaan kereta api angkutan barang yang rendah akibat mayoritas masih *double handling* sehingga kalah bersaing dengan moda lainnya.

Tabel 3-23 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	11	27	46	68	100	12,45 (113%)	26,18 (97%)	42,10 (92%)	59,71 (88%)	78,73 (79%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



Gambar 3-17 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan barang dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3-24 Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	6.200.000	17
2	Indonesia	6.927	7.711.224	93

Sumber No. 1 : *Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Demikian juga apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dengan rata-rata mencapai 93 Ton/Km per bulan dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 17 Ton/Km per bulan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan)

yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Produksi angkutan barang masih didominasi dengan komoditi batubara di Sumatera Bagian Selatan yang juga digunakan untuk keperluan ekspor. Faktor lainnya tercapainya target antara lain:

- a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya *mainline* di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang.
- b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai *demand* angkutan barang.
- c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi *National Logistic Ecosystem* secara bertahap pada Tahun 2024.
- d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan kerja dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan sektor logistik/perdagangan/industri/pertanian/perkebunan/pertambangan dimana angkutan kereta api barang membutuhkan sinergi dengan sektor-sektor tersebut sebagai pembentuk *demand*. Selain itu, koordinasi dengan BUPS/operator perkeretaapian juga dilakukan yang melakukan sosialisasi terhadap perusahaan/pabrik/*outlet* potensial menggunakan angkutan kereta api barang dalam distribusi hasil produksinya. Keterhubungan data dan kinerja dengan sub sektor perhubungan laut dan darat

juga terjalin dalam penyelenggaraan multimoda (pelabuhan, terminal barang/*dryport*, bea cukai, lainnya)

Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Pengurangan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan memindahkan sebagian besar angkutan barang/truk menjadi menggunakan kereta api. Dengan pengurangan tersebut juga dapat lebih mengurangi biaya perawatan jalan, dimana apabila jalan terus menerus dilewati truk angkutan logistik yang kapasitasnya bisa mencapai 40 ton maka memiliki risiko yang lebih besar mengalami deformasi struktural, kemunduran struktur bawah jalan dan lainnya sehingga memerlukan biaya ekstra dalam perawatannya.
- b. Pengurangan kepadatan lalu lintas jalan raya dengan mengurangi truk angkutan barang yang beroperasi di jalan juga dapat meningkatkan keselamatan transportasi, karena kereta api memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan truk angkutan logistik yang memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kejadian kecelakaan akibat kelebihan beban muatan, titik *blind spot*, kelelahan pengemudi, cuaca buruk, pelanggaran aturan lalu lintas dan lainnya.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

- a. Pengoptimalan pemanfaatan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Pelaksanaan konsultasi publik penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda kereta api pada Tahun 2025 guna mendukung peningkatan *modal share* angkutan barang.
- c. Pemanfaatan *market* bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing *stakeholder* agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan:***

- 1) Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 terkait prediksi target angkutan kereta api barang dengan data dan analisa yang memadai guna selanjutnya menjadi acuan penetapan target pada masing-masing layanan/lokasi.
- 2) Penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator perkeretaapian untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (*rolling highway*).

b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:***

Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI

Perhitungan persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada hasil pengukuran bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia di wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dengan kecepatan 80 s.d 120 Km/jam dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan kecepatan 40 s.d 80 Km/jam.

Pada Tahun 2024, pengukuran TQI dilakukan setiap periode triwulan pada seluruh lintas utama di wilayah Jawa dan Sumatera. Data pengukuran yang digunakan sebagai data capaian Tahun 2024 adalah hasil pengukuran kereta ukur periode III (data periode IV masih dalam proses pengolahan data) dengan jumlah jalur terukur sepanjang 5.935,212 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.639,950 km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah

sepanjang 295,262 Km. Rincian hasil pengukuran TQI menggunakan kereta ukur diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-25 Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI

Klasifikasi TQI	Kualifikasi			Jalur Terukur Tahun 2024 (Km'Jalur)		
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori I	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam	5.935,212	5.639,950
		Kondisi	:	Nyaman		
	Kategori II	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam		295,262
		Kondisi	:	Aman		
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori III	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam		4,97%
		Kondisi	:	Waspada		
	Kategori IV	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam		
		Kondisi	:	Bahaya		

Hasil pengukuran TQI menggunakan kereta ukur sebesar 95,02%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

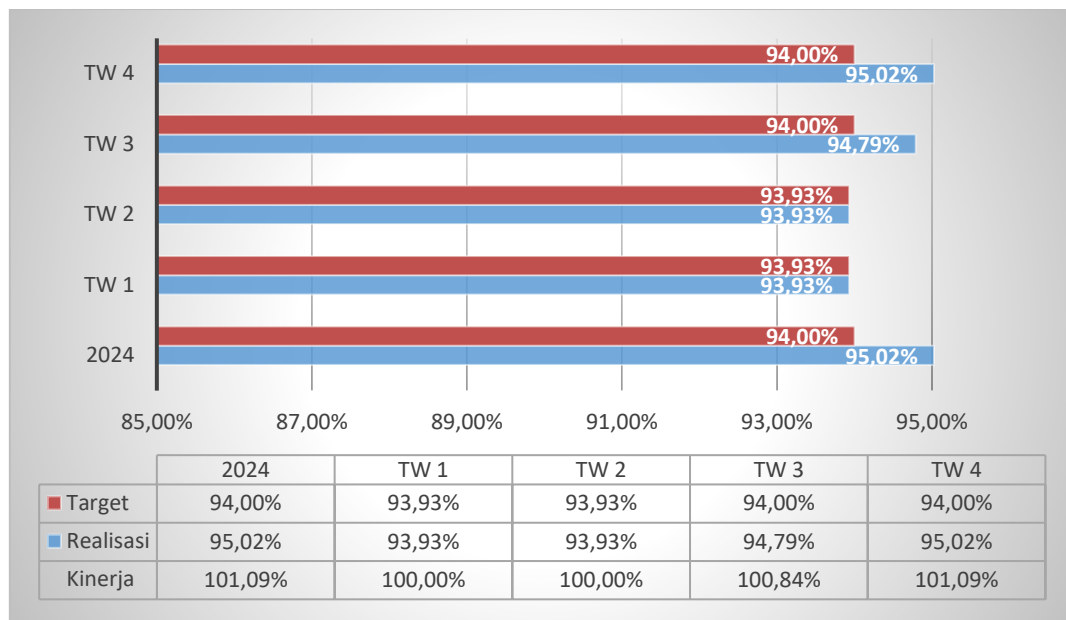
$$\text{Persentase Jalur KA sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{5.639,950 \text{ km}}{5.935,241 \text{ km}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) sebesar 94,00% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 95,02%, maka capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 101,09%. Capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan cenderung mengalami kenaikan dan secara kumulatif target dapat terpenuhi (kinerja >100%) dengan perolehan data pengukuran TQI berdasarkan hasil koordinasi dan pembahasan bersama PT. KAI. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-26 Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94,00	93,93	93,93	94,00	94,00	93,93	93,93	94,79	95,02	100,00	100,00	100,84	101,09	101,09



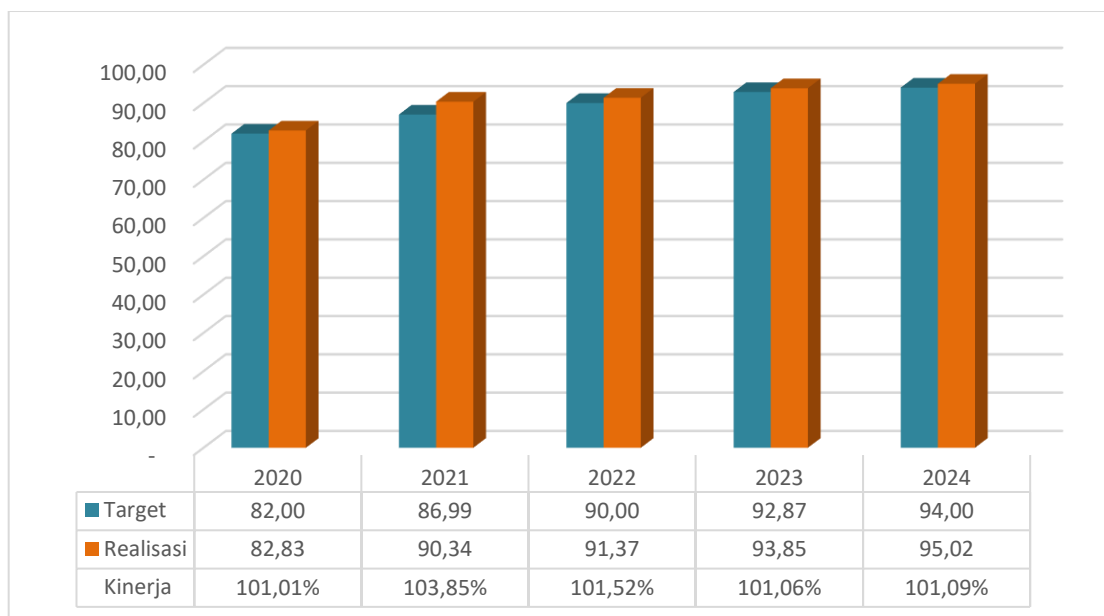
Gambar 3-18 Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Secara keseluruhan capaian persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI pada beberapa tahun terakhir dapat terpenuhi sesuai target (kinerja >100%), dimana realisasi TQI cenderung mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan TQI tersebut didukung diantaranya dengan kegiatan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi termasuk pembangunan jalur ganda kereta api.

Tabel 3-27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,00	86,99	90,00	92,87	94,00	82,83 (101%)	90,34 (104%)	91,37 (102%)	93,85 (101%)	95,02 (101%)



Gambar 3-19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024

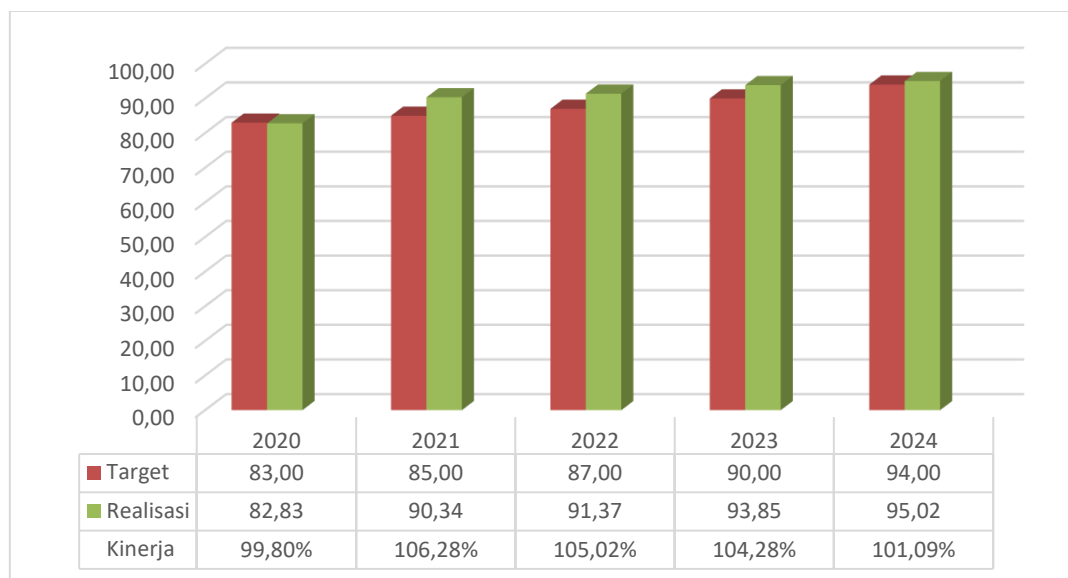
3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI pada Tahun 2024 sebesar 95,02%, sedangkan target Tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 94,00% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101,09%. Capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mayoritas dapat terpenuhi sesuai target setiap tahun (kecuali Tahun 2020) dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,71% dan capaian kinerja tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 106,28% dari target tahunan pada Rencana Strategis.

Tabel 3-28 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi				
		2020	2021	2022	2024	2024	2020	2021	2022	2024	2024
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	83	85	87	90	94	82,83 (99,80%)	90,34 (106,28%)	91,37 (105,02%)	93,85 (104,28%)	95,02 (101,09%)

*) Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

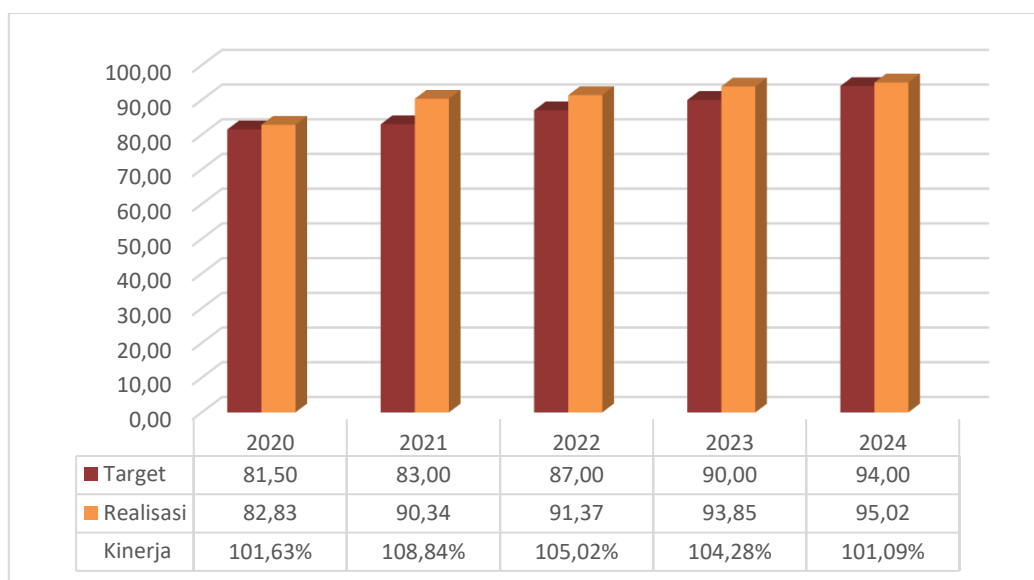


Gambar 3-20 Perbandingan Target Rencana Strategis dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Selain itu, persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI juga ditargetkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 94,00%. Dengan realisasi persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2024 sebesar 95,02%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,09% berdasarkan target pada RPJMN tersebut. Pada Tahun 2020-2024, kinerja persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI selalu tercapai dengan rata-rata kinerja sebesar 104,20% dan realisasi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 108,84% dari target tahunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 3-29 Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2024	2024	2020	2021	2022	2024	2024
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	81,50	83,00	87,00	90,00	94,00	82,83 (102%)	90,34 (109%)	91,37 (105%)	93,85 (104%)	95,02 (101%)



Gambar 3-21 Perbandingan Target RPJMN dan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Tahun 2020-2024

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kualitas prasarana perkeretaapian diperoleh melalui survey opini oleh *World Economic Forum* (WEF) yang merupakan salah satu komponen penilaian *Global Competitiveness Index* yang dipublikasikan secara tahunan. Survey dilaksanakan di 101 negara dengan skor kualitas prasarana perkeretaapian didasarkan pada pertanyaan penilaian jalur kereta api di negara-negara yang telah ditentukan, dalam skala 1 (terbelakang) hingga skala 7 (luas dan efisien menurut standar internasional). Data kinerja kualitas prasarana perkeretaapian di beberapa negara wilayah ASEAN disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-30 Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara ASEAN

No	Ranking	Negara	<i>Railroad Infrastructure Quality</i>
1	5	Singapura	5,8
2	12	Malaysia	5,1
3	18	Indonesia	4,7
4	52	Vietnam	3,6
5	75	Thailand	2,8
6	86	Filipina	2,4

Sumber : *World Economic Forum* (WEF)

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa kualitas infrastruktur jalur kereta api di Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (peringkat 3 dari 6 negara). Demikian juga apabila dibandingkan dengan keseluruhan negara yang menjadi lokasi survey WEF, bahwa diperoleh kualitas prasarana perkeretaapian di Indonesia dengan perolehan ranking 18 dari 101 negara. Beberapa perbandingan dengan negara-negara selain wilayah ASEAN disampaikan pada Gambar berikut.

NEGARA		Nilai Kualitas
Jepang		6,8
Switzerland		6,4
Korea Selatan		5,9
Amerika Serikat		5,2
Perancis		5,0
Jerman		4,9
Indonesia		4,7
Cina		4,5
Australia		4,4
India		4,4
Inggris Raya		4,3

Sumber: The Global Economy

Gambar 3-22 Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara Non ASEAN

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Analisis Keberhasilan kinerja didukung kegiatan pengukuran bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia pada periode bulan Agustus s.d Oktober 2024 dan telah selesai dilakukan pengolahan data hasil kereta ukur periode III Tahun 2024. Selain itu pada bulan November 2024 telah dilakukan evaluasi hasil pengukuran TQI periode III Tahun 2024 antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) termasuk melibatkan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja juga didukung dari hasil kegiatan peningkatan jalur KA lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya – Arjawinangun yang telah selesai dan telah dilakukan pengukuran pada periode III Tahun 2024 dengan hasil kategori I dan II sepanjang 18,510 km. Selain itu, kegiatan peningkatan jalur KA lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2024 disampaikan progres diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan jalur KA Kisaran-Mambangmuda, progres 100%;
- b. Peningkatan jalur KA Medan - Belawan Tahap II, tidak terlaksana;
- c. Peningkatan jalur KA Padang – Bukit Putus – Pauhlina, progres 100%;
- d. Peningkatan jalur KA Maos – Cilacap, progres 100%;
- e. Peningkatan jalur KA Solo – Wonogiri, progres 100%.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja program persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II sebagai berikut:

- a. Standar TQI belum ditetapkan pada Tahun 2024, dikarenakan perlu pembahasan lanjutan serta tambahan referensi terkait pengukuran dari operator-operator di Indonesia;
- b. Hasil pengukuran TQI dari Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan belum secara jelas pengelompokan berdasarkan kategori TQI;
- c. Belum tersedianya data hasil pengukuran periode IV Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan kerja dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan koordinasi dengan BUPP/BUPS/operator perkeretaapian dalam pengukuran dan pembahasan hasil TQI termasuk koordinasi internal dengan melibatkan Direktorat teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait hasil pengukuran TQI serta progres kegiatan peningkatan jalur KA/pembangunan jalur ganda KA.

Pencapaian persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas layanan angkutan kereta api dengan penambahan kecepatan operasi kereta api serta pengurangan waktu tempuh.

- b. Peningkatan kapasitas angkutan kereta api dengan penambahan frekuensi perjalanan kereta api atau dapat mengakomodir lebih banyak perjalanan kereta api.
- c. Peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dimana pengoperasian jalur kereta api mayoritas sudah memenuhi kategori aman.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang termasuk dalam rangka pencapaian target RPJMN dan Rencana Strategis diantaranya:

- a. Pembahasan lanjutan terkait penyusunan standar TQI termasuk apabila dibutuhkan pelaksanaan FGD dengan operator perkeretaapian untuk percepatan penyelesaian standar TQI.
- b. Koordinasi dan evaluasi hasil pengukuran TQI periode IV Tahun 2024 termasuk pembahasan hasil pengukuran *Track Geometry* Trolley di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan serta pembahasan jadwal pengukuran TQI Tahun 2025.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:**

Diperlukan penetapan kebijakan terkait standar TQI termasuk pelaksanaan pengukuran dan pelaporan TQI pada prasarana perkeretaapian oleh seluruh BUPP/operator perkeretaapian (PT. KAI, PT. MRT, PT LRT Jakarta, PT. KCIC, PT. CRI dan lainnya).

b. **Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran:**

- 1) Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncaan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 (termasuk kegiatan pendukung peningkatan TQI) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.
- 2) Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan TQI yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

c. ***Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:***

Diusulkan pemenuhan peningkatan kompetensi pegawai untuk pengelolaan/pengukuran TQI guna mendukung rencana pengukuran TQI dengan menggunakan kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 3-31 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir), ditetapkan target nilai IKM Tahun 2024 sebesar 3,70. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,73 dan rincian per unit kerja dan per bulan sebagai berikut:

Tabel 3-32 Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2024

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Dit LLAKA	3,64	3,66	3,73	4,00	3,40	3,67	3,68	3,66	3,54	3,63	3,86	3,80
Dit Prasarana	3,82	3,73	3,83	3,84	3,79	3,97	3,88	3,97	3,87	3,99	4,00	3,84
Dit Sarana	3,85	3,85	3,75	3,68	3,93	3,27	4,00	3,37	3,27	3,98	3,08	3,92
Dit Keselamatan	4,00	-	3,70	3,81	4,00	4,00	4,00	3,46	3,69		3,80	3,79
BPKARS	3,57	3,59	3,54	3,55	3,58	3,58	3,58	3,58	3,57	3,58	3,57	3,64
BPKARS PPTB	3,76	3,55	3,80	3,46	3,91	3,84	3,90	3,86	3,93	3,91	3,92	3,94
Balai Pengujian	3,89	3,85	3,87	3,90	3,82	3,83	3,84	3,85	-	-	3,91	3,82
BPKA Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	3,12	-	3,12	3,30	3,36
Rata-rata per bulan	3,79	3,71	3,75	3,75	3,78	3,74	3,84	3,61	3,65	3,70	3,68	3,76
Rata-rata per Bulan pada Tahun 2024												3,73

Keterangan:

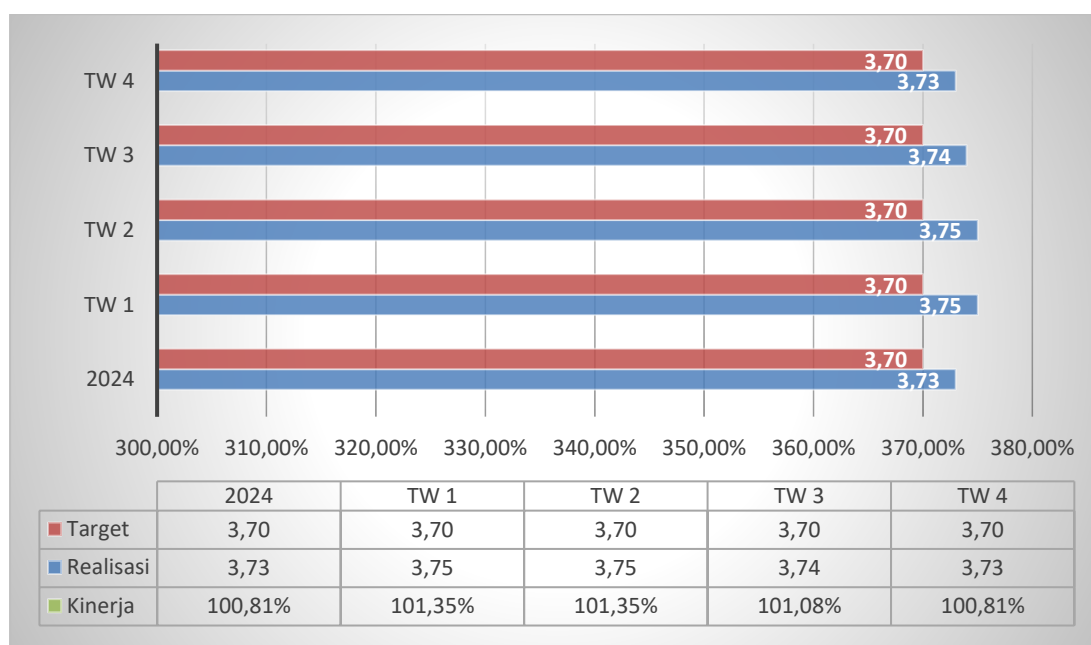
- Pada bulan September-Oktober 2024 tidak ada realisasi Survey Kepuasan untuk Balai Pengujian dikarenakan penggantian QR oleh PPTB namun tidak diinformasikan ke Balai Pengujian.
- Perhitungan nilai IKM Direktorat LLAKA merupakan gabungan antara aplikasi PPTB dan kuesioner manual (google form) untuk mempermudah responden melakukan pengisian.
- Pada Triwulan III-IV 2024 terdapat penambahan perhitungan dari BPKA Sulawesi Selatan.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian Tahun 2024, diperoleh nilai IKM sebesar 3,73. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) sebesar 3,70, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,81%. Pada Tahun 2024, nilai IKM per triwulan cenderung mengalami penurunan dari 3,75 (Triwulan I) menjadi 3,73 (Triwulan IV). Faktor yang mempengaruhi diantaranya adanya penambahan jumlah responden serta perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-33 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,75	3,75	3,74	3,73	101,35	101,35	101,08	100,81	100,81



Gambar 3-23 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dan Target Beberapa Tahun Terakhir

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian merupakan indikator yang mulai diimplementasikan pada Tahun 2023 sesuai arahan dari Kementerian PANRB guna mengakomodir *cascading* Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi. Untuk itu, belum terdapat penetapan target dan perhitungan realisasi nilai IKM pada Tahun 2020 s.d 2022 di Tingkat Eselon I.

Namun mengacu pada data historis pada aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dapat diperoleh gambaran nilai IKM untuk Tahun 2021 sebesar 3,55 dan Tahun 2022 sebesar 3,66 yang

menunjukkan *trend* kenaikan sampai Tahun 2024. Perbandingan realisasi periode 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3-34 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,45	3,70	-	3,55 (tidak ada target, kinerja 100%)	3,66 (tidak ada target, kinerja 100%)	3,69 (Kinerja 107%)	3,73 (Kinerja 101%)



Gambar 3-24 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2024 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Indikator Kinerja Program untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Untuk itu, perbandingan realisasi dengan Target pada Rencana Strategis tidak dapat dilaksanakan.

4. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kinerja di level nasional dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional pada Tahun 2024. Perbandingan nilai IKM tersebut diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-35 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,80
2	Ditjen Perkeretaapian	3,69

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif selama Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan/perbaikan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan/Nasional.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan). Pada Tahun 2024, seluruh unit kerja yang melaksanakan survey IKM sudah menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan sosialisasi yang memadai dari masing-masing unit kerja terkait.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa faktor diantaranya:

- Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.

- c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.

Selain hal di atas, disampaikan pula bahwa BPKA Sulawesi Selatan telah melaksanakan survei IKM sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Survei dan perhitungan nilai IKM tersebut telah dilaksanakan secara mandiri mulai Triwulan III Tahun 2024 serta menjadi komponen penilaian untuk tingkat Eselon I. Untuk itu perlu konsistensi pelaksanaan survei IKM oleh BPKA Sulawesi Selatan secara rutin dengan jumlah responden yang memadai.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan badan usaha/operator perkeretaapian/pemerintah daerah dalam pelaksanaan layanan bidang perkeretaapian termasuk survei IKM yang melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya seperti sektor industri perkeretaapian.

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui *dashboard* terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan:***

Diusulkan *benchmarking* pelaksanaan layanan penyelenggaraan transportasi termasuk pelaksanaan survei IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan, termasuk koordinasi dengan pembina survei IKM (Kementerian PANRB) guna pembinaan/sosialisasi terkait IKM.

b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:***

Antisipasi kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

c. ***Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:***

Diusulkan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan kekuatan secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien.

Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.578 pegawai yang terdiri dari 1.415 PNS dan 163 PPPK yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan pada

11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai sehingga kebutuhan SDM Ditjen Perkeretaapian s.d 2029 sebesar 4.024 pegawai dan diperoleh Efisiensi SDM sebesar 34,47%, dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Rasio SDM} = \frac{1.578}{4.024} = 0.3921$$

$$\text{Rasio Output} = 0,8791 \text{ (diperoleh dari aplikasi SMART kemenkeu)}$$

$$\text{Efisiensi SDM} = (0,3921 \times 0,8791) \times 100\% = \mathbf{34,47\%}$$

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapain juga telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja program telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada Tahun 2024. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-36 Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Mencapai Target Kinerja (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	0,46	100,00%	2.495.893.242.000	1.018.679.412.559	40,81%	1.477.213.829.441	Pada Sasaran Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur, diperoleh realisasi kinerja 100% dan terdapat sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp1.477,2 milyar
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,06	0,06	100,00%	2.766.277.671.000	2.115.182.068.868	76,46%	651.095.602.132	Pada Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal, realisasi kinerja 100% dan terdapat sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp651,1 milyar.
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50%	96,19%	106,20%	4.860.150.516.000	2.142.407.389.190	44,08%	2.717.743.126.810	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan, seluruh indikator kinerja mencapai
Pemenuhan Target Angkutan	%	78,80%	81,65%	103,59%					

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Mencapai Target Kinerja (Rp)	
Penumpang Kereta Api									target dan terdapat sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp2.717,8 milyar.
Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	77,80%	78,73%	107,53%					
Persentase Pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	94,00%	95,02%	101,09%					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,73	100,81%					
Jumlah					10.122.321.429.000	5.276.268.870.617	52,13%	4.846.052.558.383 (47,87%)	Termasuk efisiensi perjalanan dinas

3.4 DUKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BIDANG PERKERETAAPIAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Berikut merupakan dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

3.4.1 PSN STATUS SELESAI PADA TAHUN 2024

DOUBLE TRACK SELATAN JAWA

1. Manfaat:

Meningkatkan kapasitas prasarana perkeretaapian untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan penyelenggaraan angkutan kereta api yang efisien, nyaman dan aman. Selain itu, pembangunan jalur ganda juga dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

2. Progres:

a. Segmen Bogor-Sukabumi

- 1) Progress fisik konstruksi 100% dan peningkatan fasilitas keselamatan termasuk penanganan longsoran dengan progress 100%
- 2) Dalam tahap persiapan pengoperasian (persiapan pelaksanaan pengujian)



Gambar 3-25 Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang

b. Segmen Kiaracondong-Cicalengka

- 1) Progress fisik Tahap I Gedebage-Haurpugur 100% dan Tahap II Haurpugur-Cicalengka 100%.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan persinyalan elektrik di Stasiun Cicalengka (kondisi eksisting) dan pengoperasian jalur baru lintas Haurpugur – Cicalengka telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 dan normalisasi jalur eksisting antara Haurpugur – Cicalengka dan pekerjaan persinyalan termasuk pengoperasian persinyalan (ultimate) di Stasiun Cicalengka telah selesai dilaksanakan pada akhir Desember 2024.
- 3) Telah dilaksanakan *Safety Assesment* dan pengujian untuk jalur, bangunan dan fasilitas operasi.
- 4) Pelaksanaan *Switch Over Jalur Existing* yang telah dinormalisasi serta pengoperasian jalur ganda antara Haurpugur-Cicalengka pada tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 3-26 Peningkatan Stasiun Haurpugur

3.4.2 PSN STATUS ON PROGRES PADA TAHUN 2024

Tabel 3-37 PSN Status On Progres Tahun 2024

No	Kegiatan	Status
1	Infrastruktur KA Logistik di Kalimantan Timur	Progres saat ini telah selesai Pra Studi Kelayakan dan dalam proses pengajuan ijin perkeretaapian khusus kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai PJPK.
2	KA Rantau Prapat – Kota Pinang (Target penyelesaian Tahun 2024 hingga Pondok S5)	a. Segmen Rantau Prapat-Pondok S5 telah selesai 100%, saat ini sedang pemenuhan dokumen menuju pengoperasian KA dan telah dilaksanakan <i>Switch Over</i> fasilitas operasi pada tanggal 30 April 2024. b. Segmen Pondok S5-Kota Pinang berprogres pengadaan tanah melalui LMAN sebesar 93,3% (realisasi 710 bidang dari kebutuhan 762 bidang, luas total 2.369.137 m ²).
3	KA Logistik Lahat-Kertapati	Penandatanganan Perjanjian Konsesi antara DJKA dengan PT. KAI (Persero) telah dilaksanakan dan progress untuk segmen Lahat – Prabumulih – Kertapati sebesar 73%
5	LRT Velodrome-Manggarai	a. <i>Groundbreaking</i> Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B pada tanggal 30 Oktober 2024 dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI bersama Pj Gubernur DKI Jakarta. a. Capaian progress fisik sebesar 40% dan telah dilakukan uji coba lintasan atau <i>test track</i> menggunakan kereta MRC (<i>Maintenance Rail Vehicle</i>) dari fase 1A menuju 1B
6	Jakarta MRT North-South Phase 2	a. Fase 2A: 42,97% (segmen 1 Bundaran HI – Harmoni 68,53%, Segmen 2 Harmoni – Kota 32,20%). b. Fase 2B: - MRT FASE 2B masih dalam tahapan proses <i>Feasibility Study</i> dan akan dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan <i>Basic Engineering Study</i>. - Persetujuan terhadap penetapan trase telah disetujui oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Oktober 2024
7	MRT Jakarta East-West Phase I	a. BAST hasil pekerjaan <i>Engineering Services</i> MRT East West pada tanggal 5 Januari 2024. b. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat. c. Telah dilakukan penandatanganan <i>Minutes of Discussion</i> (MoD) kegiatan Appraisal untuk Loan Konstruksi oleh JICA, Kemenhub, Bappenas, dan Pemprov DKI. d. <i>Dokumen Loan Agreement JICA</i> telah ditandatangani oleh Dirjen PPR Kemenkeu dan Chief Representative JICA Indonesia Office pada tanggal 13 Mei 2024

3.5 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja dibawahnya memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya, diantaranya:

Tabel 3-38 Penghargaan/Capaian Kinerja Lainnya

No	Penghargaan/Capaian Kinerja Lainnya	Dokumentasi
1.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memperoleh Peringkat II pada SAKIP Award Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dari Menteri Perhubungan.	
2.	BTP Jakarta memperoleh Peringkat 3 dari KPPN JAKARTA IV sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Zero Retur Pagu Jumbo	
3.	Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api atas Piagam Penghargaannya sebagai Satuan Kerja Mitra Strategis Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV.	
4.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta atas Piagam Penghargaannya sebagai Satuan Kerja Mitra Strategis Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV	

No	Penghargaan/Capaian Kinerja Lainnya	Dokumentasi
5.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat Pelayanan Prima.	
6.	Direktorat Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api memperoleh <i>Certificate Of Registration ISO 9001:2015, Quality Management System (QMS) "QMS for The Provision of Business & Operation License for Public & Special Railway Operation"</i>	
7.	Direktorat Sarana Perkeretaapian memperoleh <i>Certificate Quality Management Systems</i> dari PT Management Systems Assesment Certification sebagai Penyedia Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian SNI ISO 9001:2015	
8.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan UP/TUP Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV	

No	Penghargaan/Capaian Kinerja Lainnya	Dokumentasi
9.	BTP Semarang memperoleh Penghargaan 10 Besar Badan Publik Informatif Tingkat Kementerian Tahun 2024	
10.	BTP Surabaya memperoleh Penghargaan Instansi Pemerintah dengan kontribusi pembayaran pajak diatas 50 Milyar	

(Secara rinci penghargaan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terlampir)

3.6 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp9.687.720.000.000,- sedangkan untuk posisi s.d akhir Desember 2024 terdapat perubahan menjadi sebesar Rp10.723.868.768.000 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* sebesar Rp200.768.903.000,00 (tidak merubah pagu) pada tanggal 29 Januari 2024;
2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2024) yang dilanjutkan ke Tahun 2024 untuk pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih-Tarahan sebesar Rp11.334.966.387,00 pada tanggal 7 Maret 2024;

3. Revisi anggaran pada tanggal 16 Maret 2024 berupa revisi:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran sebelumnya (Tahun 2024) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan ke Tahun 2024 pada pekerjaan Pembangunan Jalur Kereta Api Medan – Binjai sebesar Rp62.169.940.305,00; dan
 - b. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan kontrak tahun jamak dalam rangka pengembalian peminjaman pagu kegiatan sumber dana SBSN yang dilakukan Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp272.403.123.263,00.
4. Revisi anggaran pada tanggal 2 April 2024 berupa revisi:
 - a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran sebelumnya (Tahun 2024) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan ke Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp879.237.030.366,00;
 - b. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA IP-569 kegiatan *Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* pada satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp33.000.000.000,00.
 - c. Revisi informasi kinerja berupa perubahan nomenklatur Rincian Output (RO) yakni :
 - 1) Semula: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I)
 - 2) Menjadi: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III).
5. Pencantuman Alokasi Anggaran PADA TANGGAL 30 Agustus 2024 untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2024 sebesar Rp47.312.891.209,00;
6. Penambahan pagu dari penggunaan dana PNBPN atas pengelolaan BMN sebesar Rp5.220.150.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2024;
7. Pergeseran anggaran antar eselon I dari Satker Kantor Pusat DJKA ke Biro Umum Setjen Kemenhub sebesar Rp.900.000.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2024;

8. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Ambang Batas sebesar Rp. 3.166.313.000,00 pada tanggal 16 November 2024;
9. Revisi pagu anggaran berubah dalam rangka Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2024 total sebesar Rp28.442.298.481,00.

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 diperoleh sebesar Rp5.828.724.850.876,00 (54,35%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3-39 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	151.000.000.000	188.248.980.000	189.147.790.000	186.188.948.422	98,44%	2.958.841.578	1,56%
2	Belanja Barang	2.935.900.000.000	2.879.810.818.000	2.880.697.829.000	2.394.880.557.984	83,14%	485.817.271.016	16,86%
3	Belanja Modal	6.591.100.000.000	7.655.808.970.000	7.654.023.149.000	3.247.655.344.470	42,43%	4.406.367.804.530	57,57%
Total		9.678.000.000.000	10.723.868.768.000	10.723.868.768.000	5.828.724.850.876	54,35%	4.895.143.917.124	45,65%

Tabel 3-40 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
1.	Program infrastruktur konektivitas	9.114.700.000.000	10.122.945.239.000	10.122.321.429.000	5.276.268.870.617	52,13%
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.150.000.000.000	2.499.880.834.000	2.495.893.242.000	1.018.679.412.559	40,81%
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.180.000.000.000	4.860.150.516.000	4.860.150.516.000	2.142.407.389.190	44,08%
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.730.000.000.000	2.708.923.828.000	2.710.592.510.000	2.069.835.673.736	76,36%
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	54.700.000.000	53.990.061.000	55.685.161.000	45.346.395.132	81,43%
2.	Program Dukungan Manajemen	573.020.000.000	600.923.529.000	601.547.339.000	552.455.980.259	91,84%
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	9.720.000.000	9.721.391.000	9.721.391.000	8.299.826.545	85,38%

No	Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	521.000.000.000	557.104.471.000	557.728.281.000	515.734.951.991	92,47%
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	21.800.000.000	16.426.314.000	16.426.314.000	14.256.196.884	86,79%
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	17.900.000.000	15.075.934.000	15.075.934.000	12.591.756.900	83,52%
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.600.000.000	2.595.419.000	2.595.419.000	1.573.247.939	60,62%
	Total	9.687.720.000.000	10.723.868.768.000	10.723.868.768.000	5.828.724.850.876	54,35%

Tabel 3-41 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	2.150.000.000.000	2.499.880.834.000	2.495.893.242.000	1.017.922.348.570	40,78
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	2.784.700.000.000	2.762.913.889.000	2.710.592.510.000	2.067.322.661.652	76,27

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)			Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	4.180.000.000.000	4.860.150.516.000	4.860.150.516.000	2.142.407.389.190	44,08

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

Selain itu , disampaikan pula realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.167.640.051.880,00 atau 92,57% dari target Tahun 2024 sebesar Rp1.261.333.553.000,00 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Rincian realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-42 Realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.114.870.492.000	910.983.233.017	81,71%
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	9.672.420.000	1.140.225.000	11,79%
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.754.500.000	3.697.635.000	134,24%
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.101.061.822.000	902.208.197.017	81,94%
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.381.750.000	3.937.176.000	284,94%
2	Pendapatan BLU	85.268.317.000	90.756.273.178	106,44%
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	74.076.731.000	87.194.428.542	117,71%
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.191.586.000	1.492.165.100	13,33%
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	966.896.536	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	1.102.783.000	-
3	Pendapatan Non Fungsional	61.194.744.000	165.900.545.685	271,10%
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.429.268.556	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	200.000.000	-	0,00%
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	58.699.354.000	88.154.219.993	150,18%
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	28.429.615.470	1.238,55%
	e. Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.314.307.007	-
	f. Pendapatan Bunga Lainnya	-	-	-
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	5.260.143.236	-
	h. Pendapatan Denda Lainnya	-	18.802.560	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.373.454	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10.525.564.918	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	28.250.006.483	-
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	m. Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-
	n. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	429.244.008	-
	Jumlah	1.261.333.553.000	1.167.640.051.880	92,57

BAB 4 PENUTUP

4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2024) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	- Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengujian prasarana perkeretaapian lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu untuk selanjutnya dukungan pengoperasian jalur kereta api tersebut dengan berkoordinasi dengan operator/PT. KAI; - Monitoring dan evaluasi reaktivasi jalur KA lintas Sawahlunto – Muaralaban dengan melibatkan PMU; - Percepatan penyelesaian ketentuan teknis penyelenggaraan trem otonom termasuk koordinasi lanjut hasil <i>Proof Of Concept (PoC)</i> yang telah dilaksanakan guna mendukung persiapan <i>showcase</i> trem otonom di wilayah IKN. - Percepatan penyelesaian penyiapan lahan pada kegiatan pendukung konektivitas (diantaranya Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Pondok S5 -Kota Pinang).	- Tindak lanjut hasil pengujian prasarana lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah dilakukan perbaikan dan telah bersurat kepada Balai Pengujian pada tanggal 27 Desember 2024 untuk permohonan pengujian kembali terhadap hasil tindak lanjut yang telah diselesaikan. - Monitoring dan evaluasi pembangunan pada reaktivasi jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban oleh PT. KAI telah dilaksanakan bersama BTP Padang, Direktorat Prasarana dan melibatkan PMU pada 29 Oktober - 1 November 2024. - Regulasi teknis penyelenggaraan trem otonom masih berproses penyusunan oleh Direktorat teknis melibatkan Setditjen/Bagian Hukum. Sedangkan terkait hasil PoC disampaikan rekomendasi dari Otorita IKN bahwa operasional secara <i>autonomous</i> Trem Otonom belum dapat dioperasikan di IKN dalam waktu dekat karena ada beberapa hal secara teknis yang perlu di lengkapi dan disesuaikan oleh badan usaha. Untuk itu, pada Tahun 2025 perlu diprogramkan pelaksanaan kajian FS agar bisa diimplementasikan di wilayah lain. - Progres pengadaan lahan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sebesar 90% atau 479 yang telah terbayarkan dari

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		total keseluruhan bidang sebanyak 532 bidang dan progress untuk lintas Pondok S5-Kota Pinang (progres 93,3% telah terbayar 710 dari 762 bidang) melalui LMAN. Total 52 bidang yang belum dibayarkan: ○ 8 bidang, rencana pengajuan pembayaran LMAN; ○ 30 bidang, revisi peta bidang dan daftar nominatif oleh BPN; ○ 1 bidang tanah instansi; ○ 13 bidang masih dilakukan pendekatan persuasif untuk bidang/warga yang belum setuju.
IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	▪ Percepatan penyelenggaraan IMO dengan pelaksanaan kontrak antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan PT. KAI; ▪ Lanjutan/penyelesaian modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik (Stasiun Cicalengka, Stasiun Kalioso). ▪ Penyelesaian audit SMKPT terhadap Badan Usaha Perkeretaapian. ▪ Pelaksanaan kegiatan inspeksi dan <i>rampcheck</i> oleh Inspektur Perkeretaapian sesuai kompetensi untuk memastikan kehandalan sarana dan prasarana perkeretaapian pada penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ▪ Penyelesaian kegiatan pengadaan kereta penolong, crane dan modifikasi gerbong datar pada Tahun 2024 untuk wilayah BTP Sumatera Bagian Selatan guna mendukung penanganan kecelakaan dan evakuasi guna jalur kereta api dapat segera dilalui.	▪ Kontrak IMO antara PT. KAI dengan Kepala Balai sesuai dengan wilayah kerja telah dilaksanakan dan telah dilakukan verifikasi untuk pembayaran IMO. ▪ Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk Stasiun Cicalengka dan Stasiun Kalioso telah selesai 100% dan telah dilaksanakan pengoperasian: ○ Stasiun Cicalengka telah dilaksanakan <i>Switch Over Staging</i> I Prasarana Stasiun Haurpuger – Stasiun Cicalengka pada 21 s.d 23 Agustus 2024, <i>Switch Over</i> Prasarana Stasiun Kiaracondong - Stasiun Gedebage pada 14 s.d. 15 Oktober 2024 dan <i>Switch Over</i> Prasarana pada Stasiun Haurpuger - Stasiun Cicalengka tanggal 30 s.d. 31 Desember 2024. ○ Stasiun Kalioso sudah dilakukan <i>Switch Over</i> pada tanggal 30 Oktober 2024 ▪ Pada Tahun 2024 telah diselesaikan audit SMKPT diantaranya pada PT.KAI (tahap transisi) ▪ Inspeksi dan <i>rampcheck</i> sarana telah dilaksanakan pada 11 November s.d 13 Desember 2024 guna mendukung angkutan Natal dan Tahun Baru (wilayah kerja PT. KAI, LRT Jabodebek, PT. MRT, PT. KCI dan LRT Jakpro) dan juga telah dilaksanakan inspeksi keselamatan di

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		wilayah Jawa dan Sumatera (DAOP dan DIVRE). ▪ Progres kegiatan pengadaan/modifikasi Sarana Milik Negara Tahun 2024 sebagai berikut : ○ Pengadaan kereta penolong tidak terlaksana di tahun 2024 (penghematan anggaran); ○ Pengadaan <i>crane</i> progress sebesar 97,06% (kendala keterlambatan pengiriman) dan diperkirakan selesai pada 11 Maret 2025; ○ Modifikasi gerbong datar telah selesai 100%.
IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	▪ Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan jalur kereta api (Kisaran - Mambangmuda, Padang – Bukit Putus – Pauhlma, Kertasemaya – Arjawinangun, Maos – Cilacap, Solo – Wonogiri, Jember – Kalisat) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api; ▪ Lanjutan/penyelesaian kegiatan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA <i>elevated</i> Medan – Binjai, Kiaracandong – Cicalengka, Solo Balapan-Kalioso) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. ▪ Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025; ▪ Penanganan perlintasan sebidang dengan penutupan perlintasan/pembangunan <i>flyover/underpass</i> guna meminimalisir potensi gangguan operasional dan kecelakaan pada perlintasan sebidang yang dapat menyebabkan keterlambatan operasional kereta api; ▪ Evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA serta koordinasi lanjut terkait rencana perubahan GAPEKA dengan memperhatikan masukan dari badan usaha/operator perkeretaapian, kebutuhan angkutan	▪ Kegiatan peningkatan jalur KA Tahun 2024 dengan progres: ○ Peningkatan Jalur KA Kisaran-Mambangmuda 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Medan - Belawan Tahap II, tidak terlaksana; ○ Peningkatan Jalur KA Padang – Bukit Putus – Pauhlma 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Kertasemaya – Arjawinangun 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Cikampek – Cirebon progres 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Maos – Cilacap progres 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Solo – Wonogiri progres 100%; ○ Peningkatan Jalur KA Jember – Kalisat progres 55% (MYC s.d 2025) ▪ Kegiatan pembangunan jalur ganda KA Tahun 2024 dengan progress: ○ <i>Double Track</i> Selatan Jawa Segmen Bogor – Sukabumi progres 100%; ○ Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 2 progres 100%; ○ Pembangunan Jalur Ganda KA Solo - Semarang Fase I progres 85% (MYC s.d 2025); ○ Pembangunan Jalur Ganda KA <i>elevated</i> Medan – Binjai 65% (MYC s.d 2025).

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kereta api, ketersediaan sarana dan kondisi prasarana perkeretaapian.	▪ Posko penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah dilaksanakan baik di kantgor pusat dan di daerah dengan koordinasi <i>stakeholder</i>. ▪ Penanganan perlintasan sebidang dengan penutupan perlintasan telah dilaksanakan oleh PT. KAI pada beberapa Lokasi, sedangkan untuk pembangunan <i>flyover/underpass</i> masih berproses diantaranya di wilayah Bandung. ▪ Evaluasi GAPEKA di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, dan Sumatera Bagian Selatan telah dilaksanakan pada 16 Desember 2024. Terhadap rencana penyesuaian program perjalanan kereta api pada jaringan jalur KA nasional, telah dilakukan penetapan GAPEKA baru Tahun 2025 pada akhir Desember 2024 melalui Kepdirjen Perkeretaapian.
IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	▪ Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru Tahun 2025, termasuk pelaksanaan <i>rampcheck</i> standar pelayanan minimum. ▪ Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Rangkasbitung, Tanah Abang, Klaten). ▪ Koordinasi dengan badan usaha/operator untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan KA Perintis, diantaranya KA perintis Cut Meutia yang pada September 2024 tidak beroperasi dikarenakan perawatan sarana KA termasuk rencana perpanjangan sampai Stasiun Muara Satu.	▪ Posko penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah dilaksanakan baik di kantgor pusat dan di daerah dengan koordinasi <i>stakeholder</i>. Adapun untuk inspeksi dan <i>Rampcheck</i> SPM, keselamatan dan Sarana telah dilaksanakan pada periode Oktober – Desember 2024. ▪ Peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang dengan progress sebagai berikut ○ Stasiun Rangkasbitung progress 44%; ○ Stasiun Tanah Abang progress 76%; ○ Stasiun Klaten sebesar progress 100% ▪ Sarana KRD Cut Mutia telah memenuhi kelaikan dan siap operasi dengan telah lulus uji dan memperoleh sertifikat uji berkala pada 16 Desember 2024 serta telah beroperasi kembali pada 24

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Desember 2024, sedangkan untuk perpanjangan sampai Stasiun Muara Satu direncanakan pada Triwulan I 2025.
IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	- Monitoring penyelesaian peningkatan prasarana Lahat –Kertapati oleh PT. KAI yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berperan besar dalam mendukung kinerja KA barang. - Persiapan penyelenggaraan angkutan Motor Gratis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. - Peningkatan pengawasan penyelenggaraan angkutan KA barang (domestik dan ekspor) dengan integrasi sistem beberapa pihak terkait (badan usaha/operator perkeretaapian, bea cukai, operator pelabuhan, dan lainnya) dengan HUBNET Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelesaian Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekonomi Logistik Nasional.	- Peningkatan prasarana Lahat – Kertapati oleh PT. KAI, telah berprogress sebesar 73%; - Penyelenggaraan angkutan motor gratis telah dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan masa pendaftaran dari 1 s.d 28 Desember 2024 dan pelaksanaan pada 20 s.d 29 Desember 2024 dengan kuota untuk 2.320 motor dan 5.300 penumpang; - Integrasi sistem beberapa pihak terkait (badan usaha/operator perkeretaapian, bea cukai, operator pelabuhan, dan lainnya) dengan HUBNET Kementerian Perhubungan telah berproses khususnya untuk layanan angkutan dari Gedebage ke Tanjung Priok.
IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	- Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan jalur kereta api (Kisaran-Mambangmuda, Padang – Bukit Putus – Pauhlma, Kertasemaya – Arjawinangun, Maos – Cilacap, Solo – Wonogiri, Jember – Kalisat) dan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA <i>elevated</i> Medan – Binjai, Kiaracandong – Cicalengka, Solo Balapan-Kalioso) untuk mendukung peningkatan nilai TQI Kategori I dan II; - Koordinasi dengan PT. KAI untuk penyelesaian kegiatan pengukuran jalur kereta api periode III Tahun 2024 khususnya di wilayah Sumatera; - Berkoordinasi dengan PT <i>Celebes Railway</i> Indonesia (PT CRI) terkait kebutuhan hasil pengukuran kualitas jalur kereta api wilayah Sulawesi (Makassar – Parepare) termasuk dengan operator perkeretaapian lainnya; - Penyelesaian kebijakan/standar TQI yang jelas dan terukur serta sesuai	- Kegiatan peningkatan jalur KA Tahun 2024 dengan progres: - Peningkatan Jalur KA Kisaran-Mambangmuda 100%; - Peningkatan Jalur KA Medan - Belawan Tahap II, tidak terlaksana; - Peningkatan Jalur KA Padang – Bukit Putus – Pauhlma 100%; - Peningkatan Jalur KA Kertasemaya – Arjawinangun 100%; - Peningkatan Jalur KA Cikampek – Cirebon progres 100%; - Peningkatan Jalur KA Maos – Cilacap progres 100%; - Peningkatan Jalur KA Solo – Wonogiri progres 100%; - Peningkatan Jalur KA Jember – Kalisat progres 55% (MYC s.d 2025) - Kegiatan pembangunan jalur ganda KA Tahun 2024 dengan progress:

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dengan standar internasional untuk selanjutnya dijadikan acuan oleh operator perkeretaapian di Indonesia. ▪ Beberapa kegiatan pendukung pembangunan jalur ganda KA dan peningkatan jalur KA yang diprediksi tidak dapat selesai pada Tahun 2024 membutuhkan perubahan skema penganggaran (SYC menjadi MYC/perpanjangan MYC) dengan penyesuaian sampai Tahun 2025.	○ <i>Double Track</i> Selatan Jawa Segmen Bogor – Sukabumi progres 100% ○ Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 progres 100% ○ Pembangunan Jalur Ganda KA Solo - Semarang Fase I progres 85% (MYC s.d 2025) ○ Pembangunan Jalur Ganda KA elevated Medan – Binjai 65% (MYC s.d 2025) ▪ Telah dilaksanakan pengukuran dan pembahasan jalur KA menggunakan kereta ukur periode III Tahun 2024 serta telah dilakukan tindak lanjut berupa: ○ Evaluasi hasil pengukuran jalan rel dengan KA Ukur periode III pada 30 Oktober – 1 November 2024 di Kantor Pusat PT. KAI. ○ Pembahasan spesifikasi KA Ukur. ▪ Pada 30 Oktober 2024 telah bersurat ke PT. CRI dan sudah menerima surat laporan hasil pengukuran TQI dari PT CRI pada tanggal 30 Desember 2024 untuk dilakukan pembahasan. ▪ Telah dilakukan kajian pada tahun 2024, namun masih memerlukan pembahasan penyusunan dan referensi dari berbagai operator perkeretaapian. ▪ Kegiatan pendukung pembangunan jalur ganda KA/peningkatan jalur KA yang diusulkan dan disetujui SYC menjadi MYC/perpanjangan MYC dengan penyesuaian sampai Tahun 2025 sebagai berikut : ○ Peningkatan Jalur KA Lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember – Kalisat; ○ Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro; ○ Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai;

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		- o Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan – Kalioso; - o Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II.
IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	▪ Melakukan peninjauan SOP makro/mikro, khususnya untuk meningkatkan efisiensi serta penyederhanaan layanan perizinan, pengujian, dan sertifikasi bidang perkeretaapian sesuai ketentuan. ▪ Meningkatkan kanal komunikasi dengan pengguna layanan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan dan menerima informasi terkini terkait layanan termasuk pelaksanaan survei IKM. ▪ Meningkatkan komunikasi dengan PPTB Setjen Kemenhub untuk mendapatkan informasi terbaru guna meminimalisir kesalahan terkait pelaksanaan survey IKM.	▪ Saat ini konsep SOP makro/nikro telah selesai disusun dan sedang tahap pengesahan. ▪ Ditjen Perkeretaapian secara periodik telah melakukan publikasi melalui postingan media sosial (instagram/ twitter/ facebook) sebanyak 645 konten pada Tahun 2024. ▪ Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan PPTB terkait pelaksanaan survei IKM telah dilaksanakan pada Januari 2025.

Selain itu juga disampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong penerapan budaya kinerja organisasi diantaranya:

1. Penggunaan absensi *fingerprint* di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penggunaan aplikasi *survey 3AS Case Survey Management System* untuk survei IKM;
3. Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan yang disampaikan kepada *stakeholder* terkait;
4. Penggunaan aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyusunan SKP dan pelaporan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

6. Penggunaan fitur pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk proses pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Penggunaan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk penerapan manajemen risiko mencakup penetapan konteks, penilaian risiko dan pemantauan rencana tindak pengendalian di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Penggunaan *google form* yang disematkan pada Portal Layanan dan Data Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pelaksanaan survei kepuasan layanan perkantoran.

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 disusun sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 diperoleh sebesar 102,75% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 4-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	0,46	100,00%
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,06	0,06	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	90,50%	96,19%	106,29%
		IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80%	81,65%	103,62%
		IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80%	78,73%	101,20%
		IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94,00%	95,02%	101,09%
		IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,73	100,81%
Rata-rata Capaian Kinerja						102,75%

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2024, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya, Untuk itu, direkomendasikan beberapa hal berdasarkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

- a. Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang).

- b. Monitoring penyelesaian *readiness criteria* kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.
- c. Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).
- d. Percepatan penyelesaian regulasi teknis terkait trem otonom.
- e. Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.

2. IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*):

- a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/rampcheck guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.
- b. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.
- c. Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI.
- d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.

3. IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

- a. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambringan, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.

- b. Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalioso, Medan – Binjai/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.
- d. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.
- e. Penetapan dan pengawasan intensif terhadap implementasi GAPEKA Tahun 2025 agar perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.

4. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api:

- a. Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Muara Satu, Rantauprapat – Pondok S5, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai.
- b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran.
- c. Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang).
- d. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara *realtime* serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan.
- e. Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

5. IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api:

- a. Pengoptimalan pemanfaatan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Pelaksanaan konsultasi publik penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda kereta api pada Tahun 2025 guna mendukung peningkatan *modal share* angkutan barang.
- c. Pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing *stakeholder* agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.
- d. Penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator perkeretaapian untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (*rolling highway*).

6. IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI:

- a. Pembahasan lanjutan terkait penyusunan standar TQI termasuk apabila dibutuhkan pelaksanaan FGD dengan operator perkeretaapian untuk percepatan penyelesaian standar TQI.
- b. Koordinasi dan evaluasi hasil pengukuran TQI periode IV Tahun 2024 termasuk pembahasan hasil pengukuran *Track Geometry Trolley* di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan serta pembahasan jadwal pengukuran TQI Tahun 2025.
- c. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 (termasuk kegiatan pendukung peningkatan TQI) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.

7. IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian:

- a. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu

terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).

- c. Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



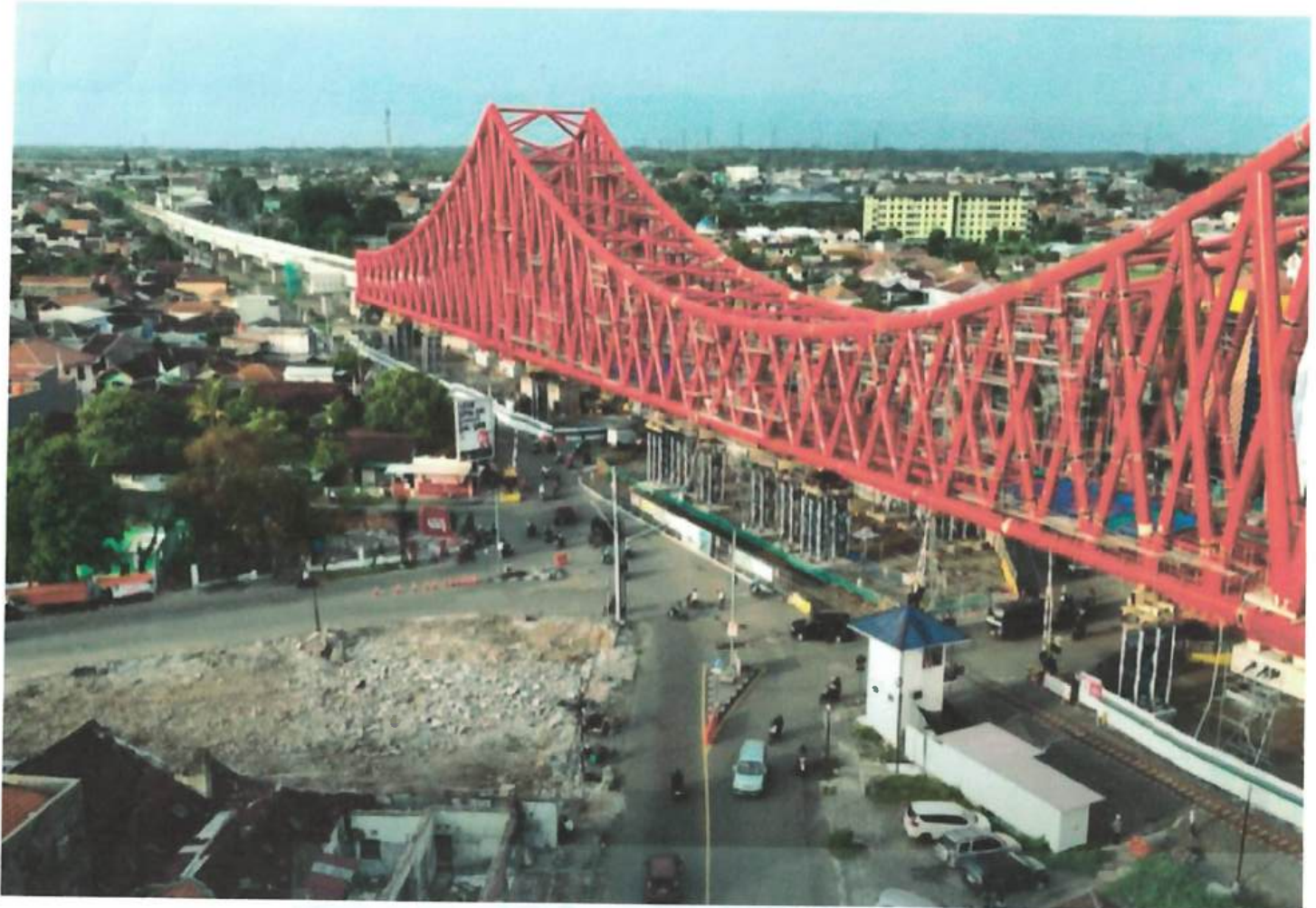
LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL

PERKERETAAPIAN

Lampiran 1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2024

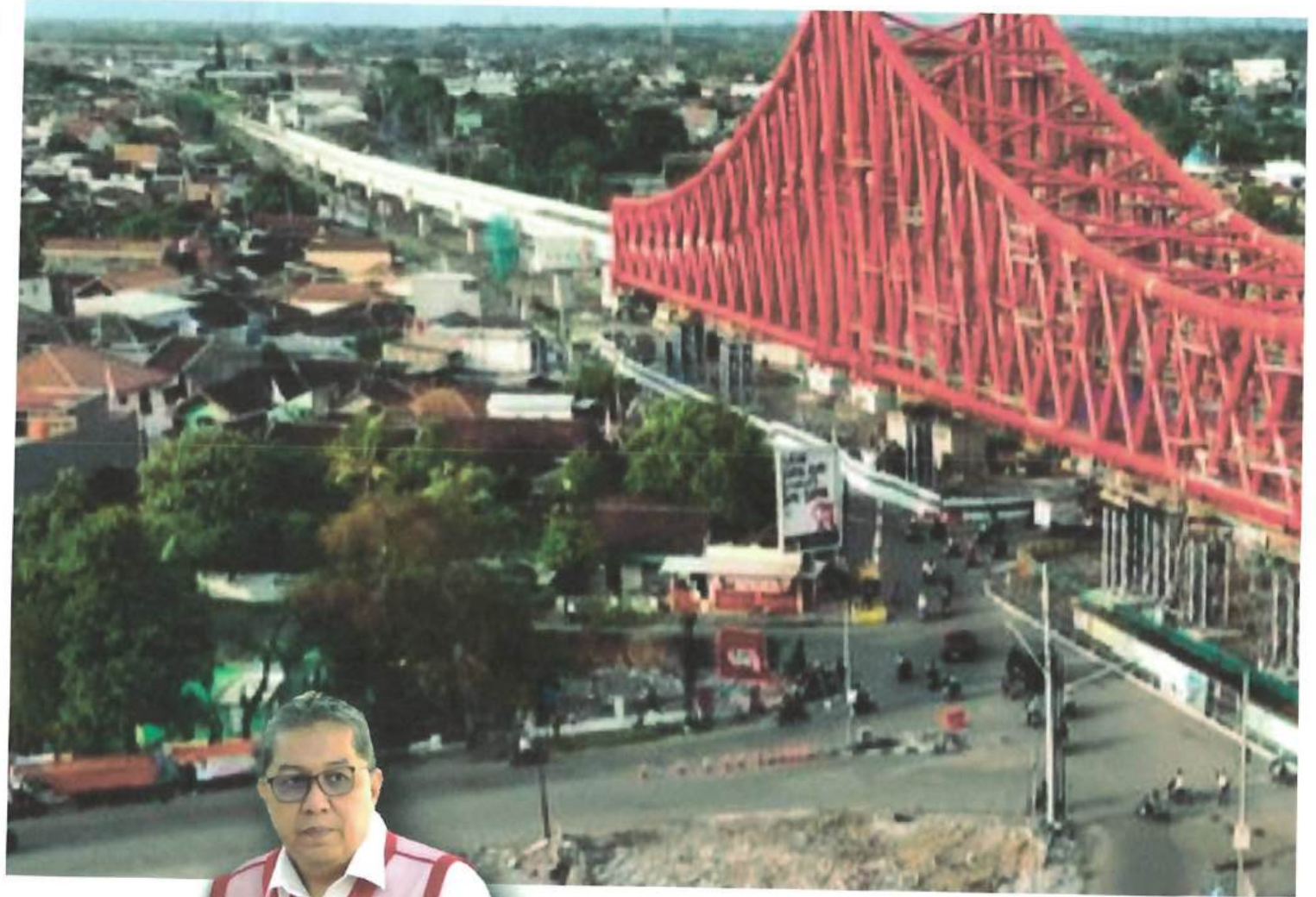


REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 disusun sebagai Rencana Kinerja tahun keempat dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.



Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 yang telah direviu ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Februari 2024

↓ **DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN** ↓


Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., MM., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 LATAR BELAKANG	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	3
BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	11
2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN	11
2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	12
2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	13
2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024	15
2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024	15
2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024	16
2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024	17
BAB III EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019	19
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN	19
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT	20
3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	33
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2024	36
4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	36
4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	37
4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024	38
4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	39
4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	44
4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	46
4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	49

4.3.5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	51
4.3.6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	52
4.3.7	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	54
4.3.8	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	55
4.3.9	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	55
4.4	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024	56
BAB V PENUTUP		60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	17
Tabel 3.1	Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019	20
Tabel 3.2	Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019.....	21
Tabel 3.3	Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun Tahun 2015-2019.....	23
Tabel 3.4	Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019.....	25
Tabel 3.5	Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2019	28
Tabel 3.6	Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019.....	30
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019	34
Tabel 4.1	Target Rincian Output (RO) Pelayanan Transportasi Perkeretaapian 2024	39
Tabel 4.2	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Keselamatan, Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	44
Tabel 4.3	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	47
Tabel 4.4	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	50
Tabel 4.5	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	52
Tabel 4.6	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	52
Tabel 4.7	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	54
Tabel 4.8	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024	55
Tabel 4.9	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024.....	55
Tabel 4.10	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2024	56
Tabel 4.11	Reviu Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3
Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019.....	19



B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 terdiri dari peraturan perundangan berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020–2024;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 10 TAHUN 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur

Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api,

- perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kerta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
- c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kerta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkertaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan superivisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk balai-balai yang merupakan sebagai pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.63 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.64 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.65 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.119 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1) Balai Teknik Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;

- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
- h. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2) Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpenggerak dan tanpa penggerak;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
- d. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

3) Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik Negara;
- c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik Negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat;
- e. Balai Perawatan Perkeretaapian dapat juga melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

4) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan;
- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi, Penyusunan grafik perjalanan kereta api, dan kemitraan;
- d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan pemanfaatan aset;
- f. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api;
- g. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



B A B 2

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Dasar Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan visi dan misi Presiden yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur. Visi Presiden lima tahun ke depan Indonesia Periode Tahun 2020 - 2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Presiden dalam Pembangunan Nasional Indonesia Periode Tahun 2020 -2024 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuh agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung 2 dari 7 agenda pembangunan dimaksud melalui strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda pembangunan. Dukungan pada 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan I

(Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 1 - RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam dan Kawasan Industri luar Jawa. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: 1) Pembangunan kereta api barang di Kalimantan; 2) Peningkatan jalur kereta api Sumatera Selatan.
- b. Meningkatkan daya saing destinasi dan industrialisasi pariwisata. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: Pembangunan jalur ganda, peningkatan dan reaktivasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) Pembangunan jalur kereta api Mengwitani – Singaraja; 3) Pembangunan jalur kereta api Pematang Siantar – Danau Toba.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud adalah: 1) Pembangunan jalur ganda kereta api Rangkas Bitung – Merak; 2) Reaktivasi jalur kereta api Banten.

Agenda Pembangunan V

(Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan V - RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan strategi meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. Memperkuat Infrastruktur Ekonomi dengan strategi meningkatkan konektivitas perkeretaapian. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya:
 - i. Pembangunan Jalur KA (termasuk reaktivasi dan jalur ganda);
 - ii. Peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jalur KA;
 - iii. Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara;
 - iv. Penyediaan PSO dan Subsidi.

- c. Memperkuat Infrastruktur Perkotaan dengan strategi mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 Kota metropolitan

A. MENINGKATNYA NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL DAN INDUSTRIALISASI

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi, 9 KI (kumulatif) dan percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas, 10 destinasi (kumulatif).

B. MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur layanan dasar yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi melalui menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi dari 0,23 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.

C. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah terbangunnya jaringan KA (kumulatif) sepanjang 7.451 km'sp dan kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 sebesar 94%.

D. MENINGKATNYA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DI 6 (ENAM) KOTA METROPOLITAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui peningkatan layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan yang berkaitan langsung dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sejumlah 6 (enam) kota dan jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang sejumlah 6 (enam) kota.

2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan

di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan /transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan, maka sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional; Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Untuk mewujudkan tujuan:

- a) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca;
- b) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- c) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.
3. Sasaran program yang ingin dicapai dalam peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal.

2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua (2) program dan sembilan (9) kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Strategi pembangunan di bidang perkeretaapian tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024

NO	SASARAN	STRATEGI
1.	Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian dengan Aksesibilitas yang Tinggi	a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan; b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi; c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal	a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting; b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian; c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis.
3.	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal	a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian; b) Sertifikasi sarana perkeretaapian; c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian; d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO); f) Pemenuhan kebutuhan IMO; g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana; h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan; i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2020-2024

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2020-2024. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran program maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan arahan dalam RPJMN 2020- 2024. Ada 5 (lima) indikator kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung tiga sasaran pembangunan nasional dalam Agenda Pembangunan 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan dasar), yaitu:

1. Sasaran meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan.
2. Sasaran meningkatnya konektivitas wilayah dengan indikator Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) dan Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2.
3. Sasaran meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan dengan indikator Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dan Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020- 2024 serta reviu terhadap target tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASELINE TAHUN 2019	2020	2021	2022	2023	TARGET RENSTRA 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian dengan Aksesibilitas Tinggi							
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP 1 Rasio konektivitas antar wilayah	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36

NO	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASELINE TAHUN 2019	2020	2021	2022	2023	TARGET RENSTRA 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal							
	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan SDM, Sarana dan Prasarana yang handal	IKP 6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	0,15	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
3.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal							
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP 2 Persentase <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	81,31	74	76	78	80	82
		IKP 3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	-	10	21	47	73	100
		IKP 4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	-	11	27	46	68	100
		IKP 5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQII dan II	81,50	83	85	87	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

*Penyesuaian Target 2024 berdasarkan pembahasan PK dan Renaksi Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

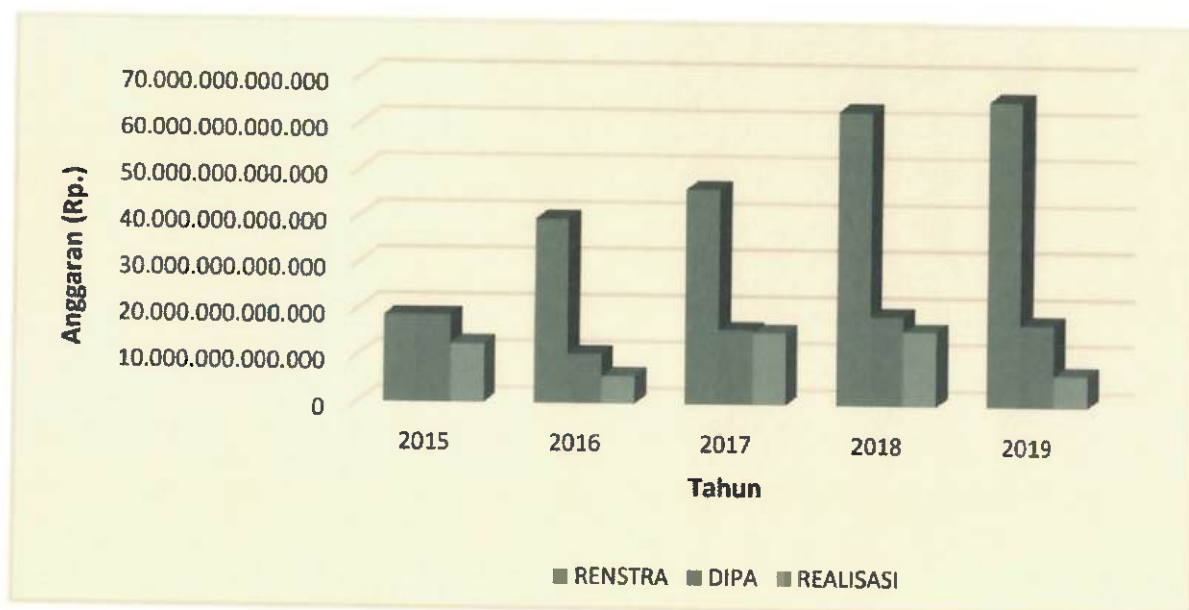


BAB 3

EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. Gap pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.



Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

Secara rinci per kegiatan/ unit kerja Eselon I dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

Tahun	RPJMN	Reviu Renstra	DIPA	Realisasi
2015	18.697.955.926.000	12.583.388.000	18.697.955.926.000	12.563.760.933.460
2016	39.558.846.384.000	11.690.413.000	10.407.315.735.000	5.801.339.893.298
2017	46.200.813.641.000	23.526.744.000	16.022.981.642.000	15.487.396.107.877
2018	63.253.294.900.000	32.810.329.000	19.188.457.243.000	15.949.445.231.083
2019	65.641.932.209.000	46.262.372.000	17.648.465.659.000	6.836.010.427.155
Total	233.352.843.060.000	126.873.247.000	81.965.176.205.000	56.637.952.592.873

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Sehubungan dengan pembiayaan/pendanaan pada APBN Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2015-2017 hanya mencapai 43% dari kebutuhan berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian output juga sebagian besar tidak dapat tercapai sesuai target. Berdasarkan target output dalam Renstra tahun 2015-2019, dapat diperoleh pencapaian sampai dengan tahun 2019 masing-masing kegiatan/output sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

Tabel 3.2 Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	Dokumen/ Laporan	2	1	2	1	24	23,44	6	2	13	12,67
Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Sertifikat			24	3	11.050	7.728,20	78	58	14.000	16.303
Sarana Perkeretaapian	Unit	37	49	11	2	6	6	31	8	2	2
Fasilitas/ Peralatan Sarana Perkeretaapian	Unit			4	2	114	1	11	9	8	10
Perawatan Sarana Perkeretaapian	Tahun			1	1						
Pengadaan Sarana Perkeretaapian	Unit	6	2	3	1						
Pengadaan Fasilitas Pengujian Sarana Perkeretaapian	Unit			4	6						
Sertifikat Uji Sarana Perkeretaapian	Sertifikat			4.000	3.300						
Studi/ Kebijakan/ Kajian/ Kebijakan/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur/ Masterplan/ STD Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Perkeretaapian	Dokumen	11	8	3	3						
Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi	Laporan			24	48,29						

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT	Tahun	4	6	1	1						
Layanan Perkantoran	Bulan Layanan			12	12						
Kendaraan Bermotor	Unit			2	2						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit			8	8						
Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1			7	7	1	1		
Layanan Perkantoran	Tahun					24	21,64	1	1		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan									1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1	1
Layanan Perkantoran	Layanan									1	1

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

B. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tabel 3.3 Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Bimbingan dan Koordinasi Teknis	Laporan	4	4	13	13	2	2	7	2		
Monitoring dan Evaluasi	Laporan			28	56	2	0	3	0		
Subsidi Angkutan Kereta Api	Kegiatan	3	3	7	36						
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Laporan			5	4						
Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Kriteria/ Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Dokumen	31	32	28	26						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			2	2						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT	Tahun			1	1						
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12	12	12	12	1	1	1	1
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit			2	2						
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1	1

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Laporan					41,00	38,42	12	12	18,00	12,67
Trase Jaringan Kereta Api	Laporan					11	7	6	6	1,00	1,00
Angkutan Kereta Api	Kegiatan					6	6	2	2	2,00	2,00
Grafik Perjalanan Kereta Api	Laporan					1	1	1	1	1,00	1,00
Layanan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Layanan					9	9	2	2	2,00	2,00
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					1	1	1	1		
Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)	Kegiatan							8	8	7,00	7,00
Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Laporan							10	8	8,00	8,00
Trase Jaringan Kereta Api (Prioritas Nasional)	Laporan							3	3	1,00	1,00

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

C. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Tabel 3.4 Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jalan Rel	Km'sp	357,79	512,9	1.900,5	232,09						
Jembatan/ Terowongan/ Gorong-gorong/ Box Culvert/ Underpass/ Flyover	Km'sp	110,0	192,0	42,0	125,35						
Stasiun/ Bangunan Operasional	Unit	21	7	6	6						
Pemagaran Fasilitas Pendukung	Paket	5	36	457	457						
Persinyalan	Paket	22	11	8	48,16						
Transmisi Tenaga Listrik (LAA)	Km'sp	51,25	88	10	0						
Catu Daya (Sub Station)	Unit	1	0	1	1						
Pengamanan Perlintasan Sebidang	Paket	34	0	3	2						
Bangunan Khusus	Unit	1	0	5	1						
Pengadaan Tanah	Paket	34	8	817.179	699.877						
Pengadaan Peralatan/ Fasilitas Prasarana Perkeretaapian	Paket	37	4	24	49,43						

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Studi/ Kajian/ DED/ STD/ Amdal/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Bidang Prasarana Kereta Api	Dokumen	84	81	86	175,24						
Pengujian Prasarana Kereta Api	Unit			2	23,64						
Monitoring dan Evaluasi	Laporan			22,00	75,64						
Bimbingan dan Koordinasi Teknis	Laporan	4	8	6,00	19,42						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			1,00	0,00						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait Operasional Satker/ UPT	Laporan			9,00	46,93						
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Tahun			1,00	0,51						
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12,00	32,90	24	24	1	1	1,00	0,72
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			3,00	52,77						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			6,00	58,38						
Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Laporan					32	23	15	19	16	11,76
Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat					400	245	12	12	400	377,00

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Prasarana Perkeretaapian	Km'sp					759,70	722,68	23,90	15,79	12,50	12,43
Fasilitas Pendukung Prasarana Perkeretaapian	Paket					26	13,82	3	2	2	2,00
Operasi Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Paket					1.500	1.383,60	1	1	1	0,71
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					11	8,45	2	2		
Prasarana Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Km'sp							659,40	436,85	43.413,65	28.107,61
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan									1,00	0,75
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1,00	0,68

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

D. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

Tabel 3.5 Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Sosialisasi/ Rakor/ Seminar/ Workshop Keselamatan Perkeretaapian	Kegiatan	3	3	5	4						
Pengadaan Peralatan Keselamatan Perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian	Paket	18	18	2	2						
Pemeriksaan di Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Kegiatan			11	9						
Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi	Laporan			20	33						
Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian	Kegiatan	6	6	10	9						
Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM serta Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian	Laporan			2	2						
Penegakan Hukum Pidana Keselamatan Perkeretaapian	Laporan			8	7						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			1	1						
Studi/ Kebijakan/ Kajian/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Prosedur/ Masterplan/ STD Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	7	7	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait Operasional Satker/ UPT	Laporan			1	1						
Layanan Perkantoran	Tahun	1	1	12	12	24,00	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen					34,00	30,00	18,00	16,00	20,00	19,67
Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Sertifikat					2.786,00	2.982,00	24,00	22,00	1.405,00	1.314,00
Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Sertifikat					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Keselamatan	Dokumen					25,00	19,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					8,00	8,00	1,00	1,00		
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1,00	1,00

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

E. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Tabel 3.6 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Studi/ Kajian/ Masterplan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	dokumen	9	9	15	15						
Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kegiatan	4	4	4	4						
Sosialisasi/ Seminar/ Workshop/ Lokakarya	Tahun	1	1	3	3						
Rapat/ Rakor/ Rakornis/ Radin/ Raker	Tahun	1	1	10	10						
Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan			3	3						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			12	11,1						
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian	Laporan			1	1						
Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			1	0						
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			2	1						

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Berita Acara Serah Terima Barang	Laporan			3	1						
Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak	Laporan			1	1						
Laporan Keuangan	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT	Laporan			3	3						
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan	Laporan			9	9						
Pengawasan di Bidang Perkeretaapian	Laporan			2	1						
Bantuan Hukum	Laporan			3	3						
Penyelenggaraan Humas	Laporan			6	5						
Pameran	Laporan			1	1						
Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Laporan			1	1						
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			130	10						
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Laporan			99	70						

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
(1)	(2)	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Laporan			13	9						
Layanan Perkantoran	Laporan			120	163,37	120	117,76	10	9	12	11,30
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			172	87,97						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			491	291,65						
Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Perkeretaapian	Dokumen					13	13	11	11	10	10
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan					123	60,97	35	34	29	26,45
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					18	14,8	13	12	13	12,67

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2019, berikut disampaikan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

PERS- PECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
STAKE- HOLDERS PERSPEC- TIVE	SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional	IK 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	-	-	-	-	0,28	0,25	0,31	0,29	0,34	0,31
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN Transportasi Kereta Api yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah	IK 2 Modal share angkutan penumpang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	4,00	5,03	5,20	5,35	5,40	5,62
		IK 3 Modal share angkutan barang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	0,20	0,23	0,25	0,25	0,29	0,26
CUS- TOMERS PERSPEC- TIVE	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN Transportasi Kereta Api	IK 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55	1,15	0,55	0,24	0,55	0,26	0,26	0,24	0,26	0,15
		IK 5 Rasio Gangguan Keamanan pada	Kejadian gangguan	-	-	-	-	10,7	6,59	6,50	6,89	6,50	4,44

PERS- PECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api	keamanan/ 1 juta km tempuh										
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api	IK 6 Prosentase Capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> Transportasi Kereta Api	%	-	-	-	-	65,00	66,05	67,00	76,18	69,00	81,31
		IK 7 Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca ari Subsektor Perkeretaapian	%	-	-	-	-	6,04	15,32	18,00	18,61	20,00	29,52
			Juta ton CO2/ tahun	-	-	-	-	3,51	3,81	-	-	-	-



B A B 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.

- b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

- a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
- b) Sertifikasi sarana perkeretaapian.
- c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
- d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
- e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
- f) Pemenuhan kebutuhan IMO.
- g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
- h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
- i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Program pembangunan tahun 2024 difokuskan untuk penyelesaian KDP/kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan outcome Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
 - a) Infrastructure Maintenance and Operation;
 - b) Penanganan perlintasan sebidang;
 - c) Peningkatan jalur, jembatan fasilitas operasi KA;
 - d) Pengadaan kereta kerja (inspeksi, kereta ukur, crane);
 - e) Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
 - f) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, diantaranya kegiatan:
 - a) Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera;
 - b) Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi;
 - c) Pembangunan Jalur Ganda Sumbagsel dan Lintas Selatan Jawa;

- d) Pembangunan KA perkotaan (Jabodetabek, Palembang, Bandung, Yogyakarta – Solo, Surabaya);
 - e) Reaktivasi jalur KA;
 - f) Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
- a) Subsidi perintis;
 - b) Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran;
 - c) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru;
 - d) Pengelolaan PSO;
 - e) Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan:
- a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Layanan perkantoran;
 - d) Administrasi kegiatan.

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api baik Prioritas Nasional (PN) dan non PN;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;
4. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian;
5. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
6. Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional), terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian, Dokumen Perencanaan Teknis.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)*
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian					237.061.798
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			46.232.758		15.142.855
ABF.001	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rekomen- dasi	10	39.025.611	3	13.876.852
ABF.002	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)/ Rencana Induk (Master Plan)	Rekomen- dasi	2	7.207.147	1	1.266.003
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria			13.303.649		3.054.265
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	NSPK	8	13.303.649	5	3.054.265

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)*
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian					237.061.798
BAH	Pelayanan Publik Lainnya			57.339.306		11.974.667
BAH.002	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	layanan	1	57.339.306	1	11.974.667
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			18.318.819		2.019.308
CBA.001	Jalur Kereta Api	Paket	1	7.330.083	-	-
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	605.000	-	-
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket/ Km	1	4.333.736	2	2.019.308
PBF						6.795.648
PBF.006	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Jalur KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan Menuj Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Rekomend asi/ Kebijakan	-	-	1	2.756.000
PBF.007	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Jalur KA Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)	Rekomend asi/ Kebijakan	-	-	1	4.039.648
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan	6	291.763.722	8	200.094.363
QAH.001	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang	Layanan	-	-	1	17.923.742
QAH.002	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Tebing Tinggi-Lalang	Layanan	-	-	1	8.712.521
QAH.003	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai-Besitang-Sei Liput	Layanan	-	-	1	17.000.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)*
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian					237.061.798
QAH.004	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam	Layanan	-	-	1	14.400.000
QAH.007	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	Layanan	-	-	1	84.037.847
QAH.008	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar-Parepare	Layanan	-	-	1	33.733.346
QAH.009	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari-Wonogiri	Layanan	-	-	1	9.197.540
QAH.010	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat-Pondok S5	Layanan	-	-	1	15.089.367
RBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Km/paket/ unit		7.171.092.301	256	3.945.892.520
RBA.003	Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran-Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran-Mambang Muda	Km	-	-	1	221.275.901
RBA.004	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Bukit Putus-Pauh Lima	Km	-	-	5	84.137.054
RBA.005	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong-Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong-Gedebage dan Segmen Haurpugur-Cicalengka	Km	-	-	9	199.710.983
RBA.008	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo-Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan-Kalioso	Km	-	-	3	200.985.892
RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi lintas Bogor-Yogyakarta	Km	-	-	1	72.799.888
RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto-Sepanjang	Km	-	-	33	200.000.000
RBA.037	Peningkatan Stasiun Rangkasbitung	Unit	-	-	1	195.000.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)*
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian					237.061.798
RBA.038	Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya-Banyuwangi lintas Segmen Jember-Kalisat	Km	-	-	17	249.272.100
RBA.041	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang-Bandung Tahap II lintas Bogor-Yogyakarta	Paket	-	-	1	81.225.000
RBA.042	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto	Km	-	-	57	251.248.217
RBA.043	Peningkatan Jalur KA antara Maos-Cilacap	Km	-	-	21	90.467.956
RBA.044	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon-Semarang segmen Tegal-Pekalongan	Km	-	-	60	374.730.110
RBA.045	Peningkatan Jalur KA lintas Solo-Wonogiri	Km	-	-	32	93.000.000
RBA.046	Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	Paket	-	-	1	378.122.842
RBA.048	Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek-Cirebon Segmen Kertasemaya-Arjawinangun	Km	-	-	1	30.000.000
RBA.049	Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota-Tanjung Priok	Km	-	-	1	59.462.720
RBA.050	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro	Paket	-	-	1	100.000.000
RBA.075	Peningkatan Jalur KA Segmen Labuan Belawan Lintas Medan-Belawan Tahap II	Km	-	-	1	144.830.569
RBA.076	Peningkatan Jembatan BH 343 Segmen Kisaran-Tanjung Balai	Unit	-	-	1	42.000.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)*
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian					237.061.798
RBA.077	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura Tahap I	Unit	-	-	1	120.000.000
RBA.078	Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I	Unit	-	-	1	230.931.048
RBA.079	Peningkatan Underpass BH 421 Jatibarang	Unit	-	-	1	58.491.069
RBA.082	Pembangunan Gardu Traksi Delanggu	Unit	-	-	1	60.000.000
RBA.083	Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun lintas Makassar-Parepare	Paket	-	-	1	109.000.000
RBA.084	Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Kras-Ngadiluwih dan Segmen Temuguru-Singojuruh	Unit	-	-	1	57.796.809
RBA.085	Peningkatan Sistem Telekomunikasi Segmen Kertosono-Talun Lintas Kertosono-Ketapang Tahap I	Km	-	-	1	88.900.000
RBA.086	Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran-Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda-Padang Halaban)	Km	-	-	1	152.504.362
RBA.035	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	Paket	-	-	1	3.400.000
RBA.025	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan – Kadipiro (RM)	Km	-	-	2	60.539.989
RBA.036	Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (RM)	Km	-	-	1	5.325.433
RBA.078	Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I (RM)	Unit	-	-	1	12.059.837

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

*Berdasarkan DIPA Awal Ditjen Perkeretaapian TA 2024

4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
2. Sertifikasi Produk, terdiri dari Sertifikasi Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, terdiri dari Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian;
4. Akreditasi Lembaga, terdiri dari Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
5. OM Prasarana Bidang Perkeretaapian terdiri dari Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO), Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Operasi Prasarana Perkeretaapian;
6. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, terdiri dari Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian					2.728.167.573
ADC	Sertifikasi Produk		7	28.802.439	9	35.314.380
ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (BLU)	Produk			1	14.132.218
ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (RM)	Produk			2	5.908.970
ADC.002	Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (BLU)	Produk			3	12.216.444
ADC.002	Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (RM)	Produk			3	3.056.748
ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM		5	23.023.848	3	25.427.875
ADI.001	Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian (BLU)	Orang			1	7.306.442
ADI.001	Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian (RM)	Orang			2	18.121.433
ADE	Akreditasi Lembaga		2	616.188	1	440.244

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian					2.728.167.573
ADE.001	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Lembaga	2	616.188	1	440.244
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			6.692.733		4.672.015
AFA.001	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	NSPK	5	6.692.733	3	4.672.015
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			4.430.560		41.448.299
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket, Unit	1	1.210.000	1	28.099.118
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Paket, Unit	2	3.220.560	27	13.349.181
CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian			1.984.689.752		344.408.464
CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Km, Paket	1	1.500.000.000	8	37.596.733
CDA.002	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Km, Paket	2	483.479.752	2	107.358.460
CDA.003	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Paket	1	1.210.000	11	199.453.271
RCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian					122.460.654
RCK.001	Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II	Unit, Paket	-	-	1	122.460.654
RDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian					2.153.995.642
RDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Paket	-	-	7	1.500.000.000
RDA.002	Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih-Tarahan	Km	-	-	1	80.470.971
RDA.004	Penanganan Rintang Jalan dan Peningkatan 5 Unit Jembatan KA lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam	Paket	-	-	1	199.500.000
RDA.005	Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan	Paket	-	-	1	283.555.842

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian					2.728.167.573
	Peningkatan 2 Unit Jembatan KA lintas Tarahan-Tanjung Enim					
RDA.006	Penanganan Rintang Jalan Segmen Kawunganten- Jeruklegi lintas Banjar-Kroya dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Prupuk- Linggapura Lintas Prupuk- Purwokerto	Paket	-	-	1	90.468.829

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian, Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Rencana Induk (Master Plan), Studi Lingkungan, Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar, Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) dan Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian;
3. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) dan Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
4. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Operasi Sarana Perkeretaapian, Perawatan Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
5. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas dan Infrastruktur Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian Transportasi Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN-STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian					2.146.188.679
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			98.017.164		35.594.923
ABF.001	Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	rekomendasi	-	-	-	-
ABF.002	Pra Studi Kelayakan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.815.000	-	-
ABF.003	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)	rekomendasi	1	1.815.000	6	9.666.891
ABF.004	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)	rekomendasi	1	1.815.000	-	-
ABF.005	Studi Lingkungan	rekomendasi	14	32.673.398	4	5.294.306
ABF.006	Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar	rekomendasi	1	1.815.000	-	-
ABF.007	Rancangan Rinci (<i>Detailed Design/ Engineering Design</i>)	rekomendasi	26	47.290.765	1	20.633.726
ABF.008	Studi Evaluasi Hasil/ Manfaat Proyek	rekomendasi	6	10.793.000	-	-
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			233.646.500		28.574.432
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK	11	215.000.000	2	23.744.304
AFA.002	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	NSPK	8	18.646.500	1	4.830.128
CAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			520.226.552		88.713.214
CAK.001	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	36	375.026.552	1	88.713.214
CAK.002	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Unit	10	121.000.000	-	-
CAK.003	Sarana Kerja Bidang Konektivitas	Unit	1	12.100.000	-	-

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian					2.146.188.679
	Perkeretaapian (Prioritas Nasional)					
CAK.004	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Unit	1	12.100.000	-	-
CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian			141.510.192		37.591.882
CCK.001	Operasi Sarana Perkeretaapian	Tahun, Unit	1	8.638.190	1	4.000.000
CCK.002	Perawatan Sarana Perkeretaapian	Tahun, Unit	1	127.990.343	4	500.000
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.210.000	-	-
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Tahun, Unit	1	1.251.659	1	33.091.882
CCK.005	Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.210.000	-	-
CCK.006	Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Tahun	1	1.210.000	-	-
CBA	Prasarana Bidang Perkeretaapian			5.718.753.620		12.582.250
CBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	15	400.000.000	-	-
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1	1.210.000	-	-
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Km, Paket, Unit	63	5.311.493.620	4	12.382.250
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian (PLN)	Km, Paket, Unit	-	-	1	200.000

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian					2.146.188.679
PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				2	200.000
PBF.001	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	100.000
PBF.002	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	100.000
RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian					1.675.341.978
RBA.012	Pembangunan Jalur KA antara Medan-Binjai	Km	-	-	7	679.235.739
RBA.018	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Pendamping KPBU)	Paket	-	-	60	267.490.000
RBA.019	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	Paket	-	-	1	100.000
RBA.023	Pengadaan Rel dan Wesel R.54	Km	-	-	1	412.805.855
RBA.030	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I)	Km	-	-	1	583.300.384

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian, Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana

- Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang dan Keselamatan Perkeretaapian;
3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Urusan Organisasi dan Layanan Tata Kelola Internal;
 4. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4644	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian					54.733.165
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			26.086.417		
EAB.001	Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	4	1.789.221	-	-
EAB.002	Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	3.957.366	-	-
EAB.003	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5	2.962.452	-	-
EAB.004	Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	17.377.378	-	-
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			84.537.720		
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	27	34.365.858	-	-
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	15	14.029.402	-	-
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	25	19.864.620	-	-
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	24	16.277.840	-	-
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1.664.788		

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
EAH.001	Layanan Urusan Organisasi	layanan	1	453.763	-	-
EAH.002	Layanan Tata Kelola Internal	layanan	3	1.211.025	-	-
EAE	Layanan Prasarana Internal			52.262.876		
EAE.001	Gedung dan Bangunan	tahun	1	52.262.876	-	-
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				1	420.000
CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	-	1	420.000
EBA	Sistem Informasi Pemerintahan				6	22.217.035
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (BLU)	Layanan	-	-	5	11.074.494
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (RM)	Layanan	-	-	1	11.142.541
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				1	1.080.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	1	1.080.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				3	30.166.130
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (BLU)	Dokumen	-	-	1	26.979.649
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (RM)	Dokumen	-	-	2	3.186.481
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan					850.000
FAB.001	Sistem Informasi Pemerintahan	Layanan	-	-	1	850.000

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

Selanjutnya, penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 pada Program Dukungan Manajemen akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO)
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2024**

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian					9.721.391
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			27.488.750		
EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	10	27.488.750	-	-
EAF	Layanan SDM			12.369.730		
EAF.001	Layanan SDM	orang	18	12.369.730	-	-
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					4.105.301
EBA.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	-	-	2	4.105.301
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					5.616.090
EBC.001	Layanan SDM	orang	-	-	1.285	5.616.090

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran;
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan;

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian					521.424.006
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			15.396.076		
ABF.001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi	17	15.396.076	-	-
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			5.992.097		
EAB.001	Layanan Perencanaan	Layanan	11	5.992.097	-	-
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal			49.207.662		
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan	Tahun	23	15.626.663	-	-
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan	Tahun	39	24.266.944	-	-
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum	Tahun	5	3.888.357	-	-
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum	Tahun	10	5.425.699	-	-
EAC	Layanan Umum			122.747.865		
EAC.001	Layanan Organisasi dan Rumah Tangga	Layanan	102	122.747.865	-	-
EAA	Layanan Perkantoran			253.862.189		
EAA.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	22	153.200.596	-	-
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	84	100.661.593	-	-
EAD	Layanan Sarana Internal			113.854.787		
EAD.001	Kendaraan Bermotor	Unit	3	6.441.840	-	-
EAD.002	Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	Unit	9	6.937.255	-	-
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	9	100.475.693	-	-
EAE	Layanan Prasarana Internal			26.365.336		
EAE.001	Gedung dan Bangunan	Unit	1	26.365.336	-	-
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				4	9.116.159
ABF.001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	4	9.116.159
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					347.858.495
EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	-	-	4	2.978.391
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	48	87.565.440
EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	-	18	257.314.664

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET REN- STRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				259	28.289.123
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	257	13.649.568
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	-	-	2	14.639.555
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					136.160.229
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	-	-	19	33.720.774
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	-	32	79.142.569
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	-	-	23	19.564.424
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	-	-	13	3.732.462

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Data dan Informasi. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.7 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian					
EAJ	Data dan Informasi Publik		3	2.824.008		
EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	Layanan	3	2.824.008	-	-
BMA	Data dan Informasi Publik					21.752.152
BMA.001	Pengelolaan Data dan Informasi	Layanan	-	-	2	902.564
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	-	-	211	4.934.054
CDS	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
CDS.001	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Titik/ Lokasi	-	-	1	4.355.021

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	-	2	1.273.109
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan					
FAB.001	Sistem Informasi	Layanan	-	-	4	10.287.404

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.8 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					
EBA	Layanan Kehumasan dan Protokoler			16.440.222		17.876.058
EBA.958	Layanan humas dan protokoler	layanan	22	16.440.222	13	17.876.058

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian tahun 2024 yaitu layanan hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO yang telah disesuaikan dengan pendanaan pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Tabel 4.9 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2024

KODE	KLASIFIKASI RNCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	INDIKASI PENDANAAN (.000,-)	TARGET DIPA	DIPA AWAL (.000,-)
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian					
EBA	Layanan Hukum			2.897.626		2.595.419
EBA.957	Layanan Hukum	layanan	3	2.897.626	1	2.595.419

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 (REVIU)

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020-2024 serta revaluasi terhadap target tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

NO.	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	BASE LINE REALISASI TAHUN 2023*	TARGET RENSTRA TAHUN 2024**	REVIU TARGET TAHUN 2024***
1.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi				
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,443	0,360	0,460
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal				
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	90,28	82,00	90,50
		IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	55,68	100,00	78,80
		IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	58,07	100,00	77,80
		IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	92,87	94,00	94,00
		IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3,60	-	3,70
3.	Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Handal				
	Keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (RoA)	0,10	0,22	0,09

Sumber:

* Baseline Tahun 2023 berdasarkan Capaian Kinerja hasil Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 (Desember 2023);

** Target 2024 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

*** Revaluasi Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

**Tabel 4.11 Reviu Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASE LINE REALISASI TAHUN 2023 TW III	TARGET RENSTRA TAHUN 2024*	REVIU TARGET TAHUN 2024**
1.	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian (SK1)	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas yang telah ditindaklanjuti (IKK1)	%	100,00	100,00	100,00
2.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK2)	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian (IKK2)	%	97,78	100,00	100,00
3.	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional (SK3)	IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (IKK3)	%	55,79	65,00	65,00
4.	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal (SK4)	IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (IKK4)	%	70,37	100,00	77,00
5.	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (SK5)	IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian (IKK5)	%	75,15	100,00	100,00
6.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (SK6)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (IKK6)	Nilai	82,70	90,00	83,00
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (IKK7)	Level	3	4	3
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (IKK8)	%	63,44	100,00	100,00
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian (IKK9)	%	77,33	97,00	89,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (IKK10)	Nilai	3,68	-	3,70

Ket.: * Target 2024 berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian;

** Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024*
1.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (IKK 1)	%	100,00
2.	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (IKK 2)	%	100,00
3.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEK (IKK 3)	%	88,00
4.	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api tepat waktu (IKK 4)	%	88,00
5.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (IKK 5)	%	74,46
6.	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (IKK 6)	%	100,00
7.	IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat LLAKA (IKK 7)	Nilai	3,70
8.	Persentase Realisasi PNBK (IKK 8)	%	100,00
9.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat LLAKA (IKK 9)	%	88,00
10.	Nilai AKIP Direktorat LLAKA (IKK 9)	Nilai	83,40
11.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (IKK 11)	Level	3

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024*
1.	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah (IKK 1)	Rasio	0,460
2.	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II (IKK 2)	%	94,00
3.	Persentase Fasilitas Operasi KA dengan Teknologi Handal (IKK 3)	%	64,92
4.	IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 4)	Nilai	3,80
5.	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (IKK 5)	%	100,00
6.	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (IKK 6)	%	100,00
7.	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 7)	Nilai	84,00
8.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (IKK 8)	%	92,00
9.	Persentase Realisasi PNBK Bidang Perkeretaapian (IKK 9)	%	100,00
10.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat	Level	3

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024*
1.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (IKK 1)	%	66,67
2.	IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 2)	Nilai	3,70
3.	Persentase Pemenuhan SMN (IKK 3)	%	100,00
4.	Persentase Sarana Perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kelaikan (IKK 4)	%	80,95
5.	Persentase Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor (IKK 5)	%	90,00
6.	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian (IKK 6)	%	100,00
7.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 7)	%	86,40
8.	Persentase Realisasi PNBK (IKK 8)	%	100,00
9.	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 9)	Nilai	80,60
10.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (IKK 10)	Level	3

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024*
1.	Penerapan SMKP (IKK 1)	%	100,00
2.	Pemenuhan Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian (IKK 2)	%	100,00
3.	Pemenuhan Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian (IKK 3)	%	160,00
4.	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/ sudah diimplementasikan/ ditindaklanjuti (IKK 4)	%	72,00
5.	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian (IKK 5)	%	100,00
6.	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian (IKK 6)	%	66,67
7.	IKM terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 7)	Nilai	3,85
8.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 8)	%	90,00
9.	Persentase Realisasi PNBK Bidang Keselamatan Perkeretaapian (IKK 9)	%	100,00
10.	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 10)	Nilai	83,35
11.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (IKK 11)	Level	3

Ket.: * Reviu Target 2024 berdasarkan koordinasi Capaian Kinerja dan hasil dari Direktorat Teknis.



B A B 5

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi transportasi perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan ***New Initiatives*** maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam **Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024** sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang nyata di bidang perkeretaapian serta dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

BUDI KARYA SUMADI

MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46
SP2	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IKP2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,09
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50
		IKP4	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80
		IKP5	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80
		IKP6	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	94,00

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		IKP7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|---|----|-------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | Rp | 2.150.000.000.000 |
| 2. | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 4.180.000.000.000 |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 2.730.000.000.000 |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | Rp | 54.700.000.000 |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | Rp | 9.720.000.000 |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | Rp | 521.000.000.000 |
| 7. | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | Rp | 21.800.000.000 |
| 8. | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian | Rp | 17.900.000.000 |
| 9. | Legislasi dan Litigasi Transportasi | Rp | 2.600.000.000 |

Disetujui

Menteri Perhubungan



BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal Perkeretaapian



MOHAMAD RISAL WASAL

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	2.150.000.000.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	2.784.700.000.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	4.180.000.000.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	78,80		57,66%	59,58%	61,50%	63,42%	65,34%	67,26%	69,17%	71,09%	73,01%	74,93%	76,85%	78,80%		
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	77,80		61,22%	62,73%	64,24%	65,75%	67,26%	68,78%	70,29%	71,80%	73,31%	74,82%	76,33%	77,80%		
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	94,00		94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%		
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70		3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70		

Jakarta, Januari 2024
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://dika.kemenuh.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

Nomor : **KP.406/111/DJKA/2024**

Jakarta, **12** Desember 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Revisi Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Tahun 2024

Yth. Menteri Perhubungan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 15 bahwa perjanjian kinerja Kementerian dan Unit Kerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dalam hal terjadi:

1. Pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Renstra, Struktur Organisasi, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan konsep Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1. Perubahan/penyesuaian alokasi anggaran dan program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, diantaranya pergeseran anggaran antar unit Eselon I, perubahan skema pelaksanaan kegiatan MYC/SYC. kebijakan relaksasi *Automatic Adjustment* serta tambahan *Automatic Adjustment* perjalanan dinas.

2. Memperhatikan hasil evaluasi monitoring kinerja Triwulan III Tahun 2024 termasuk capaian kinerja yang bersifat anomali agar memenuhi kriteria *on the right track* (90-110%).
3. Perjanjian Kinerja selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 termasuk pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Mohon perkenan arahan dan persetujuan Bapak Menteri Perhubungan.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,



Ir. Mohamad Risa Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

DUDY PURWAGANDHI


MOHAMAD RISAL WASAL

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46
SP2	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IKP2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,06
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50
		IKP4	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80
		IKP5	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80
		IKP6	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	94,00

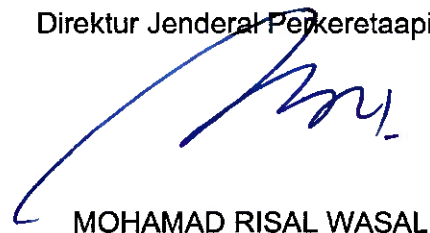
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		IKP7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70

Kegiatan			Anggaran	
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.499.880.834.000	
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	4.860.150.516.000	
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.708.923.828.000	
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	53.990.061.000	
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	9.721.391.000	
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	557.104.471.000	
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	16.426.314.000	
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	15.075.934.000	
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	2.595.419.000	

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2024
Direktur Jenderal Perkeretaapian

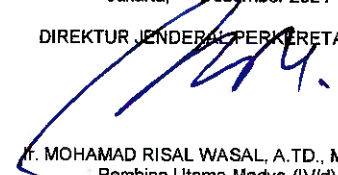

MOHAMAD RISAL WASAL

REVISI RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Konktivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	2.499.880.634.000	Setdittjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,06	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,06	2.762.913.889.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subadi penitns dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	90,5%	4.860.150.516.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Penuh target angkutan penumpang kereta api	%	78,80		57,90%	59,81%	61,77%	63,64%	65,98%	68,12%	70,45%	72,65%	74,82%	75,06%	76,98%	78,80%		
	IK5 Penuh target angkutan barang kereta api	%	77,80		61,23%	62,57%	64,05%	65,49%	67,15%	68,77%	70,44%	72,10%	73,74%	74,82%	76,33%	77,80%		
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	94,00		93,93%	93,93%	93,93%	93,93%	93,93%	93,93%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%		
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70		3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70		

Jakarta, Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


H. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)

Lampiran 3
Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi
Peningkatan Kinerja

**KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	SASARAN : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Antar Wilayah		
1	Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang).	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
2	Monitoring penyelesaian <i>readiness criteria</i> kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.	Triwulan I - III Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BTP Padang • Balai Pengujian Perkeretaapian
3	Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).	Triwulan I - II Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
4	Percepatan penyelesaian regulasi teknis terkait trem otonom.	Triwulan I - III Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
B.	SASARAN : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal INDIKATOR KINERJA: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate Of Accident)		
1	Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ rampcheck guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.	Triwulan I-II Tahun 2025	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.	Triwulan I – II Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
C.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
1	Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambir, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalios, Medan – Binjai/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat LLA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Direktorat LLA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
5	Penetapan dan pengawasan intensif terhadap implementasi GAPEKA Tahun 2025 agar perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat LLA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
D.	SASARAN : Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api		
1	Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Muara Satu, Rantauprapt – Pondok S5, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat LLA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

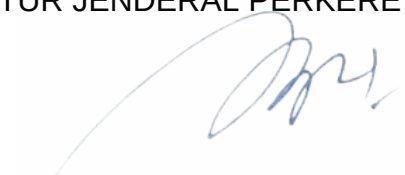
NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran.	Triwulan I - IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Balai terkait di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang).	Triwulan I - III Tahun 2025	- Direktorat Prasarana Perkeretaapian - Direktorat LLAKA - Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara <i>realtime</i> serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan.	Triwulan I - IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Sekretariat Ditjen Perkeretaapian - Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
5	Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.	Triwulan I - II Tahun 2025	- Sekretariat Ditjen Perkeretaapian - Direktorat LLAKA - Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
E.	SASARAN : Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api		
1	Pengoptimalan pemanfaatan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok.	Triwulan I - II Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Direktorat Prasarana Perkeretaapian - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian - BTP Semarang - Balai Pengujian Perkeretaapian
2	Pelaksanaan konsultasi publik penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda kereta api pada Tahun 2025 guna mendukung peningkatan <i>modal share</i> angkutan barang.	Triwulan II - IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing <i>stakeholder</i> agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.	Triwulan I - III Tahun 2025	• Direktorat LLAKA
4	Penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator perkeretaapian untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (<i>rolling highway</i>).	Triwulan I - III Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • BPKA Sulsel
F.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI		
1	Pembahasan lanjutan terkait penyusunan standar TQI termasuk apabila dibutuhkan pelaksanaan FGD dengan operator perkeretaapian untuk percepatan penyelesaian standar TQI.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Koordinasi dan evalusai hasil pengukuran TQI periode IV Tahun 2024 termasuk pembahasan hasil pengukuran <i>Track Geometry Trolley</i> di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan serta pembahasan jadwal pengukuran TQI Tahun 2025.	Triwulan I Tahun 2025	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 (termasuk kegiatan pendukung peningkatan TQI) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.	Triwulan I Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
G.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		
1	Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja.	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
			• Balai Pengujian Perkeretaapian • BPKAR Sumsel • BPKA Sulsel
2	Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui <i>dashboard</i> terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).	Triwulan I - IV Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Pengujian Perkeretaapian
3	Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I - II Tahun 2025	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Pengujian Perkeretaapian • BPKAR Sumsel • BPKA Sulsel

Jakarta, Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Lampiran 4
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (98.44%)	2,835,047,797,000 2,357,761,059,298 (83.16%)	315,324,593,000 255,366,745,945 (80.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,339,520,180,000 2,799,316,753,665 (83.82%)
		SISA	2,958,841,578	477,286,737,702	59,957,847,055	0	0	0	0	0	0	540,203,426,335
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	36,900,000,000 34,229,243,713 (92.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	36,900,000,000 34,229,243,713 (92.76%)
		SISA	0	0	2,670,756,287	0	0	0	0	0	0	2,670,756,287
3	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	5,220,150,000 4,372,035,968 (83.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,220,150,000 4,372,035,968 (83.75%)
		SISA	0	0	848,114,032	0	0	0	0	0	0	848,114,032
4	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU REALISASI	0 0.00%	45,650,032,000 37,119,498,686 (81.31%)	31,575,528,000 30,691,684,407 (97.20%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,225,560,000 67,811,183,093 (87.81%)
		SISA	0	8,530,533,314	883,843,593	0	0	0	0	0	0	9,414,376,907
5	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	7,265,002,878,000 2,922,995,634,437 (40.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,265,002,878,000 2,922,995,634,437 (40.23%)
		SISA	0	0	4,342,007,243,563	0	0	0	0	0	0	4,342,007,243,563
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (98.44%)	2,880,697,829,000 2,394,880,557,984 (83.14%)	7,654,023,149,000 3,247,655,344,470 (42.43%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	10,723,868,768,000 5,828,724,850,876 (54.35%)
		SISA	2,958,841,578	485,817,271,016	4,406,367,804,530	0	0	0	0	0	0	4,895,143,917,124



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	9,721,391,000 8,299,826,545 (85.38%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9,721,391,000 8,299,826,545 (85.38%)
		SISA	0	1,421,564,455	0	0	0	0	0	0	0	1,421,564,455
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (98.44%)	340,495,302,000 302,534,925,745 (88.85%)	28,085,189,000 27,011,077,824 (96.18%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	557,728,281,000 515,734,951,991 (92.47%)
		SISA	2,958,841,578	37,960,376,255	1,074,111,176	0	0	0	0	0	0	41,993,329,009
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	11,492,260,000 9,345,994,866 (81.32%)	4,934,054,000 4,910,202,018 (99.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	16,426,314,000 14,256,196,884 (86.79%)
		SISA	0	2,146,265,134	23,851,982	0	0	0	0	0	0	2,170,117,116
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	15,075,934,000 12,591,756,900 (83.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15,075,934,000 12,591,756,900 (83.52%)
		SISA	0	2,484,177,100	0	0	0	0	0	0	0	2,484,177,100
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,595,419,000 1,573,247,939 (60.62%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,595,419,000 1,573,247,939 (60.62%)
		SISA	0	1,022,171,061	0	0	0	0	0	0	0	1,022,171,061
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	239,569,592,000 193,403,051,608 (80.73%)	4,620,580,924,000 1,949,004,337,582 (42.18%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,860,150,516,000 2,142,407,389,190 (44.08%)
		SISA	0	46,166,540,392	2,671,576,586,418	0	0	0	0	0	0	2,717,743,126,810
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,883,446,599,000 1,516,595,760,843 (80.52%)	827,145,911,000 553,239,912,893 (66.89%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,710,592,510,000 2,069,835,673,736 (76.36%)
		SISA	0	366,850,838,157	273,905,998,107	0	0	0	0	0	0	640,756,836,264



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	328,843,037,000 310,533,478,213 (94.43%)	2,167,050,205,000 708,145,934,346 (32.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,495,893,242,000 1,018,679,412,559 (40.81%)
		SISA	0	18,309,558,787	1,458,904,270,654	0	0	0	0	0	0	1,477,213,829,441
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	49,458,295,000 40,002,515,325 (80.88%)	6,226,866,000 5,343,879,807 (85.82%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	55,685,161,000 45,346,395,132 (81.43%)
		SISA	0	9,455,779,675	882,986,193	0	0	0	0	0	0	10,338,765,868
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	189,147,790,000 186,188,948,422 (98.44%)	2,880,697,829,000 2,394,880,557,984 (83.14%)	7,654,023,149,000 3,247,655,344,470 (42.43%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	10,723,868,768,000 5,828,724,850,876 (54.35%)
		SISA	2,958,841,578	485,817,271,016	4,406,367,804,530	0	0	0	0	0	0	4,895,143,917,124

Lampiran 5
Monitoring Rencana Aksi Per Bulan

Monitoring Renaksi Periode Januari – November 2024

<https://bit.ly/4gdfWsR>



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Desember, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	2.150.000.000.000	15.38	0.45	1.017.922.348.570	97.83%	47.35%	Progres konektivitas Tahun 2024 pada kedua lokasi PKW tersebut masih dalam proses persiapan penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan/pengujian/lainnya). Berdasarkan data tersebut, rasio konektivitas pada Triwulan III Tahun 2024 diperoleh sebesar 0,45 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi)	Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah sebagai berikut : a. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengujian prasarana perkeretaapian lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu untuk selanjutnya dukungan pengoperasian jalur kereta api tersebut dengan berkoordinasi dengan operator/PT. KAI. b. Percepatan penyelesaian ketentuan teknis penyelenggaraan trem otonom termasuk koordinasi lanjut hasil Proof Of Concept (PoC) yang telah dilaksanakan guna mendukung persiapan showcase trem otonom di wilayah IKN	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.09	-	2.784.700.000.000	15.38	0.08	2.067.322.661.652	88.89%	74.24%	Sampai dengan Des Tahun 2024, terdapat 5 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 66.145.239 Km. Dengan kejadian 5 kecelakaan kereta api dan jumlah Km Tempuh sebesar 66.145.239 Km, maka diperoleh rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 0,08	Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya diantaranya: a. Percepatan penyelenggaraan IMO dengan pelaksanaan kontrak antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan PT. KAI. b. Lanjutan/penyelesaian modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik (Stasiun Cicalengka, Stasiun Kalioso). c. Penyelesaian audit SMKP terhadap Badan Usaha Perkeretaapian. d. Pelaksanaan kegiatan inspeksi dan rampcheck oleh Inspektur Perkeretaapian sesuai kompetensi untuk memastikan kehandalan sarana dan prasarana perkeretaapian pada penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	95	1080	90.5	8.38	4.180.000.000.000	15.38	95.96	2.142.407.389.190	106.03%	51.25%	Target persentase On Time Performance (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90,50%. Sampai dengan Desember 2024 diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 620.840 KA dibandingkan dengan total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 646.954 KA, maka diperoleh realisasi persentase capaian On Time Performance (OTP) Tahun 2024 sebesar 95,96%.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan jalur kereta api (KisaranMambangmuda, Padang – Bukit Putus – Pauhlima, Kertasemaya –Arjawinangun, Maos – Cilacap, Solo – Wonogiri, Jember – Kalisat) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api. b. Lanjutan/penyelesaian kegiatan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Kiaracondong – Cicalengka, Solo Balapan-Kalioso) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. d. Penanganan perlintasan sebidang dengan penutupan perlintasan/pembangunan flyover/underpass guna meminimalisir potensi gangguan operasional dan kecelakaan pada perlintasan sebidang yang dapat menyebabkan keterlambatan operasional kereta api	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	78,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	74	813	78.8	9.69	-	-	74.82	-	94.95%	-	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan pemenuhan target angkutan penumpang kereta api sebesar 78,80% untuk Tahun 2024 dan Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api s.d Desember Tahun 2024 diperoleh sebanyak 372.302.354 penumpang. Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 1.097.913.782 penumpang (Tahun 2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, Tahun 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang, Tahun 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang dan Tahun 2023 sebanyak 428.894.610 penumpang) dan jumlah penumpang pada Tahun 2024 sebanyak 372.302.354 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 1.470.216.136 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu 1.965.065.861 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 74,82%.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru Tahun 2025, termasuk pelaksanaan rampcheck standar pelayanan minimum. b. Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Rangkasbitung, Tanah Abang, Klaten). c. Koordinasi dengan badan usaha/operator untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan KA Perintis, diantaranya KA perintis Cut Meutia yang pada September 2024 tidak beroperasi dikarenakan perawatan sarana KA termasuk rencana perpanjangan sampai Stasiun Muara Satu.	Dit.LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	77,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	73	828	77.8	9.4	-	-	73.74	-	94.78%	-	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan pemenuhan target angkutan barang kereta api sebesar 77,80% untuk Tahun 2024 . Pada Tahun 2024, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar 51.224.482 ton. Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 217.875.324 ton (Tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, Tahun 2021 sebanyak 50.038.883 ton, Tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton dan Tahun 2023 sebanyak 64.255.998 ton) dan realisasi pada Triwulan III 2024 sebanyak 51.224.482 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut kereta api dari Tahun 2020 s.d 2024 sebanyak 269.099.806 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Tahun 2024 sebesar 73,74%.	Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya: a. Monitoring penyelesaian peningkatan prasarana perkeretaapian Lahat –Kertapati oleh PT. KAI yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berperan besar dalam mendukung kinerja angkutan KA barang. b. Persiapan penyelenggaraan angkutan Motor Gratis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. c. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan angkutan KA barang (domestik dan ekspor) dengan integrasi sistem beberapa pihak terkait (badan usaha/operator perkeretaapian, bea cukai, operator pelabuhan, dan lainnya) dengan HUBNET Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelesaian Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekonomi Logistik Nasional.	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	94,00	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	94	1128	94	8.33	-	-	94.79	-	100.84%	-	Data capaian TQI yang digunakan adalah hasil pengukuran kereta ukur periode II Tahun 2024, dimana pengukuran periode III Tahun 2024 masih dalam tahap pengolahan data dan sinkronisasi lanjutan sesuai parameter kategori TQI yang telah ditentukan. Panjang jalur KA yang dioperasikan PT. KAI sepanjang 5.935,221 Km dan telah dilakukan pengukuran sepanjang 5.934,847 Km (tidak diukur 0,374 Km atau 0,01%). Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil jalur kereta api untuk Kategori I dan II sepanjang 5.626,009 km atau 94,79%, sedangkan jalur kereta api Kategori III dan IV sepanjang 308,838 Km atau 5,20%	Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya: a. Lanjutan/penyelesaian kegiatan peningkatan jalur kereta api (KisaranMambangmuda Padang – Bukit Putus – Pauhlima, Kertasemaya – Arjawinangun, Maos – Cilacap, Solo – Wonogiri, Jember – Kalisat) dan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Kiaracondong – Cicalengka, Solo Balapan-Kalioso) untuk mendukung peningkatan nilai TQI Kategori I dan II. b. Koordinasi dengan PT. KAI untuk penyelesaian kegiatan pengukuran jalur kereta api periode III Tahun 2024 khususnya di wilayah Sumatera. c. Berkoordinasi dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) terkait kebutuhan hasil pengukuran kualitas jalur kereta api wilayah Sulawesi (Makassar – Parepare) termasuk dengan operator perkeretaapian lainnya	Dit. Prasarana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	3	3.7	123.33	-	-	3.73	-	100.81%	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target kinerja nilai IKM Tahun 2024 dan s.d Desember 2024 sebesar 3,70. Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian s.d Des 2024, diperoleh nilai IKM sebesar 3,73 dengan uraian perhitungan rata-rata setiap bulan (Januari – September) dari 7 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang melaksanakan layanan publik bidang perkeretaapian.	Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Melakukan peninjauan SOP makro/mikro, khususnya untuk meningkatkan efisiensi serta penyederhanaan layanan perizinan, pengujian, dan sertifikasi bidang perkeretaapian sesuai ketentuan. b. Meningkatkan kanal komunikasi dengan pengguna layanan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan dan menerima informasi terkini terkait layanan termasuk pelaksanaan survei IKM. c. Meningkatkan komunikasi dengan PPTB Setjen Kemenhub untuk mendapatkan informasi terbaru guna meminimalisir kesalahan terkait pelaksanaan survey IKM.	Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, BPKA Sulawesi Selatan
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	-	3	3.7	123.33	-	-	-	-	-	-			Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, Balai Pengujian

Jakarta, Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Lampiran 6
Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja
Rasio Konektivitas Antar Wilayah

DATA TARGET PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	BTP Kelas I Medan	1	3	5	3	2	2	1	1	9	9	0,50
	Provinsi Aceh		Banda Aceh	Lhoksumawe			Lhokseumawe (NAD)					
					Langsa							
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Rantau Prapat	KSN Danau Toba	Belawan (Sumatera Utara)		Kualanamu				
				Pematang Siantar		Kuala Tanjung (Sumatera Utara)						
				Tebingtinggi								
				Kisaran								
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)			
			Pekanbaru									
2	BTP Kelas II Padang	1	0	1	4	1	0	1	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau				
					Bukit Tinggi							
					Payakumbuh							
					Sawahlunto							
	Provinsi Bengkulu											

DATA TARGET PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2024

[illegible]

DATA TARGET PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
6	BTP Kelas I Semarang	4	4	7	11	2	3	2	3	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)			
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Emas (Jawa Tengah)						
		Surakarta		Cepu	Magelang							
				Purwokerto	KSN Borobudur							
				kebumen								
				klaten								
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman				Kulonprogo (Yogyakarta)				
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang		Tanjung Radeb		Banjarmasin (Kalimantan Selatan)		Syamsudin Noor (Kalsel)			
			Perkotaan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)			
			Palangkaraya		Martapura		Balikpapan (Kalimantan Timur)					
			Pontianak		Mempawah							
					Singawang							
					Sanggau							
					Muara Teweh							

DATA TARGET PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
7	BTP Kelas I Surabaya	2	5	9	8	1	4	0	3	12	20	0,38
	Provinsi Jawa Timur	Malang		Bojonegoro	Tuban	Tanjung Perak (Jawa Timur)			Juanda (Surabaya)			
		Gerbangkertosusila		Madiun	Pamekasan		Tuban (Jawa Timur)					
				Jember	Sumenep		Teluk Lamong (Jawa Timur)					
				Banyuwangi								
				Probolinggo								
				Blitar								
				Pasuruan								
				Tulungagung								
				Kediri								
	Provinsi Bali		Sarbagita		Singaraja				Ngurah Rai (Denpasar)			
					Negara							
	Papua Barat		Sorong		Manokwari		Sorong (Papua Barat)					
	Provinsi Papua		Jayapura		Sarmi		Jayapura (Papua)		Sentani (Papua)			
			Timika		Tanah Merah							
			Merauke									

DATA TARGET PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
8	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	1	5	2	5	1	2	0	1	4	13	0,2353
	Sulawesi Selatan	Mammasata		Pangkajene	Parepare	Garungkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)			
				Barru	Watampone							
					Bulukumba							
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)					
	Gorontalo		Gorontalo									
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso							
	Sulawesi Barat		Mamuju									
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka							
Target 2024		16	18	36	34	10	19	6	10	68	81	0,456
		Jumlah PKW/PKN/PSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030									149	

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN


Ir. HENGKI ANGKASAWAN
 NIP. 196701081993031001

Indikator Kinerja
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api
(Rate Of Accident)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP: +62 813-6001- 3838
JAKARTA 10110

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 012/ND/K53/DJKA/I/2025

Yth : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Plt. Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Data Kecelakaan Tahun 2024
Tanggal : 21 Januari 2025

Menindaklanjuti permohonan data dukung pelaporan Kinerja Triwulan ke IV Tahun 2024 oleh Ketua Kelompok Bidang Tata Usaha Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, bersama ini disampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2024 :

1. Rekapitulasi rincian data kecelakaan kereta api tahun 2024

NO	TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	LOKASI	KORBAN	TIM INVESTIGASI
1	5 Januari 2024	PT. KAI (PERSERO) Daop 2 Bandung	Tabrakan antar KA	Petak Jalan Cicalengka - Haurpugur	41	DJKA/KNKT
2	14 Januari 2024	PT. KAI (PERSERO) Daop 8 Surabaya	Anjlokkan	Emplasemen Stasiun Tanggulangin	0	DJKA/KNKT
3	19 Februari 2024	PT. KAI (PERSERO) Divre 1 Sumatera Utara	Anjlokkan	Km 35+100 Petak Jalan Dolokmerangir (DMR) - Siantar (SIR)	0	DJKA
4	13 April 2024	PT. KAI (PERSERO) Daop 1 Jakarta	Anjlokkan	Jalur Hulu Kampung Bandan - Rajawali KM 1+3/4 JPL 02A	0	DJKA
5	15 September 2024	PT. KAI (PERSERO) Daop 2 Bandung	Anjlokkan	KM 96+4/5 Petak Jalan Purwakarta - Cibungur	0	DJKA

2. Rekapitulasi data penyebab kecelakaan kereta api tahun 2024

NO	KEJADIAN	JUMLAH	PENYEBAB			
			SARANA	PRASARANA	SDM	MASIH DALAM ANALISIS
1	Tabrakan antar KA	1	0	1	0	0
2	Anjlokkan	4	1	3	0	0
3	Teguling	0	0	0	0	0
4	Terbakar	0	0	0	0	0
Total		5	1	4	0	0

3. Rekapitulasi jumlah korban kecelakaan kereta api tahun 2024

NO	KEJADIAN	JUMLAH	KORBAN		
			MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN
1	Tabrakan antar KA	1	4	4	33
2	Anjlokkan	4	0	0	0
3	Teguling	0	0	0	0
4	Terbakar	0	0	0	0
Total		5	4	4	33

Demikian disampaikan atas perkenan dan arahan lanjut ibu Direktur Keselamatan Perkeretaapian diucapkan terima kasih.


 Lucky Bindri Soegito
 NIP. 197707122002122001 

KM-KA JANUARI 2024

NO	DAOP	KOMERSIL	PENUMPANG							BARANG	DINAS		TOTAL
			EKONOMI						NON PSO		DR	DL	
			PSO										
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.422.722					1.422.722,152
	KCI (MER)				29.254								29.254,204
	KCI (BD)				91.567								91.566,969
	KCI (YK)					49.879		15.783					65.662,460
	KCI (SB)				183.465								183.465,246
	BANDARA YIA (RAILINK)	22.452			29.936								52.388,574
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412,480
	LRT JABODEBEK	198.909											198.908,770
2	DAOP1 JAK	255.081	9.655	14.482	0	0	0	0	46.358	86.030	11.303	37.372	460.281,589
3	DAOP2 BD	142.661	9.296	49.910	12.444	0	0	0	31.647	0	0	998	246.956,332
4	DAOP3 CN	559.067	26.309	1.260	0	0	0	0	124.424	151.037	0	567	862.662,995
5	DAOP4 SM	364.237	17.915	0	0	7.492	0	0	93.670	188.446	380	1.392	673.533,398
6	DAOP5 PWT	340.987	20.274	25.259	0	0	0	0	54.619	43.888	0	1.789	486.816,323
7	DAOP6 YK	304.639	25.160	0	0	8.528	4.546	0	47.404	35.566	557	973	427.371,768
8	DAOP7 MN	223.510	22.470	0	0	0	0	0	49.017	24.257	949	1.029	321.231,486
9	DAOP8 SB	165.252	14.791	5.886	0	0	0	0	41.334	111.451	2.161	3.713	344.587,941
10	DAOP9 JR	61.279	16.798	32.546	13.915	0	0	0	3.142	0	0	0	127.679,553
	JAWA	2.703.487	162.668	129.343	360.582	65.898	4.546	1.438.506	491.615	640.675	15.351	47.833	6.060.502,240
11	DIVRE I	51.381	0	32.442	7.999	0	9.722	0	7.999	57.122	0	3.848	170.513,009
	BANDARA KNM (RAILINK)	35.104											35.104,276
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.325	0	0	7.957	0	0	40.432,880
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	467.641	0	18.891	529.337,326
	LRT						65.228						65.227,500
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	535.041	0	123	580.927,291
	SUMATERA	105.368	0	102.129	34.149	0	81.275	0	7.999	1.067.762	0	22.862	1.421.542,282
	PT.KAI	2.808.854	162.668	231.472	394.731	65.898	85.821	1.438.506	499.613	1.708.436	15.351	70.695	7.482.044,522

KM-KA FEBRUARI 2024													
NO	DAOP	PENUMPANG							BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI							DR	DL		
			PSO					NON PSO					
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRĐ	PERINTIS		KRL				
1	KRL (JAK)							1.285.075				1.285.075,292	
	KCI (MER)				27.367							27.366,836	
	KCI (BD)				86.658							86.658,206	
	KCI (YK)					14.765		47.130				61.894,936	
	KCI (SB)				171.934							171.934,214	
	BANDARA YIA (RAILINK)	21.004			28.005							49.008,666	
	BANDARA BASOETA (KCI)	61.192										61.192,320	
	LRT JABODEBEK	190.381										190.380,960	
2	DAOP1 JAK	219.544	9.032	13.548	0	0	0	0	41.000	72.819	10.292	31.474	397.709,630
3	DAOP2 BD	124.891	8.749	46.952	11.641	0	0	0	27.634	0	0	868	220.734,951
4	DAOP3 CN	516.646	24.415	0	0	0	0	0	109.901	123.921	0	604	775.486,910
5	DAOP4 SM	334.266	16.760	0	0	6.767	0	0	83.321	153.394	356	1.301	596.164,187
6	DAOP5 PWT	318.026	18.974	23.539	0	0	0	0	46.685	40.295	0	1.705	449.224,279
7	DAOP6 YK	284.902	23.536	0	0	8.357	4.253	0	42.048	32.893	553	963	397.505,704
8	DAOP7 MN	208.850	20.811	0	0	0	0	0	43.853	21.055	888	927	296.384,168
9	DAOP8 SB	152.921	13.640	5.506	0	0	0	0	35.828	92.227	1.977	3.256	305.355,298
10	DAOP9 JR	56.589	15.223	30.446	13.017	0	0	0	0	0	0	0	115.275,116
	JAWA	2.489.212	151.141	119.991	338.623	29.889	4.253	1.332.205	430.270	536.603	14.067	41.098	5.487.351,673
11	DIVRE I	46.564	0	30.349	7.483	0	9.095	0	7.483	56.739	0	3.383	161.096,626
	BANDARA KNM (RAILINK)	32.839											32.839,484
12	DIVRE II	0	0	0	24.361	0	5.917	0	0	9.036	0	0	39.314,320
13	DIVRE III	17.664	0	22.379	0	0	0	0	0	419.679	0	18.886	478.608,182
	LRT						60.790						60.789,800
14	DIVRE IV	0	0	42.811	0	0	0	0	0	481.477	0	102	524.390,680
	SUMATERA	97.068	0	95.540	31.844	0	75.802	0	7.483	966.932	0	22.372	1.297.039,092
	PT.KAI	2.586.280	151.141	215.531	370.467	29.889	80.054	1.332.205	437.753	1.503.535	14.067	63.469	6.784.390,765

KM-KA MARET 2024

NO	DAOP	PENUMPANG												BARANG	DINAS		TOTAL
		ANTAR KOTA				PERKOTAAN				BANDARA					DR	DL	
		KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS	KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS	KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS				
1	DAOP1 JAK	230.514	44.314	23.826	-	10.634	-	-	-	-	-	-	-	71.329	11.077	33.634	425.328,234
2	DAOP2 BD	136.257	9.654	59.844	-	21.201	-	12.444	-	-	-	-	-	-	-	948	240.348,766
3	DAOP3 CN	565.308	118.737	25.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.209	-	598	841.107,179
4	DAOP4 SM	359.757	79.890	16.760	-	7.903	8.310	7.008	-	-	-	-	-	163.527	380	1.368	644.903,180
5	DAOP5 PWT	339.477	51.515	45.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.124	-	1.641	479.538,240
6	DAOP6 YK	301.171	45.955	25.160	-	5.047	-	-	4.546	-	-	8.934	-	35.439	617	1.097	427.966,264
7	DAOP7 MN	225.900	47.183	22.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.251	949	965	320.494,284
8	DAOP8 SB	163.137	38.548	19.903	-	2.134	-	-	-	-	-	-	-	101.059	2.152	3.591	330.524,093
9	DAOP9 JR	61.766	-	48.818	-	-	-	13.915	-	-	-	-	-	-	-	-	124.499,420
10	KRL (JAK)							1.373.054									1.373.054,426
11	KCI (MER)							29.254									29.254,204
12	KCI (BD)							92.635									92.634,634
13	KCI (YK)							65.662									65.662,460
14	KCI (SB)							183.792									183.791,746
15	BANDARA YIA (RAILINK)									22.452		29.936					52.388,574
16	BANDARA BASOETA (KCI)									65.412							65.412,480
17	LRT JABODEBEK					219.658											219.657,720
	JAWA	2.383.288	435.796	287.594	0	266.577	8.310	1.777.765	4.546	87.865	0	38.870	0	566.938	15.175	43.842	5.916.565,904
18	ESU/DIVRE I	50.311	-	32.442	-	-	7.999	7.999	9.722	-	-	-	-	54.626	-	3.513	166.611,930
19	ESB/DIVRE II	-	-	-	-	-	-	16.679	6.325	-	-	9.471	-	5.859	-	-	38.334,224
20	ESS/DIVRE III	18.273	-	23.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.266	-	19.397	515.249,577
21	ESS/DIVRE IV	-	-	45.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.146	-	111	563.019,546
22	BANDARA KNM (RAILINK)									35.104							35.104,276
23	LRT PALEMBANG								64.982								64.982,200
	SUMATERA	68.584	0	101.520	0	0	7.999	24.677	81.030	35.104	0	9.471	0	1.031.896	0	23.021	1.383.301,753
	PT.KA	2.451.872	435.796	389.113	0	266.577	16.309	1.802.442	85.575	122.969	0	48.342	0	1.598.834	15.175	66.863	7.299.867,657



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP. 19810516 200212 1 003

KM-KA APRIL 2024

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRD	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.314.807					1.314.807,410
	KCI (MER)				27.053								27.052,788
	KCI (BD)				89.646								89.646,420
	KCI (YK)					23.944		47.195					71.139,270
	KCI (SB)				177.863								177.862,980
	BANDARA YIA (RAILIN	25.953			28.971								54.923,505
	BANDARA BASOETA (	68.728											68.728,320
	LRT JABODEBEK	224.966											224.965,760
2	DAOP1 JAK	270.760	9.343	27.088	0	0	0	0	49.375	55.869	13.213	35.462	461.109,094
3	DAOP2 BD	151.287	9.051	61.782	12.043	0	0	0	37.878	0	0	1.317	273.357,919
4	DAOP3 CN	646.302	25.257	17.665	0	0	0	0	131.791	87.883	0	417	909.315,847
5	DAOP4 SM	413.904	17.337	4.196	0	7.250	0	0	98.879	116.524	368	1.487	659.945,382
6	DAOP5 PWT	381.789	19.629	45.021	0	0	0	0	62.195	38.269	0	1.429	548.332,300
7	DAOP6 YK	341.037	24.348	4.911	0	8.646	4.399	0	50.864	28.759	570	1.305	464.838,847
8	DAOP7 MN	250.591	21.529	1.244	0	0	0	0	51.784	18.767	918	1.105	345.938,103
9	DAOP8 SB	184.092	14.111	5.696	0	0	0	0	45.277	83.002	2.722	3.349	338.248,447
10	DAOP9 JR	74.551	15.748	31.496	13.466	0	0	0	2.469	0	0	0	137.729,281
	JAWA	3.033.960	156.353	199.098	349.042	39.840	4.399	1.362.003	530.511	429.073	17.792	45.871	6.167.941,673
11	DIVRE I	59.410	0	31.396	7.741	0	9.409	0	7.741	57.783	0	4.068	177.546,397
	BANDARA KNM (RAIL	33.972											33.971,880
12	DIVRE II	0	0	0	25.307	0	6.121	0	0	7.404	0	0	38.831,472
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	0	450.114	0	16.829	508.367,434
	LRT						63.600						63.599,600
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	0	515.629	0	82	559.997,622
	SUMATERA	111.655	0	98.834	33.047	0	79.129	0	7.741	1.030.929	0	20.979	1.382.314,405
	PT.KAI	3.145.615	156.353	297.933	382.089	39.840	83.528	1.362.003	538.252	1.460.002	17.792	66.850	7.550.256,078

KM-KA MEI 2024

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.336.394					1.336.393,648
	KCI (MER)				29.254								29.254,204
	KCI (BD)				92.635								92.634,634
	KCI (YK)					15.783		51.843					67.626,200
	KCI (SB)				183.792								183.791,746
	BANDARA YIA (RAILINK)	30.178			29.936								60.114,078
	BANDARA BASOETA (KCI)	67.919											67.918,676
	LRT JABODEBEK	242.926											242.925,620
2	DAOP1 JAK	245.015	9.655	14.482	0	0	0	0	43.828	73.233	11.412	34.455	432.080,341
3	DAOP2 BD	139.893	9.352	50.190	12.444	0	0	0	34.018	0	0	933	246.831,065
4	DAOP3 CN	572.008	26.099	0	0	0	0	0	117.480	126.848	0	656	843.091,410
5	DAOP4 SM	370.773	17.915	0	0	7.492	0	0	89.336	159.992	380	1.301	647.189,704
6	DAOP5 PWT	352.442	20.283	25.163	0	0	0	0	50.073	49.701	0	2.181	499.843,072
7	DAOP6 YK	319.734	25.160	0	0	8.934	4.546	0	45.124	43.103	797	1.454	448.851,047
8	DAOP7 MN	237.355	22.247	0	0	0	0	0	47.030	25.261	949	1.029	333.870,152
9	DAOP8 SB	167.654	14.581	5.886	0	0	0	0	38.644	101.532	2.139	3.556	333.991,854
10	DAOP9 JR	60.754	16.273	32.546	13.915	0	0	0	0	0	0	0	123.487,589
	JAWA	2.806.650	161.565	128.267	361.976	32.209	4.546	1.388.236	465.533	579.671	15.678	45.565	5.989.895,040
11	DIVRE I	50.014	0	32.442	7.999	0	9.722	0	7.999	61.614	0	3.397	173.187,107
	BANDARA KNM (RAILINK)	35.104											35.104,276
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.325	0	0	8.570	0	0	41.044,988
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	511.344	0	21.789	575.937,797
	LRT						64.982						64.982,200
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	540.519	0	127	586.409,454
	SUMATERA	104.000	0	102.129	34.149	0	81.030	0	7.999	1.122.047	0	25.313	1.476.665,822
	PT.KAI	2.910.650	161.565	230.395	396.125	32.209	85.575	1.388.236	473.531	1.701.718	15.678	70.878	7.466.560,862

KM-KA JUNI 2024

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRD	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.302.754					1.302.753,792
	KCI (MER)				28.311								28.310,520
	KCI (BD)				89.646								89.646,420
	KCI (YK)					16.420		52.235					68.655,378
	KCI (SB)				177.863								177.862,980
	BANDARA YIA (RAILINK)	29.293			28.971								58.263,176
	BANDARA BASOETA (KCI)	66.468											66.467,520
	LRT JABODEBEK	236.122											236.121,840
2	DAOP1 JAK	242.045	9.343	14.015	0	0	0	0	42.414	75.775	11.390	34.299	429.281,734
3	DAOP2 BD	138.406	9.051	48.571	12.043	0	0	0	32.803	0	0	898	241.771,728
4	DAOP3 CN	562.434	25.257	0	0	0	0	0	113.690	124.086	0	562	826.030,506
5	DAOP4 SM	360.171	17.337	0	0	7.250	0	0	86.454	158.540	368	1.259	631.380,048
6	DAOP5 PWT	347.886	19.629	24.351	0	0	0	0	48.295	45.538	0	1.980	487.678,890
7	DAOP6 YK	309.034	24.348	0	0	8.646	4.399	0	43.498	43.489	840	1.599	435.853,183
8	DAOP7 MN	225.084	21.529	0	0	0	0	0	45.365	22.208	918	914	316.018,956
9	DAOP8 SB	162.289	14.111	5.696	0	0	0	0	37.355	100.221	1.966	3.300	324.938,326
10	DAOP9 JR	62.740	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	0	0	0	123.449,560
	JAWA	2.741.972	156.353	124.129	350.299	32.315	4.399	1.354.989	449.875	569.858	15.483	44.812	5.844.484,557
11	DIVRE I	54.057	0	31.396	7.741	0	9.409	0	7.741	61.097	0	3.689	175.129,787
	BANDARA KNM (RAILINK)	33.972											33.971,880
12	DIVRE II	0	0	0	23.168	0	6.121	0	0	9.167	0	0	38.456,202
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	0	504.629	0	23.053	569.105,985
	LRT						61.481						61.481,100
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	0	516.090	0	123	560.499,825
	SUMATERA	106.302	0	98.834	30.909	0	77.011	0	7.741	1.090.983	0	26.865	1.438.644,779
	PT.KAI	2.848.274	156.353	222.963	381.208	32.315	81.410	1.354.989	457.615	1.660.841	15.483	71.677	7.283.129,336

JULI

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRD	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.346.626					1.346.626,173
	KCI (MER)				29.254								29.254,204
	KCI (BD)				92.635								92.634,634
	KCI (YK)					16.547		54.199					70.746,404
	KCI (SB)				183.792								183.791,746
	BANDARA YIA (RAILINK)	29.373			29.936								59.309,338
	BANDARA BASOETA (KCI)	72.572											72.571,680
	LRT JABODEBEK	252.605											252.605,040
2	DAOP1 JAK	245.576	9.655	14.482	0	0	0	0	43.828	76.063	11.460	34.944	436.008,194
3	DAOP2 BD	140.214	9.352	50.190	12.444	0	0	0	33.955	0	0	928	247.084,370
4	DAOP3 CN	571.554	26.099	0	0	0	0	0	117.480	135.062	0	702	850.897,497
5	DAOP4 SM	371.968	17.915	0	0	7.492	0	0	89.336	171.817	380	1.249	660.156,631
6	DAOP5 PWT	347.660	20.283	25.163	0	0	0	0	49.905	55.776	0	2.573	501.359,390
7	DAOP6 YK	314.286	25.160	0	0	8.934	4.546	0	44.948	49.228	857	1.674	449.632,213
8	DAOP7 MN	235.899	22.247	0	0	0	0	0	46.877	25.480	949	1.067	332.517,493
9	DAOP8 SB	168.079	14.581	5.886	0	0	0	0	38.600	107.738	2.079	3.547	340.508,674
10	DAOP9 JR	60.754	16.273	32.546	13.915	0	0	0	0	0	0	0	123.487,589
	JAWA	2.810.540	161.565	128.267	361.976	32.973	4.546	1.400.825	464.929	621.163	15.726	46.682	6.049.191,270
11	DIVRE I	55.901	0	32.442	20.412	0	5.307	0	0	64.072	0	3.753	181.887,702
	BANDARA KNM (RAILINK)	10.205			24.899								35.104,276
12	DIVRE II	0	0	0	25.539	0	6.499	0	0	9.196	0	0	41.234,274
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	523.758	0	24.568	591.130,677
	LRT						65.116						65.116,000
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	541.759	0	127	587.649,813
	SUMATERA	84.989	0	102.129	70.850	0	76.922	0	0	1.138.785	0	28.448	1.502.122,742
	PT.KAI	2.895.528	161.565	230.395	432.826	32.973	81.468	1.400.825	464.929	1.759.948	15.726	75.130	7.551.314,012

AGUSTUS

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRD	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)							1.343.449					1.343.449,194
	KCI (MER)				29.254								29.254,204
	KCI (BD)				92.635								92.634,634
	KCI (YK)					15.783		48.701					64.484,216
	KCI (SB)				183.792								183.791,746
	BANDARA YIA (RAILINK)	29.695			29.936								59.631,234
	BANDARA BASOETA (KCI)	69.708											69.708,000
	LRT JABODEBEK	258.934											258.933,860
2	DAOP1 JAK	245.736	9.655	14.482	0	0	0	0	39.001	75.815	10.864	34.389	429.941,647
3	DAOP2 BD	137.745	9.352	50.190	12.444	0	0	0	33.926	0	0	928	244.585,305
4	DAOP3 CN	571.804	26.099	0	0	0	0	0	104.397	132.797	0	646	835.742,293
5	DAOP4 SM	379.183	17.915	0	0	7.492	0	0	80.044	162.075	380	1.193	648.282,593
6	DAOP5 PWT	339.018	20.283	25.163	0	0	0	0	49.905	54.715	0	2.297	491.381,326
7	DAOP6 YK	310.453	25.160	0	0	8.934	4.546	0	44.948	47.296	827	1.599	443.762,906
8	DAOP7 MN	237.041	22.247	0	0	0	0	0	46.877	24.251	949	1.016	332.380,127
9	DAOP8 SB	166.425	14.581	5.886	0	0	0	0	38.600	106.013	2.095	3.474	337.073,305
10	DAOP9 JR	60.552	16.273	32.546	13.915	0	0	0	0	0	0	0	123.285,594
	JAWA	2.806.293	161.565	128.267	361.976	32.209	4.546	1.392.150	437.698	602.962	15.116	45.542	5.988.322,184
11	DIVRE I	56.734	0	32.442	20.412	0	4.622	0	0	62.898	0	3.460	180.568,934
	BANDARA KNM (RAILINK)	10.205				24.899							35.104,276
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.978	0	0	5.553	0	0	38.680,942
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	530.906	0	25.093	598.803,940
	LRT						65.517						65.517,400
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	538.602	0	127	584.492,325
	SUMATERA	85.821	0	102.129	46.562	24.899	77.118	0	0	1.137.959	0	28.680	1.503.167,817
	PT.KAI	2.892.114	161.565	230.395	408.539	57.108	81.664	1.392.150	437.698	1.740.921	15.116	74.222	7.491.490,001

SEPTEMBER

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL	
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL		
			PSO						NON PSO					
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KRD	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)							1.296.338					1.296.338,088	
	KCI (MER)				28.311								28.310,520	
	KCI (BD)				89.646								89.646,420	
	KCI (YK)					15.274		48.308					63.582,324	
	KCI (SB)				177.863								177.862,980	
	BANDARA YIA (RAILINK)	28.810			28.971								57.780,332	
	BANDARA BASOETA (KCI)	67.070											67.070,400	
	LRT JABODEBEK	249.855											249.854,720	
2	DAOP1 JAK	237.755	9.343	14.015	0	0	0	0	42.414	70.533	10.801	33.075	417.936,058	
3	DAOP2 BD	125.604	9.051	48.571	12.043	0	0	0	32.803	0	0	898	228.969,446	
4	DAOP3 CN	551.937	25.257	0	0	0	0	0	113.690	127.552	0	671	819.107,267	
5	DAOP4 SM	366.837	17.337	0	0	7.250	0	0	86.454	155.385	368	1.259	634.890,432	
6	DAOP5 PWT	320.444	19.629	24.351	0	0	0	0	48.295	53.550	0	2.446	468.713,498	
7	DAOP6 YK	299.091	24.348	0	0	8.646	4.399	0	43.498	44.824	600	1.476	426.882,469	
8	DAOP7 MN	229.058	21.529	0	0	0	0	0	45.365	22.867	918	1.003	320.740,465	
9	DAOP8 SB	164.395	14.111	5.696	0	0	0	0	37.355	100.824	2.042	3.342	327.764,483	
10	DAOP9 JR	74.288	15.748	31.496	13.466	0	0	0	0	0	0	0	134.998,020	
	JAWA	2.715.142	156.353	124.129	350.299	31.170	4.399	1.344.646	449.875	575.534	14.730	44.171	5.810.447,922	
11	DIVRE I	55.663	0	31.396	19.754	0	0	0	0	55.539	0	3.332	165.682,896	
	BANDARA KNM (RAILINK)	9.876				24.096								33.971,880
12	DIVRE II	0	0	0	25.307	0	6.513	0	0	7.870	0	0	39.690,110	
13	DIVRE III	18.273	0	23.151	0	0	0	0	0	495.302	0	21.782	558.507,421	
	LRT						62.752						62.752,200	
14	DIVRE IV	0	0	44.287	0	0	0	0	0	520.723	0	123	565.133,481	
	SUMATERA	83.812	0	98.834	45.060	24.096	69.266	0	0	1.079.434	0	25.236	1.425.737,988	
	PT.KAI	2.798.955	156.353	222.963	395.360	55.266	73.665	1.344.646	449.875	1.654.968	14.730	69.407	7.236.185,910	

**REALISASI KM KA
BULAN OKTOBER 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	2.523.214
	B. EKONOMI	859.024
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		3.382.238
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	29.178
	B. LOKAL EKONOMI	59.463
	C. KRL RAILINK	1.894.055
	D. LRT	327.374
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		2.310.070
3	KA BARANG	1.752.306
TOTAL KM-KA		7.444.614

7.444.614

**REALISASI KM KA
BULAN NOVEMBER 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	2.451.514
	B. EKONOMI	831.263
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		3.282.776
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	28.078
	B. LOKAL EKONOMI	69.985
	C. KRL RAILINK	1.815.492
	D. LRT	311.213
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		2.224.769
3	KA BARANG	1.654.200
TOTAL KM-KA		7.161.744

7.161.744

**REALISASI KM KA
BULAN DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH KM-KA
1	KA PENUMPANG ANTAR KOTA	
	A. NON EKONOMI	2.789.776
	B. EKONOMI	916.927
TOTAL KM-KA PENUMPANG ANTAR KOTA		3.706.703
2	KA PENUMPANG PERKOTAAN	
	A. LOKAL NON EKONOMI	29.090
	B. LOKAL EKONOMI	82.676
	C. KRL RAILINK	1.903.462
	D. LRT	323.824
TOTAL KM-KA PENUMPANG PERKOTAAN		2.339.052
3	KA BARANG	1.695.797
TOTAL KM-KA		7.741.552

7.741.552

Indikator Kinerja
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP)

Andil Keterlambatan Periode Januari – September 2024

<https://bit.ly/4asb69l>



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA
10110

TEL: 0813 6001 3838

WEBSITE: <http://dika.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0010 / K2.2 / 1 / 2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun
2024 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 10 Januari 2025

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0001/K2/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Gapeka

Capaian secara kumulatif hingga Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 95,6%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2024 sebesar 92,0%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Beroperasinya KA *Feeder Whoosh* yang belum diprogramkan di Gapeka 2023;
- 2) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 348 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
- 3) Penambahan frekuensi KA *Whoosh* yang pada tahap 4 diprogramkan sebanyak 40 KA, saat ini beroperasi sebanyak 48 KA;
- 4) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
- 5) Pengoperasian KA Tambahan pada masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

Terhadap butir 1) di atas, telah dilakukan penetapan Gapeka pada jaringan jalur kereta api Nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, dan Sumatera Bagian Selatan yang mulai diberlakukan mulai 1 Februari 2025.

2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu

Capaian secara kumulatif hingga Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 96,1%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2024 sebesar 90,5%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan meningkatnya OTP LRT Jabodebek selama Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 98,6%.

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan IV Tahun 2024 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP 198105162002121003

Tembusan:

Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

III. Capaian Kinerja Tahun 2024

A. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja (Posisi Bulan Desember 2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	437.327.000	437.327.000	435.786.993	99.6	1.540.007	0.4
2		Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu						

B. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi	Program			Realisasi				Capaian	
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi						
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif	
TW 1	1	Januari	88%	76.844	76.844	65.956	6.574	72.530	72.530	94.4%	94.4%	
	2	Februari	88%	71.852	148.696	60.665	6.053	66.718	139.248	92.9%	93.6%	
	3	Maret	88%	76.849	225.545	66.052	6.137	72.189	211.437	93.9%	93.7%	
TW 2	4	April	88%	74.414	299.959	65.346	6.105	71.451	282.888	96.0%	94.3%	
	5	Mei	88%	76.873	376.832	66.379	6.972	73.351	356.239	95.4%	94.5%	
	6	Juni	88%	74.401	451.233	64.451	6.865	71.316	427.555	95.9%	94.8%	
TW 3	7	Juli	92%	76.841	528.074	67.003	7.224	74.227	501.782	96.6%	95.0%	
	8	Agustus	92%	76.935	605.009	67.014	6.908	73.922	575.704	96.1%	95.2%	
	9	September	92%	74.435	679.444	64.460	6.616	71.076	646.780	95.5%	95.2%	
TW 4	10	Oktober	92%	76.902	756.346	67.325	7.209	74.534	721.314	96.9%	95.4%	
	11	November	92%	74.445	830.791	64.710	6.737	71.447	792.761	96.0%	95.4%	
	12	Desember	92%	77.002	907.793	68.169	6.982	75.151	867.912	97.6%	95.6%	

C. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	90.5%	72.530	72.530	5.998	63.975	69.973	69.973	5.571	61.025	66.596	66.596	68.285	68.285	94.1%	94.1%
	Februari	90.5%	66.718	139.248	5.516	58.651	64.167	134.140	5.042	55.245	60.287	126.883	62.227	130.512	93.3%	93.7%
	Maret	90.5%	72.189	211.437	5.582	64.939	70.521	204.661	5.045	62.802	67.847	194.730	69.184	199.696	95.8%	94.4%
TW 2	April	90.5%	71.451	282.888	5.487	63.247	68.734	273.395	5.278	60.610	65.888	260.618	67.311	267.007	94.2%	94.4%
	Mei	90.5%	73.351	356.239	6.417	65.597	72.014	345.409	6.226	63.960	70.186	330.804	71.100	338.107	96.9%	94.9%
	Juni	90.5%	71.316	427.555	6.265	63.493	69.758	415.167	6.022	62.302	68.324	399.128	69.041	407.148	96.8%	95.2%
TW 3	Juli	90.5%	74.227	501.782	6.773	65.886	72.659	487.826	6.548	64.557	71.105	470.233	71.882	479.030	96.8%	95.5%
	Agustus	90.5%	73.922	575.704	6.529	66.381	72.910	560.736	6.061	65.393	71.454	541.687	72.182	551.212	97.6%	95.7%
	September	90.5%	71.076	646.780	6.266	63.935	70.201	630.937	5.730	62.925	68.655	610.342	69.428	620.640	97.7%	96.0%
TW 4	Oktober	90.5%	74.534	721.314	6.888	65.548	73.436	704.373	5.222	65.449	71.671	682.013	72.554	693.193	97.3%	96.1%
	November	90.5%	71.447	792.761	6.408	64.022	70.430	774.803	5.430	61.646	67.076	749.089	68.753	761.946	96.2%	96.1%
	Desember	90.5%	75.151	867.912	6.741	67.483	74.224	849.027	5.160	65.327	71.487	820.576	72.855	834.801	96.9%	96.2%

Keterangan:

- : Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2024
- : Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan IV 2024



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP 198105162002121003

Indikator Kinerja
Pemenuhan Target Angkutan
Penumpang dan Barang **Kereta Api**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenuh.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 17/N0/K2.3/DJKA/2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Angkutan
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 17 Januari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: UM.0001/K2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 bersama ini kami sampaikan data dukung sebagai berikut:

1. Analisa keberhasilan capaian kinerja selama periode Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	1. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian telah melakukan sosialisasi/publikasi pada media sosial secara masif agar masyarakat kembali menggunakan transportasi kereta api; 2. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 86.280.347 penumpang dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.007.594 penumpang. Hal ini menandakan penumpang KRL Jabodetabek mulai kembali normal; 3. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1.686.951 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang; 4. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 6.402.038 penumpang dengan rata-rata Volume Penumpang penumpang weekday sebesar 83.272 penumpang; 5. Perpanjangan rute perjalanan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun; 6. Memberikan Layanan <i>Direct Train</i> yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan dua relasi yakni Gambir-Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP; 7. Beroperasinya Stasiun Kebasen sebagai Stasiun Naik Turun Penumpang KA.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	1. Realisasi Angkutan Barang Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 18.176.535 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan IV Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 1.485.116 Ton (5,9% dari volume Tahun 2023 sebesar 16.691.420 Ton). Namun bila dibandingkan dengan program yang ada di 2024, Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 108% dari target Triwulan IV sebesar 16.636.335 Ton. 2. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas;

2. Tindak lanjut/Realisasi yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi peningkatan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tindak lanjut/Realisasi dari Rekomendasi Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	1. Badan Usaha Penyelenggara Sarana terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial secara masif agar masyarakat menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda; 2. Perpanjangan rute perjalanan Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun pada tanggal 10 Desember 2024 sehingga meningkatkan jumlah volume penumpang dari dan menuju ke Stasiun Bandara Internasional Adi Soemarmo; 3. Mulai beroperasinya Stasiun Kebasen untuk melayani naik turun penumpang per tanggal 18 Desember 2024 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat di sekitar Stasiun Kebasen; 4. Memberikan Layanan <i>Direct Train</i> dalam mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk meningkatkan efektivitas waktu.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang.

3. Upaya peningkatan kinerja/rekomendasi peningkatan kinerja di periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja/Rekomendasi Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dan memberikan pelayanan yang tidak dimiliki pada angkutan barang moda transportasi darat.

4. Daftar Realisasi dan Progress NSPK Subdit Angkutan

No.	Nomor	Uraian
1	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
2.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
3.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2024	Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2024
4.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian
5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis
6.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2024	Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

No.	Nomor	Uraian
7.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2024	Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
9.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 165 Tahun 2024	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
10.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 178 Tahun 2024	Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2025
11.	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 103 Tahun 2024	Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 147 Tahun 2023 Tentang Tarif Promo Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


 Aditya Karsa
NIP 198609022008121001 

Lampiran Nota Dinas.

Nomor: 17/NO/K2.3/DJKA/2025

Tanggal: 17 Januari 2025

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN IV TA. 2024

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

a. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2024												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	343.958	333.559	324.411	356.894	355.678	354.473	366.042	359.921	349.754	357.532	351.751	381.793	4.235.766
KA Ekonomi Jarak Sedang	545.818	531.520	505.283	589.523	581.209	574.528	583.498	557.730	557.770	578.462	564.224	615.643	6.785.208
KA Ekonomi Jarak Dekat	391.335	375.867	335.283	442.796	420.691	397.866	416.578	335.710	351.421	366.138	370.441	435.013	4.639.139
KRD Ekonomi	55.015	59.640	49.958	68.155	67.243	52.651	60.735	48.572	51.928	55.750	55.216	113.705	738.568
KA Ekonomi Lebaran	-	-	2.596	109.865	-	-	-	-	-	-	-	-	112.461
TOTAL	1.336.126	1.300.586	1.217.531	1.567.233	1.424.821	1.379.518	1.426.853	1.301.933	1.310.873	1.357.882	1.341.632	1.546.154	16.511.142
	Triwulan I		3.854.243	Triwulan II		8.225.815	Triwulan III		12.265.474	Triwulan IV		16.511.142	-

b. KA Komersial

KERETA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Eksekutif	948.135	954.246	838.998	1.313.826	1.042.646	1.117.387	1.176.864	1.028.623	1.011.733	982.431	972.388	1.173.449	12.560.726
Bisnis	144.176	138.589	120.600	215.214	153.274	165.919	170.592	143.137	133.237	130.087	103.259	126.058	1.744.142
Ekonomi	1.423.055	1.413.169	1.210.281	2.158.968	1.596.390	1.759.772	1.798.343	1.514.383	1.513.883	1.506.612	1.515.286	1.980.725	19.390.867
Lokal Eksekutif	27.354	28.502	25.166	44.064	36.939	38.618	37.888	30.794	32.144	29.044	31.114	41.749	403.376
Lokal Bisnis	-	-	-	-	-	-	1.210	10.743	10.758	11.285	10.987	15.140	60.123
Lokal Ekonomi	89.337	85.913	78.870	117.984	113.758	110.224	112.319	82.574	83.407	83.430	106.621	107.460	1.171.897
Priority	8.928	7.553	6.511	17.886	11.181	14.664	16.910	11.059	11.294	10.141	10.526	15.919	142.572
TOTAL	2.640.985	2.627.972	2.280.426	3.867.942	2.954.188	3.206.584	3.314.126	2.821.313	2.796.456	2.753.030	2.750.181	3.460.500	35.473.703
	Triwulan I		7.549.383	Triwulan II		17.578.097	Triwulan III		26.509.992	Triwulan IV		35.473.703	-

c. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	323.935	295.087	289.600	423.579	353.112	337.977	376.200	377.499	361.877	388.746	384.692	437.913	4.350.217
Cut Meutia	5.319	10.190	5.461	8.410	7.941	8.806	3.781	1.814	-	-	-	1.128	52.850
Lembah Anai	7.998	7.809	8.480	11.667	11.103	10.927	11.360	8.644	9.337	9.519	10.003	11.454	118.301
Bathara Kresna	9.793	10.282	7.482	10.526	12.217	12.450	13.088	7.281	8.765	9.909	10.605	13.790	126.188
Makassar-Parepare	22.040	20.053	17.959	22.276	27.630	26.948	27.173	18.881	23.433	25.862	25.914	22.370	280.539
Jumlah	369.085	343.421	328.982	476.458	412.003	397.108	431.602	414.119	403.412	434.036	431.214	486.655	4.928.095
	Triwulan I		1.041.488	Triwulan II		2.327.057	Triwulan III		3.576.190	Triwulan IV		4.928.095	-

2. PT Kereta Commuter Indonesia (Persero)

a. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2024												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	26.848.194	24.616.724	26.011.988	25.543.059	27.056.711	26.739.475	29.240.516	28.209.145	27.607.764	29.933.224	27.522.242	28.824.881	328.153.923
KRL Yogyakarta	559.467	587.185	536.071	687.469	701.024	693.098	783.102	626.510	679.850	659.764	681.244	771.917	7.966.701
KA Lokal Wilayah I	338.179	335.257	306.553	378.442	372.973	374.871	377.558	334.784	343.618	347.052	358.232	401.635	4.269.154
KA Lokal Wilayah II	1.161.934	1.190.676	1.219.426	1.496.058	1.352.752	1.338.171	1.472.981	1.256.145	1.314.746	1.362.082	1.366.972	1.627.515	16.159.458
KA Lokal Wilayah VI	68.943	71.225	65.207	100.019	84.337	86.271	95.595	73.280	76.179	71.038	74.817	94.571	961.482
KA Lokal Wilayah VII	1.158.466	1.171.114	1.103.179	1.203.229	1.267.675	1.241.904	1.261.172	1.171.096	1.167.604	1.278.009	1.283.099	1.424.506	14.731.053
TOTAL	30.135.183	27.972.181	29.242.424	29.408.276	30.835.472	30.473.790	33.230.924	31.670.960	31.189.761	33.651.169	31.286.606	33.145.025	372.241.771
	Triwulan I		87.349.788	Triwulan II		178.067.326	Triwulan III		274.158.971	Triwulan IV		372.241.771	-

b. KA Komersial

KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2024												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Bandara Soetta (SHIA)	183.586	171.600	169.746	205.711	185.039	182.914	192.700	193.737	212.641	186.410	174.336	184.116	2.242.536
TOTAL	183.586	171.600	169.746	205.711	185.039	182.914	192.700	193.737	212.641	186.410	174.336	184.116	2.242.536
	Triwulan I		524.932	Triwulan II		1.098.596	Triwulan III		1.697.674	Triwulan IV		2.242.536	-

Ket.

Tahun 2023 KA Bandara Soetta (SHIA) dikelola oleh PT. KCI.

3. KA Railink

a. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA PSO	145.210	138.530	137.091	166.420	141.835	148.678	169.013	151.394	146.419	140.086	134.408	167.565	1.786.649
KA Srilawangsa K3 Premium (MDN - BIJ - KBG)	170.173	176.440	165.450	181.735	180.603	180.838	178.959	158.264	174.397	184.496	180.825	215.438	2.147.618
KA Srilawangsa Woojin (MDN - BIJ)	8.833	8.816	9.340	9.723	9.820	8.959	9.056	9.655	10.344	11.249	10.011	10.497	116.303
KA Srilawangsa (MDN - ARB)	30.776	30.826	27.862	32.159	31.466	30.902	68.011	61.121	69.314	70.463	71.167	93.454	617.521
Jumlah	354.992	354.612	339.743	390.037	363.724	369.377	425.039	380.434	400.474	406.294	396.411	486.954	4.668.091
	Triwulan I		1.049.347	Triwulan II		2.172.485	Triwulan III		3.378.432	Triwulan IV		4.668.091	-

b. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Kualanamu	19.300	18.623	16.954	21.891	19.747	18.812							115.327
KA YIA Ekspres	60.454	58.467	51.172	85.712	81.038	83.749	92.767	85.296	84.548	82.108	79.512	99.319	944.142
KA Srilawangsa (MDN - ARB - KNO)	19.642	19.478	18.845	21.986	21.273	19.935	43.115	42.102	44.525	42.890	41.828	44.575	380.194
Jumlah	99.396	96.568	86.971	129.589	122.058	122.496	135.882	127.398	129.073	124.998	121.340	143.894	1.439.663
	Triwulan I		282.935	Triwulan II		657.078	Triwulan III		1.049.431	Triwulan IV		1.439.663	-

Ket.

Untuk KA Srilawangsa pada lintas/relasi MDN-ARB-KNM, terdapat 2 jenis kombinasi layanan yaitu PSO dan Komersial, namun demikian penjualan tetap sebagai satu KA yang sama yaitu KA Srilawangsa.

KA Srilawangsa dengan relasi MDN-ARB dan ARB-KNM adalah penumpang yang sama dikarenakan menggunakan KA yg sama.

- KA Srilawangsa Relasi Medan - Araskabu: PSO

- KA Srilawangsa Relasi Araskabu - Kualanamu: Komersial

4. MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT Jakarta	3.164.345	2.868.163	2.920.796	2.768.974	3.340.971	3.539.619	3.868.155	3.740.153	3.557.530	3.865.574	3.563.874	3.623.267	40.821.421
Jumlah	3.164.345	2.868.163	2.920.796	2.768.974	3.340.971	3.539.619	3.868.155	3.740.153	3.557.530	3.865.574	3.563.874	3.623.267	40.821.421
	Triwulan I		8.953.304	Triwulan II		18.602.868	Triwulan III		29.768.706	Triwulan IV		40.821.421	-

5. LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	96.837	91.461	91.595	88.899	96.550	102.707	134.894	129.080	96.628	101.848	92.855	103.329	1.226.683
Jumlah	96.837	91.461	91.595	88.899	96.550	102.707	134.894	129.080	96.628	101.848	92.855	103.329	1.226.683
	Triwulan I		279.893	Triwulan II		568.049	Triwulan III		928.651	Triwulan IV		1.226.683	-

6. LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	1.200.399	1.261.110	1.380.043	1.402.933	1.704.223	1.736.940	2.027.272	1.987.817	1.953.095	2.204.785	2.033.138	2.164.115	21.055.870
Jumlah	1.200.399	1.261.110	1.380.043	1.402.933	1.704.223	1.736.940	2.027.272	1.987.817	1.953.095	2.204.785	2.033.138	2.164.115	21.055.870
	Triwulan I		3.841.552	Triwulan II		8.685.648	Triwulan III		14.653.832	Triwulan IV		21.055.870	-

7. Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KCJB	376.314	412.445	373.329	401.399	511.168	536.548	617.612	553.589	533.685	515.974	546.781	624.196	6.003.040
Jumlah	376.314	412.445	373.329	401.399	511.168	536.548	617.612	553.589	533.685	515.974	546.781	624.196	6.003.040
	Triwulan I		1.162.088	Triwulan II		2.611.203	Triwulan III		4.316.089	Triwulan IV		6.003.040	-

8. Jumlah Penumpang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2024

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	39.957.248	37.500.119	38.431.586	40.707.451	41.950.217	42.047.601	45.805.059	43.320.533	42.583.628	45.602.000	42.738.368	45.968.205
Jumlah	Triwulan I		115.888.953	Triwulan II		240.594.222	Triwulan III		372.303.442	Triwulan IV		506.612.015

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN IV TA. 2024

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	144.729	131.357	141.220	399.378	157.400	152.130	145.928	455.458	160.613	156.133	148.826	465.573	151.958	141.256	141.860	435.073
2	PUPUK	690	1.020	1.170	3.210	690	3.240	4.080	8.010	4.050	2.790	900	7.740	630	2130	2.790	5.550
3	SEMEN	127.384	91.040	90.122	268.282	74.240	117.240	100.760	292.240	129.000	114.080	122.240	365.320	121.160	96.720	85.887	303.767
4	BATUBARA	31.716	2.880	0	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO, PULP, KAYU, LATEX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	403.783	383.739	444.152	1.195.560	317.006	415.251	425.049	1.157.306	428.027	418.044	403.275	1.249.346	445.088	468.967	475.971	1.390.026
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN, BHP)	14.848	13.077	14.200	39.763	10.941	13.682	13.186	37.809	16.115	16.830	14.882	47.828	15.721	19.527	18.138	53.386
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	13.157	9.912	42.440	61.814	12.730	41.381	46.809	100.920	26.065	27.675	14.317	68.057	33.774	27.649	23.528	84.951
TOTAL		736.307	693.025	695.094	2.102.636	573.006	765.825	735.012	2.051.744	763.871	735.852	704.411	2.203.864	768.330	756.249	748.174	2.272.753

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	65.087	59.280	62.275	186.643	67.593	64.310	62.377	194.281	68.679	67.400	66.998	203.077	66.987	125.895	71.490	264.373
2	PUPUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SEMEN	136.150	122.280	113.320	371.750	86.780	148.730	148.480	383.990	161.910	116.653	125.996	404.559	116.181	75.916	98.337	290.434
4	BATUBARA	4.460.695	3.932.407	4.308.747	12.701.849	4.348.337	4.889.782	4.750.549	13.988.667	4.977.259	5.037.601	4.794.863	14.809.723	5.079.442	4.767.228	4.944.557	14.791.227
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO, PULP, KAYU, LATEX)	52.155	47.411	55.150	154.716	49.085	62.063	62.021	173.168	64.692	60.283	55.980	180.955	58.420	58.332	54.077	170.829
6	PETIKEMAS	48.860	52.800	61.520	163.180	55.240	71.020	56.400	182.660	60.900	62.880	52.880	176.660	50.004	32.407	29.672	112.083
7	KARET & KLINKER	54.600	48.600	29.400	132.600	81.000	54.575	66.000	201.575	54.600	23.500	58.800	136.900	91.175	88.800	74.975	254.950
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN, BHP)	328	305	366	998	341	317	312	970	389	382	366	1.137	385	361	352	1.098
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	4.265	6.675	5.025	15.965	15.070	17.870	15.055	47.995	13.190	23.475	15.555	52.220	14.125	2.367	2.298	18.790
TOTAL		736.307	682.141	626.758	4.635.803	13.727.703	4.703.945	5.508.667	5.161.194	5.101.619	5.392.174	5.171.438	15.965.231	5.476.718	5.151.306	5.276.759	15.903.783

3. Jumlah Barang terangkut sampai dengan Triwulan IV TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV
1	BBM	191.888	190.638	203.495	603.949	224.993	216.440	208.306	649.739	229.293	223.534	215.824	668.650	218.945	267.151	213.350	699.446
2	PUPUK	1.020	1.020	1.170	2.880	690	3.240	4.080	8.010	4.050	2.790	900	7.740	630	2.130	2.790	5.550
3	SEMEN	223.270	213.320	203.442	680.296	161.020	265.970	249.240	676.230	290.910	230.733	248.236	769.879	237.341	172.636	184.224	594.201
4	BATUBARA	4.463.575	3.935.287	4.308.747	12.736.445	4.348.337	4.889.782	4.750.549	13.988.667	4.977.259	5.037.601	4.794.863	14.809.723	5.079.442	4.767.228	4.944.557	14.791.227
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO, PULP, KAYU, LATEX)	52.155	47.411	55.150	154.716	49.085	62.063	62.021	173.168	64.692	60.283	55.980	180.955	58.420	58.332	54.077	170.829
6	PETIKEMAS	416.529	436.539	505.672	1.394.854	372.246	486.271	481.449	1.339.966	488.927	480.924	456.155	1.426.006	495.092	501.374	505.643	1.502.108
7	KARET & KLINKER	54.600	48.600	29.400	132.600	81.000	54.575	66.000	201.575	54.600	23.500	58.800	136.900	91.175	88.800	74.975	254.950
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN, BHP)	12.814	13.381	14.566	43.123	11.282	13.999	13.498	38.779	16.504	17.212	15.249	48.964	16.105	19.888	18.490	54.483
9	LAINNYA (BANK INDONESIA, BEA KLB, ANGKUTAN DINAS, ANGKUTAN SATKER, MOTIS, BEA LANGSIR)	13.727	16.587	47.465	81.474	27.800	59.251	61.864	148.915	39.255	51.150	29.872	120.277	47.899	30.016	25.826	103.741
TOTAL		5.558.447	4.902.782	5.369.107	15.830.337	5.276.452	6.051.592	5.897.006	17.225.050	6.165.490	5.127.726	5.875.879	18.169.095	6.245.048	5.907.555	6.023.933	18.176.536


 Aditya Karsa
 NIP 198609022008121001

Indikator Kinerja
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai
Dengan TQI

FORMULASI INDIKATOR PROSENTASE KONDISI JALUR KERETA API YANG SESUAI TRACK QUALITY INDEX (TQI) MENUJU KECEPATAN MINIMUM

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur 2024 periode III (Km'Jalur)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam	5.935,241	5.935,212	5.639,950	95,02
		Kondisi : Nyaman				
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam				
		Kondisi : Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam			295,262	4,97
		Kondisi : waspada				
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam				
		kondisi : Bahaya				

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN


Ir. HENGKI ANGKASAWAN
 NIP. 196701081993031001

Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan
Publik Bidang Perkeretaapian

IKM Periode Januari – September 2024

<https://bit.ly/3E7aV7S>

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK September 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Agustus 2024

IKM/ IPK

Survei IKM-IPK Juli 2024

<>1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.86/17.50

90.63/1003.63/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.29/17.50

93.08/1003.72/4

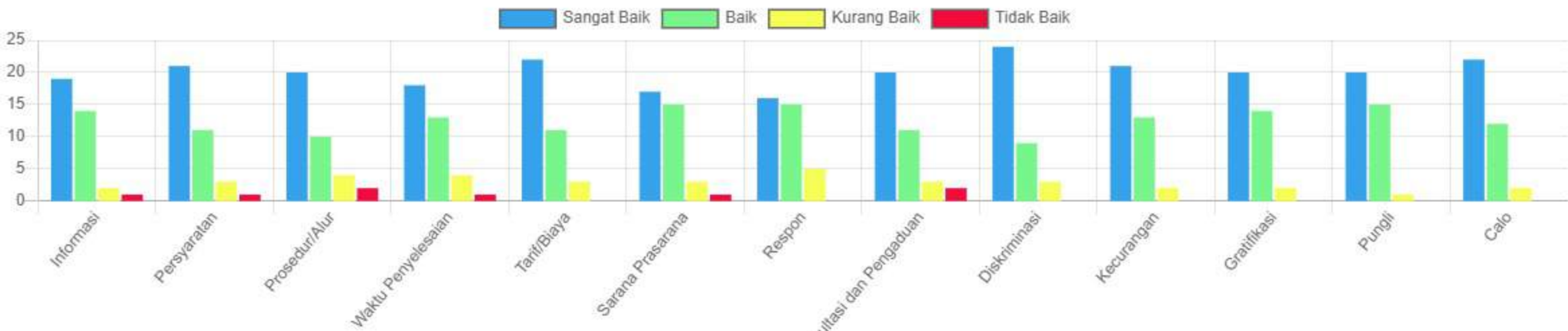


Responden

36

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

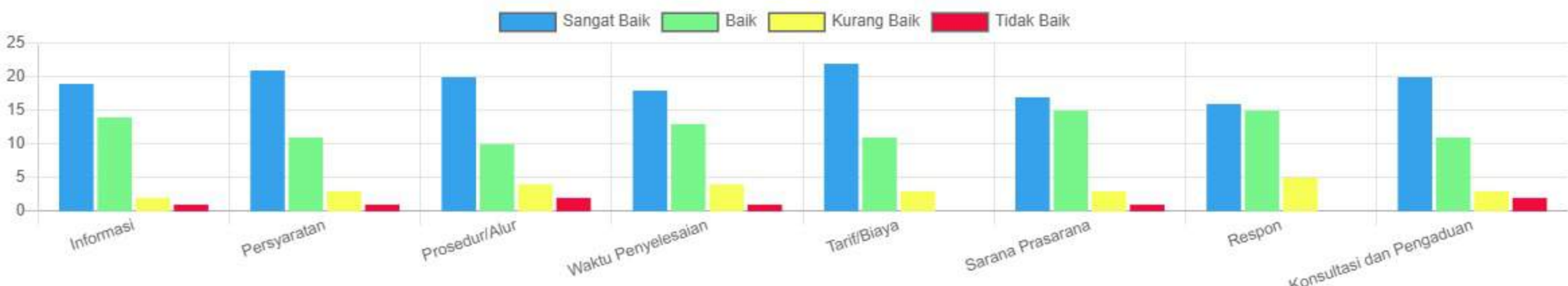
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.86/17.5090.63/1003.63/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus NasionalLokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ WilayahLokus Provinsi/ Wilayah



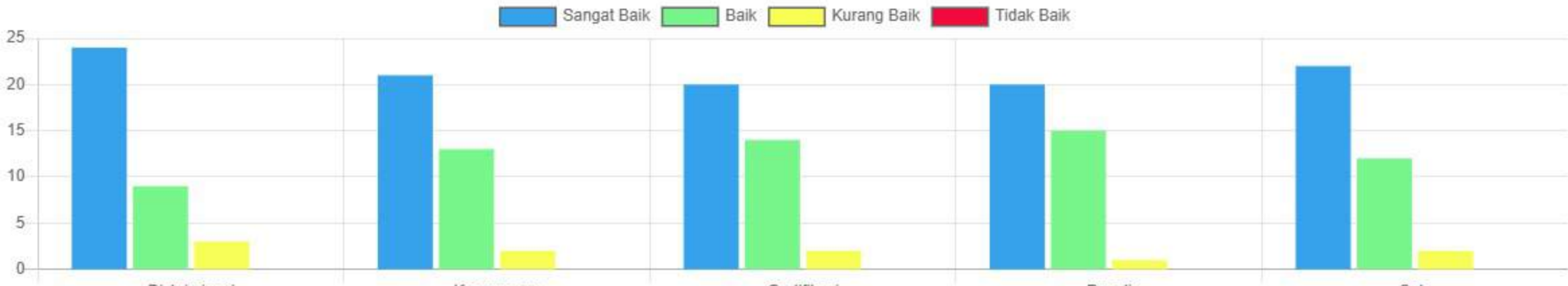
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Jn Unit Kerj Provin Wilaya
	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks
Informasi	15.82	16.74	-0.92	16.94	-1.12
Persyaratan	16.04	16.78	-0.74	17.01	-0.97
Prosedur/Alur	15.75	16.77	-1.02	16.92	-1.17
Waktu Penyelesaian	15.75	16.74	-0.99	16.59	-0.84
Tarif/Biaya	16.26	16.75	-0.49	17.09	-0.83
Sarana Prasarana	15.75	16.66	-0.91	16.92	-1.17
Respon	15.68	16.73	-1.05	16.89	-1.21
Konsultasi dan Pengaduan	15.82	16.71	-0.89	16.94	-1.12

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.29/17.5093.08/1003.72/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus NasionalLokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ WilayahLokus Provinsi/ Wilayah



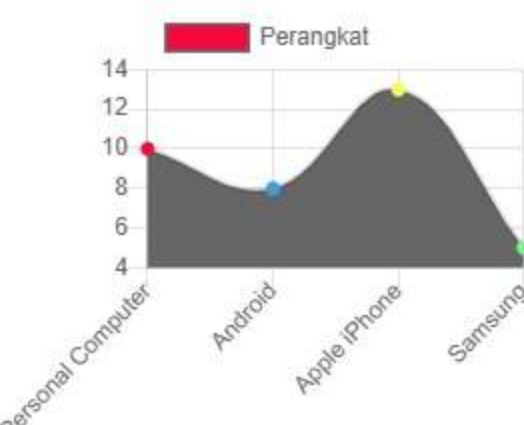
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks
Diskriminasi	16.41	16.84	-0.43	17.14	-0.73
Kecurangan	16.26	16.86	-0.60	17.09	-0.83
Gratifikasi	16.19	16.86	-0.67	17.06	-0.87
Pungli	16.26	16.90	-0.64	17.09	-0.83
Calo	16.33	16.85	-0.52	17.11	-0.78

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

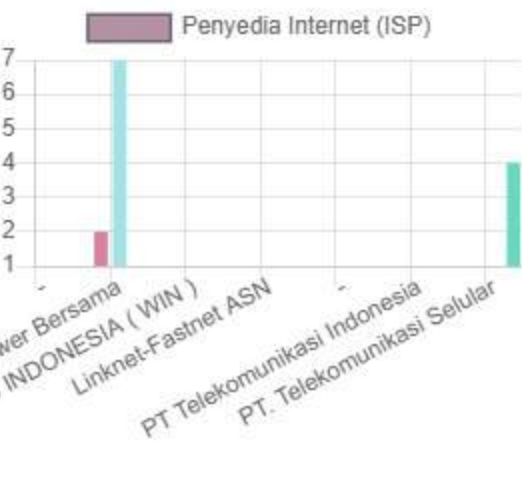
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

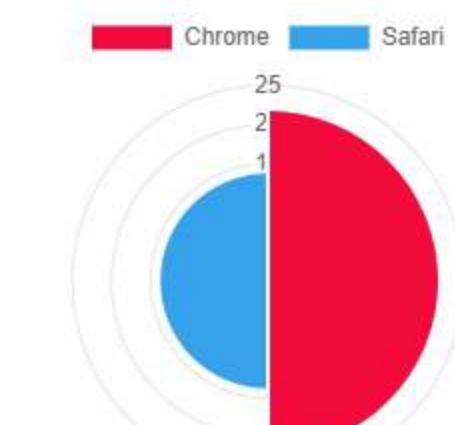
PERANGKAT



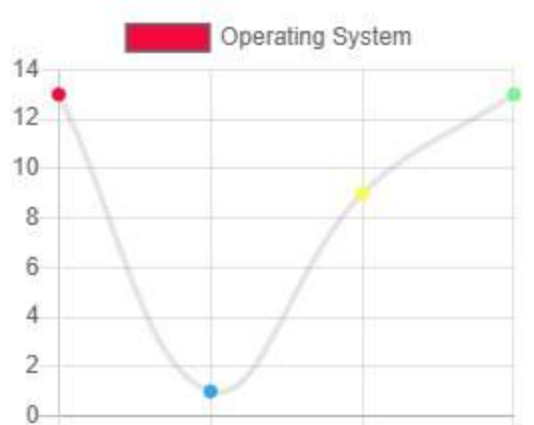
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

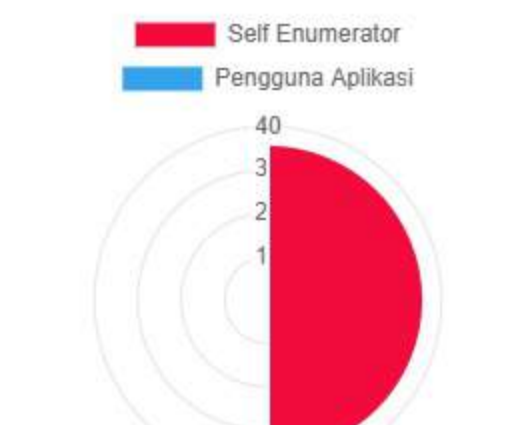


OPERATING SYSTEM

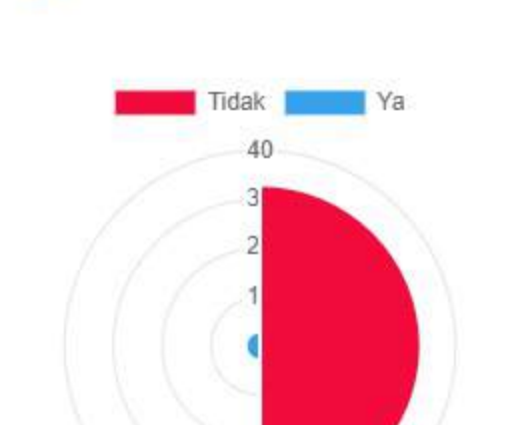


PROFIL RESPONDEN

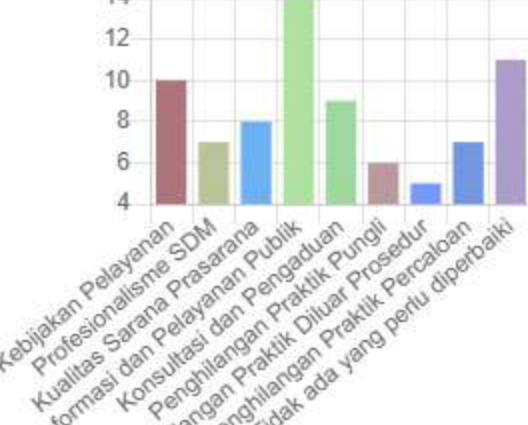
PENCACAHAN



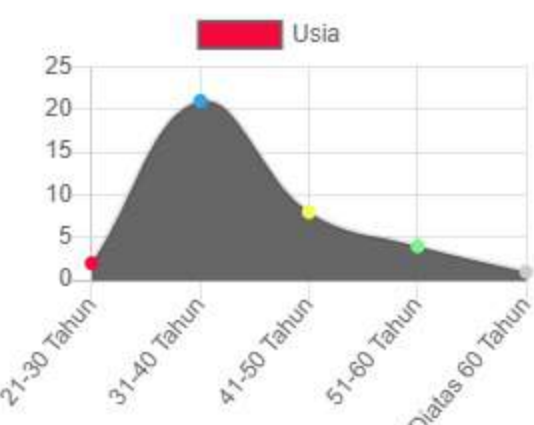
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



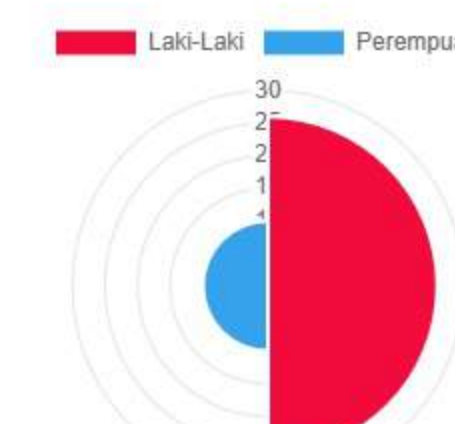
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

- Laman
- Survei
- Lokasi

- Laman
- Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Lokasi

Laman

Survei

Copy

Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.63/17.50

95/1003.80/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/1004/4

Responden

3

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

IKM/ IPK

Copy

Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.63/17.50

95/1003.80/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/1004/4

Responden

3

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

IKM/ IPK

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Informasi

Konsultasi dan Pengaduan

Respon

Sarana Prasarana

Tarif/Biaya

Waktu Penyelesaian

Prosedur/Alur

Persyaratan

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah			
Informasi	17.50	16.72	0.78	17.03	0.47	16.83	0.67	17.03
Persyaratan	17.50	16.77	0.73	16.95	0.55	16.92	0.58	16.95
Prosedur/Alur	15.75	16.83	-1.08	16.68	-0.93	16.90	-1.15	16.68
Waktu Penyelesaian	17.50	16.78	0.72	16.96	0.54	16.83	0.67	16.96
Tarif/Biaya	17.50	16.79	0.71	17.10	0.40	16.70	0.80	17.10
Sarana Prasarana	15.75	16.71	-0.96	16.58	-0.83	16.90	-1.15	16.58
Respon	15.75	16.80	-1.05	16.50	-0.75	16.67	-0.92	16.50
Konsultasi dan Pengaduan	15.75	16.76	-1.01	16.50	-0.75	16.79	-1.04	16.50

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Copy

Share Infografis

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100

4/4

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

Diskriminasi

Kecurangan

Gratifikasi

Pungli

Calo

UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus

Wilayah Bebas dari Korupsi

Lokus Nasional

Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)

Lokus Provinsi/ Wilayah

Diskriminasi

Calo

Pungli

Gratifikasi

Kecurangan

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional	Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)	Lokus Provinsi/ Wilayah	Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah			
Diskriminasi	17.50	16.90	0.60	17.21	0.29	17.12	0.38	17.21
Kecurangan	17.50	16.86	0.64	17.10	0.40	17.06	0.44	17.10
Gratifikasi	17.50	16.93	0.57	17.15	0.35	17.10	0.40	17.15
Pungli	17.50	16.94	0.56	17.28	0.22	17.12	0.38	17.28
Calo	17.50	16.92	0.58	17.20	0.30	16.98	0.52	17.20

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

Android

Apple iPhone

PENYEDIA INTERNET (ISP)

PT Telekomunikasi Indonesia

PT Excelcomindo Pratama (Network Access Prc)

PT. Telekomunikasi Selular

BROWSER

Chrome

Safari

OPERATING SYSTEM

Android

iOS

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

Self Enumerator

Pengguna Aplikasi

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

Ya

Tidak

PERBAIKAN

Tidak ada yang perlu diperbaiki

USIA

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

JENIS KELAMIN

Perempuan

Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy, © 2020 - 2025 Kementerian Perhubungan.

Ver. 7.2.0

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK September 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2024
- IKM/ IPK
Survei IKM-IPK Juli 2024

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.46/17.50

99.77/1003.99/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

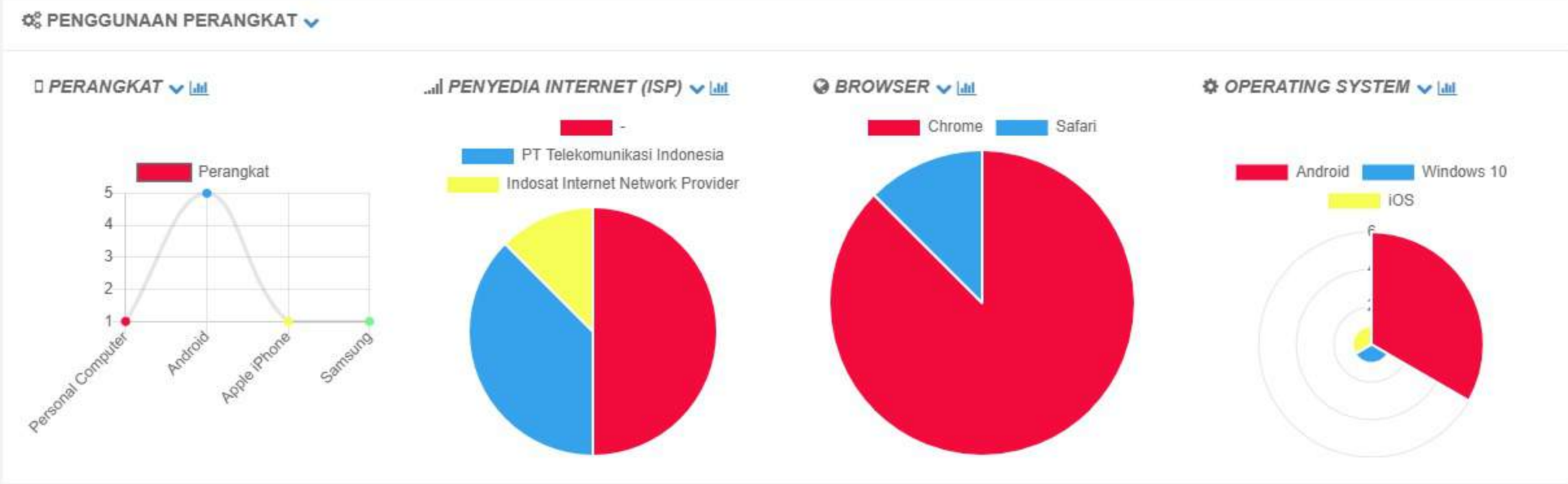
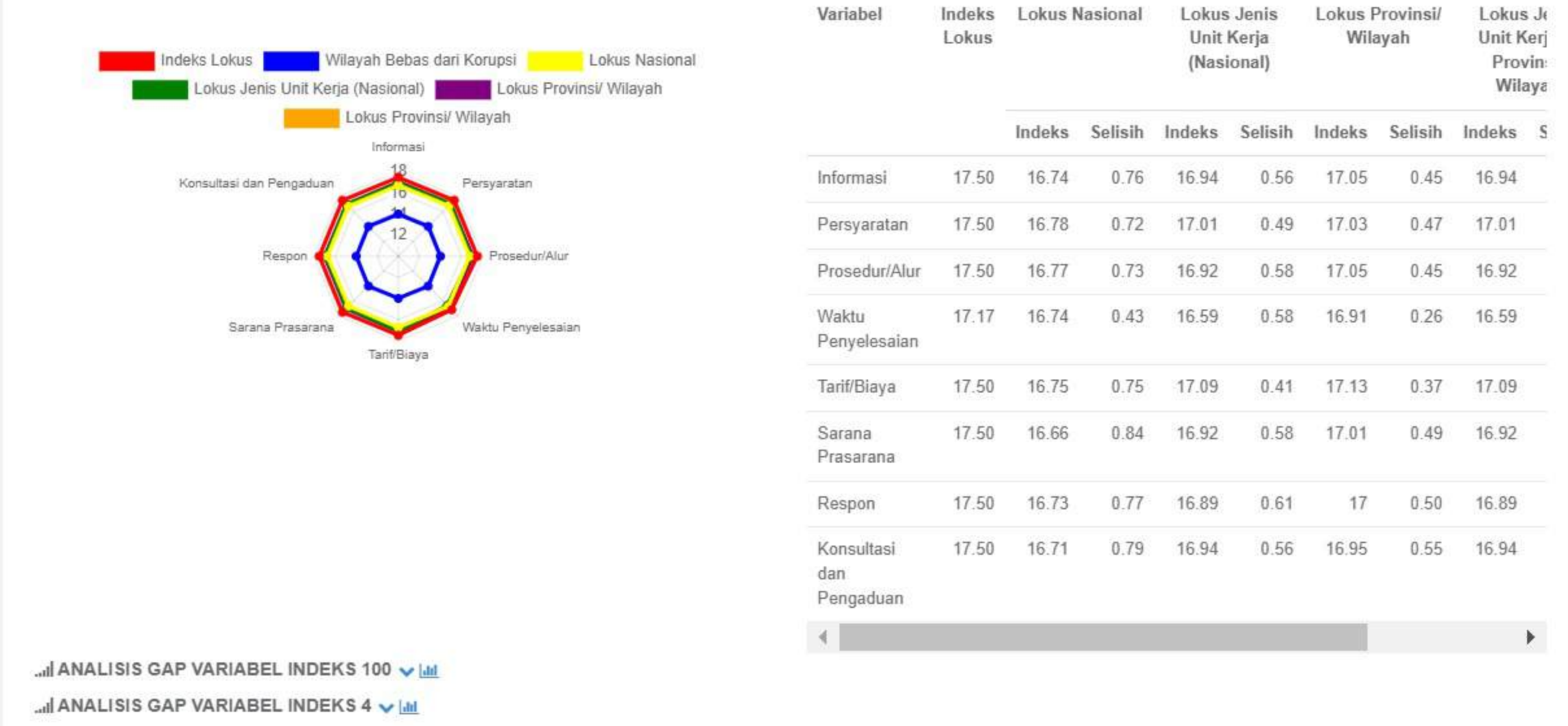
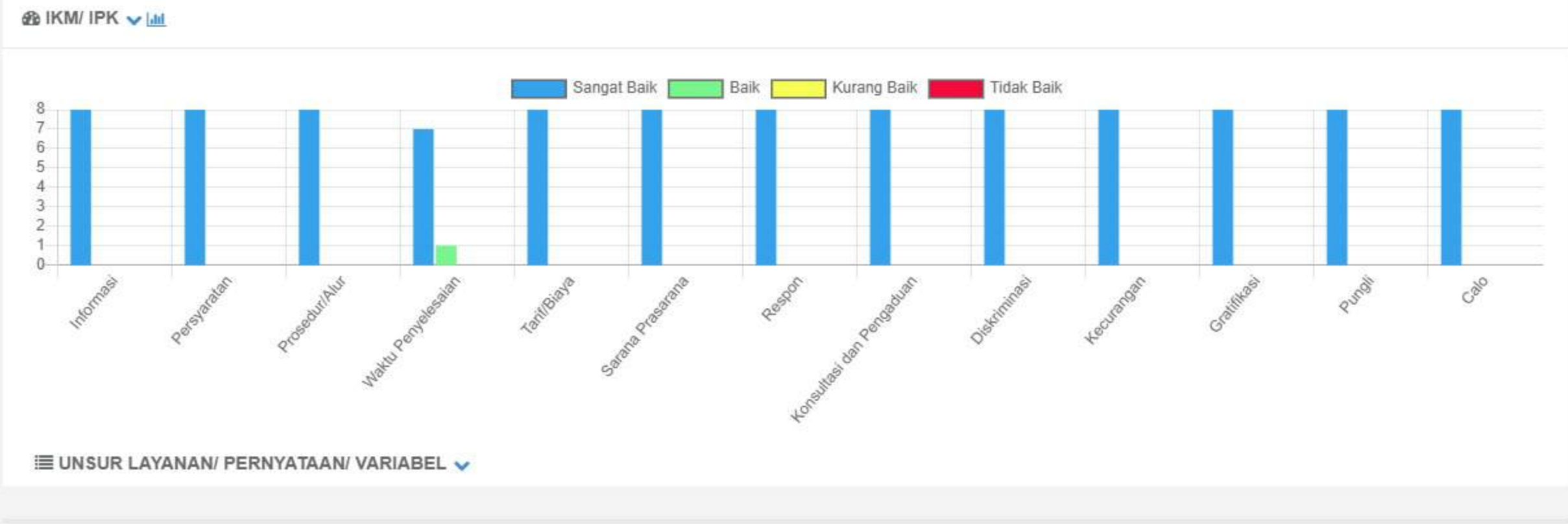
17.50/17.50

100/1004/4

Responden

8

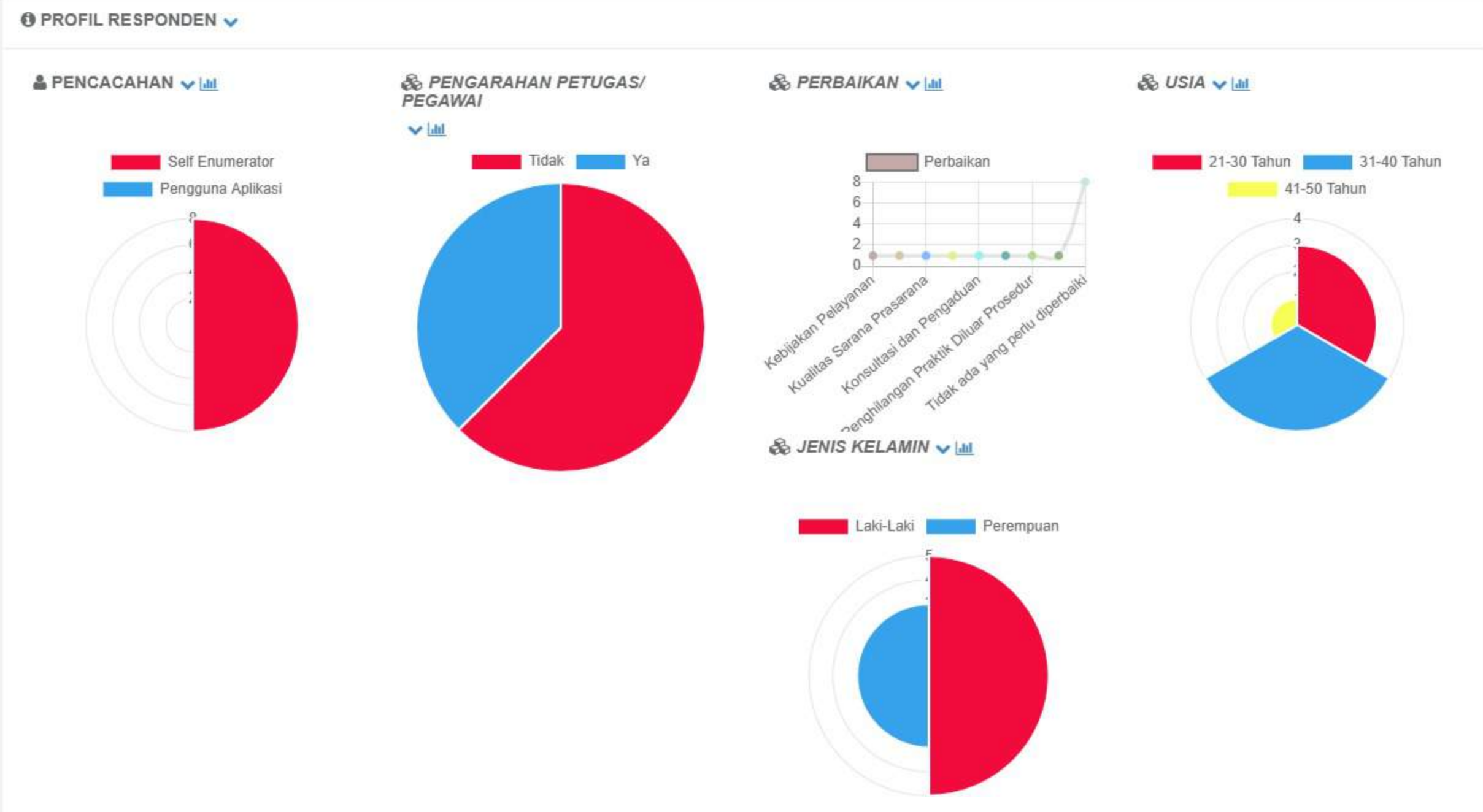
Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik



Android

Windows 10

iOS



Perbaikan

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

JENIS KELAMIN

Laki-Laki

Perempuan

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

-
-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK September 2024

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.82/17.50

96.12/1003.84/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.01/17.50

97.21/1003.89/4

Responden

14

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

IKM/ IPK



SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.82/17.50

96.12/1003.84/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.01/17.50

97.21/1003.89/4

Responden

14

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus Nasional
Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ Wilayah
Lokus Provinsi/ Wilayah



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	16.75	16.72	0.03	17.03	-0.28	16.83	-0.08	17.03
Persyaratan	16.75	16.77	-0.02	16.95	-0.20	16.92	-0.17	16.95
Prosedur/Alur	16.75	16.83	-0.08	16.68	0.07	16.90	-0.15	16.68
Waktu Penyelesaian	16.94	16.78	0.16	16.96	-0.02	16.83	0.11	16.96
Tarif/Biaya	16.94	16.79	0.15	17.10	-0.16	16.70	0.24	17.10
Sarana Prasarana	16.94	16.71	0.23	16.58	0.36	16.90	0.04	16.58
Respon	16.75	16.80	-0.05	16.50	0.25	16.67	0.08	16.50
Konsultasi dan Pengaduan	16.75	16.76	-0.01	16.50	0.25	16.79	-0.04	16.50

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

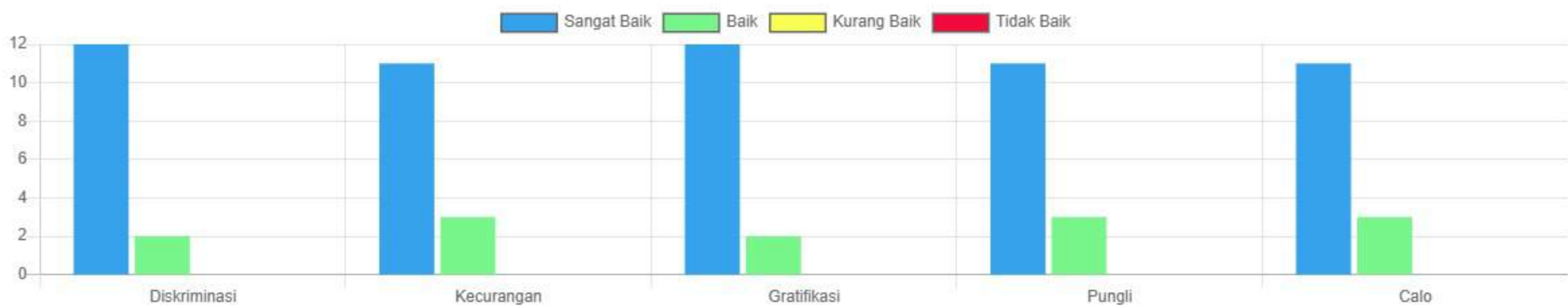
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.01/17.50

97.21/100

3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus Nasional
Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ Wilayah
Lokus Provinsi/ Wilayah



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	17.13	16.90	0.23	17.21	-0.08	17.12	0.01	17.21
Kecurangan	16.94	16.86	0.08	17.10	-0.16	17.06	-0.12	17.10
Gratifikasi	17.13	16.93	0.20	17.15	-0.02	17.10	0.03	17.15
Pungli	16.94	16.94	0	17.28	-0.34	17.12	-0.18	17.28
Calo	16.94	16.92	0.02	17.20	-0.26	16.98	-0.04	17.20

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

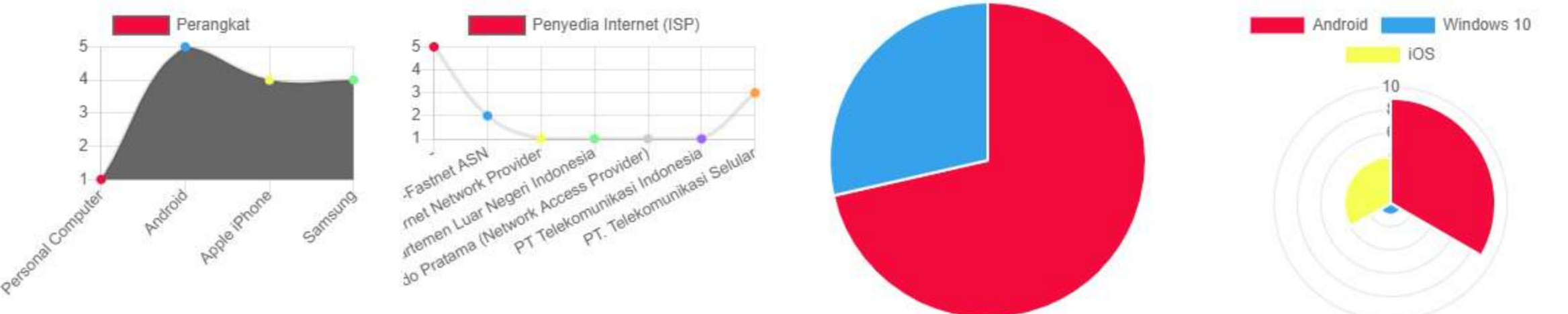
PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

OPERATING SYSTEM



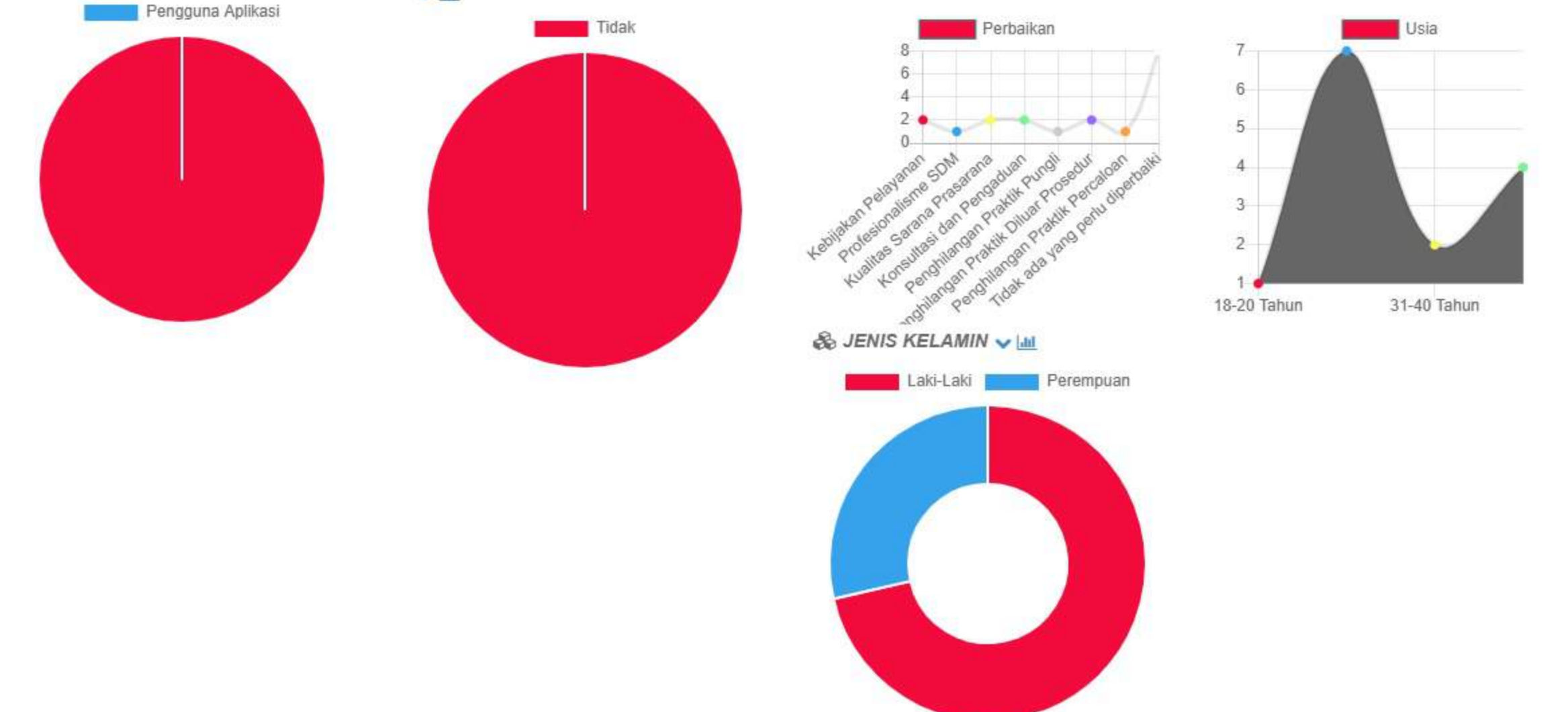
PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN

USIA



[Survei](#) / [Hasil](#) / [Dashboard](#) SURVEY

IKM/ IPK IKM-IPK Januari 2025	
IKM/ IPK IKM-IPK Desember 2024	
IKM/ IPK IKM-IPK November 2024	
IKM/ IPK IKM-IPK Oktober 2024	
IKM/ IPK IKM-IPK September 2024	
IKM/ IPK IKM-IPK Agustus 2024	
IKM/ IPK Survei IKM-IPK Juli 2024	

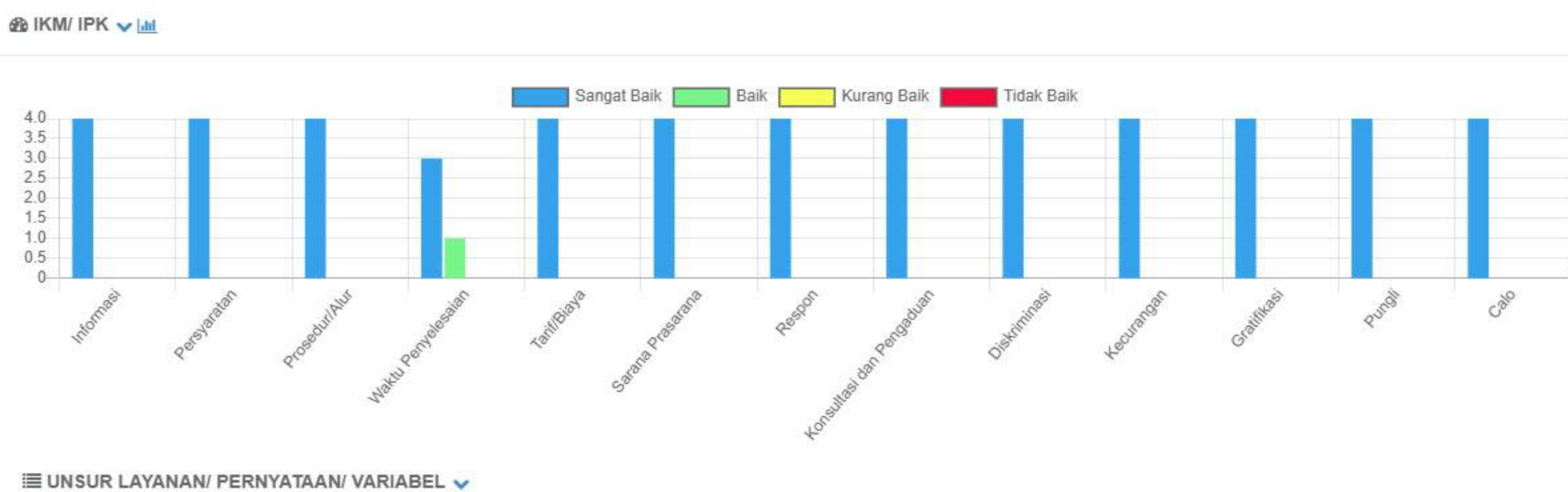
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.42/17.50

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

 Respondent

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik



II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)



☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼

ANALISIS GAP ANALISIS GAP INDEKS 100 ANALISIS GAP INDEKS 4 ANALISIS GAP VARIABEL 

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus dan Unit Kerja Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	17.50	16.74	0.76	16.94	0.56	17.05	0.45	16.94	
Persyaratan	17.50	16.78	0.72	17.01	0.49	17.03	0.47	17.01	
Prosedur/Alur	17.50	16.77	0.73	16.92	0.58	17.05	0.45	16.92	
Waktu Penyelesaian	16.84	16.74	0.10	16.59	0.25	16.91	-0.07	16.59	
Tarif/Biaya	17.50	16.75	0.75	17.09	0.41	17.13	0.37	17.09	
Sarana Prasarana	17.50	16.66	0.84	16.92	0.58	17.01	0.49	16.92	
Respon	17.50	16.73	0.77	16.89	0.61	17	0.50	16.89	
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.71	0.79	16.94	0.56	16.95	0.55	16.94	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)



☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼

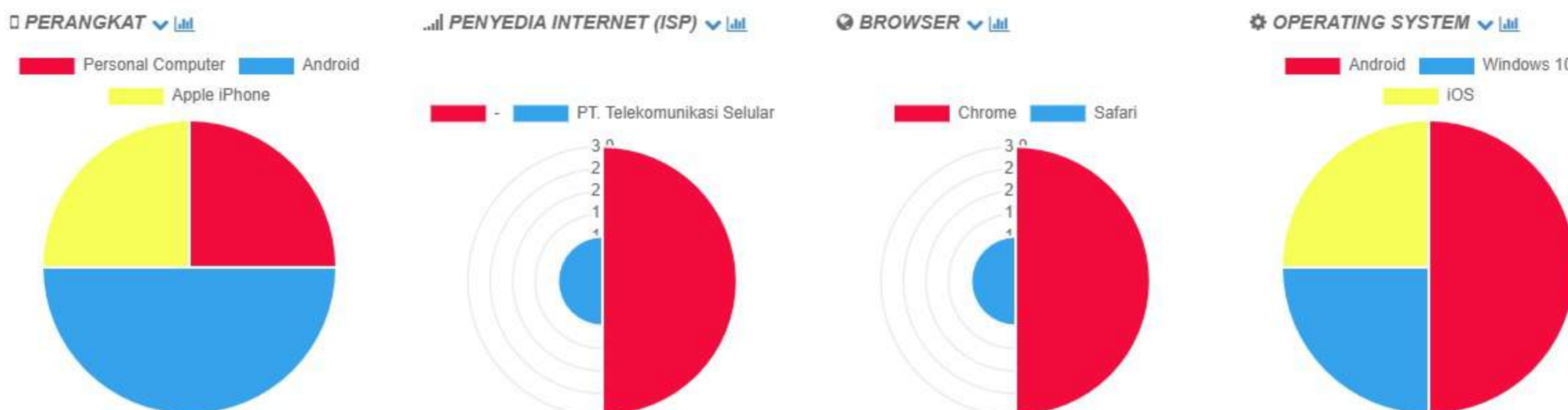
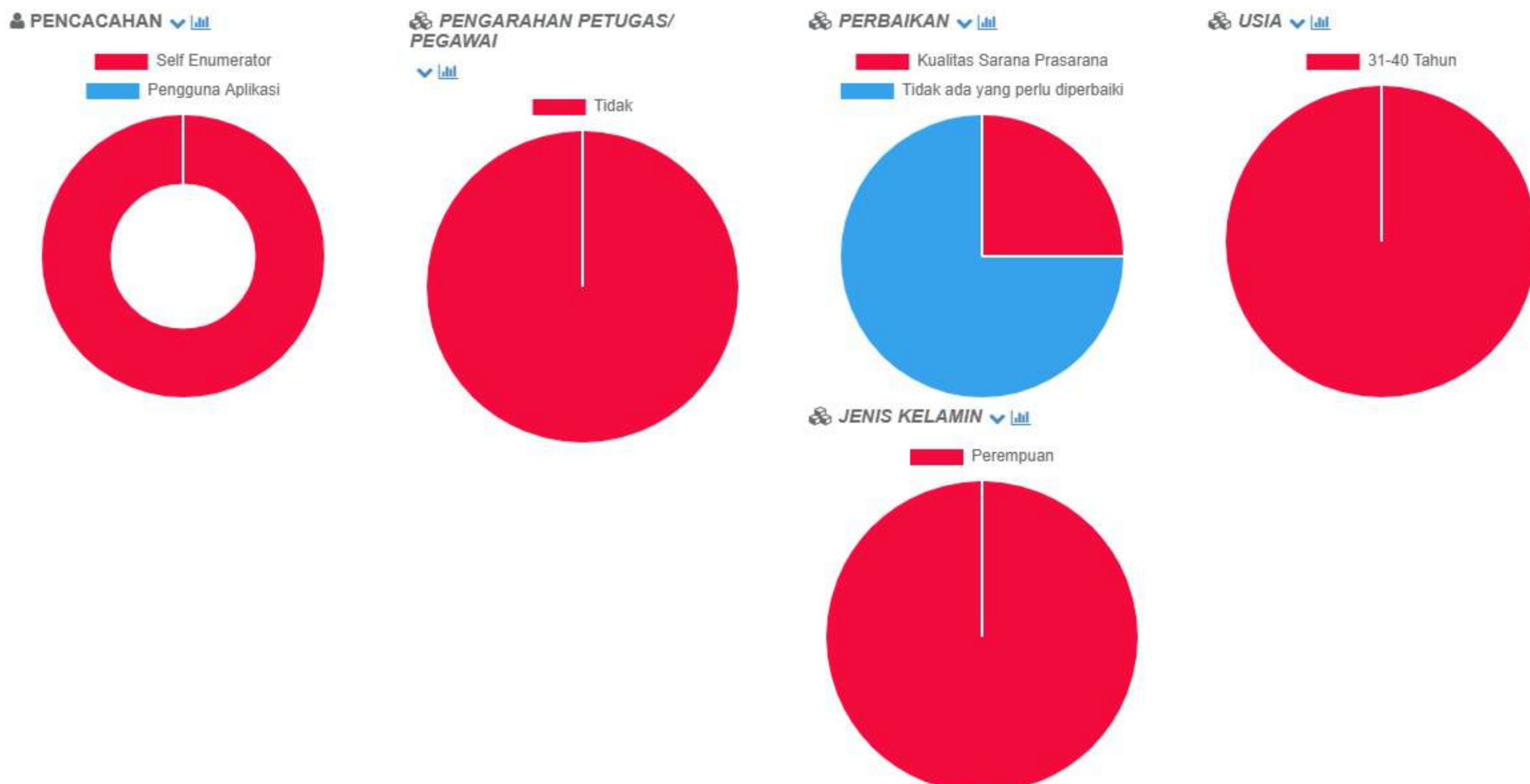
ANALYSIS GAP ANALISIS GAP INDEKS 100 ANALISIS GAP INDEKS 4 

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah	Se
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	
Diskriminasi	17.50	16.84	0.66	17.14	0.36	17.14	0.36	17.14	
Kecurangan	17.50	16.86	0.64	17.09	0.41	17.09	0.41	17.09	
Gratifikasi	17.50	16.86	0.64	17.06	0.44	17.17	0.33	17.06	
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.09	0.41	17.16	0.34	17.09	
Calo	17.50	16.85	0.65	17.11	0.39	17.19	0.31	17.11	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

⚙️ PENGGUNAAN PERANGKAT

PROFIL RESPONDEN 

Dashboard

- Laman
- Survei

SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK September 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Agustus 2024

IKM/ IPK

Survei IKM-IPK Juli 2024

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.63/17.50

95/1003.80/4

Responden

3

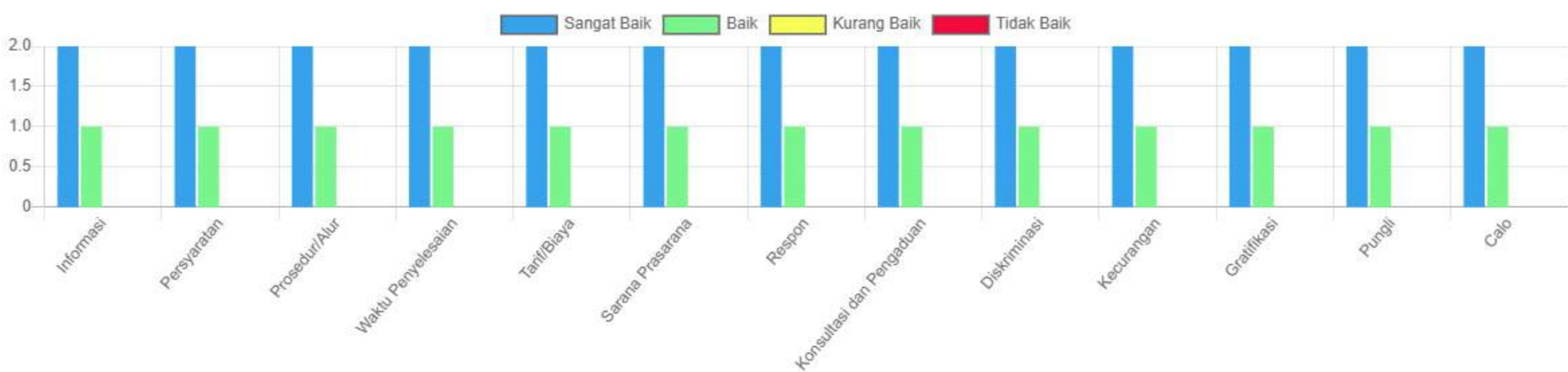
Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.63/17.50

95/1003.80/4

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	16.63	16.66	-0.03	16.15	0.48	16.61	0.02	16.15
Persyaratan	16.63	16.75	-0.12	16.15	0.48	16.70	-0.07	16.15
Prosedur/Akur	16.63	16.76	-0.13	16.09	0.54	16.71	-0.08	16.09
Waktu Penyelesaian	16.63	16.70	-0.07	15.98	0.65	16.73	-0.10	15.98
Tarif/Biaya	16.63	16.77	-0.14	16.15	0.48	16.79	-0.16	16.15
Sarana Prasarana	16.63	16.69	-0.06	16.31	0.32	16.75	-0.12	16.31
Respon	16.63	16.71	-0.08	15.98	0.65	16.62	0.01	15.98
Konsultasi dan Pengaduan	16.63	16.72	-0.09	16.15	0.48	16.74	-0.11	16.15

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



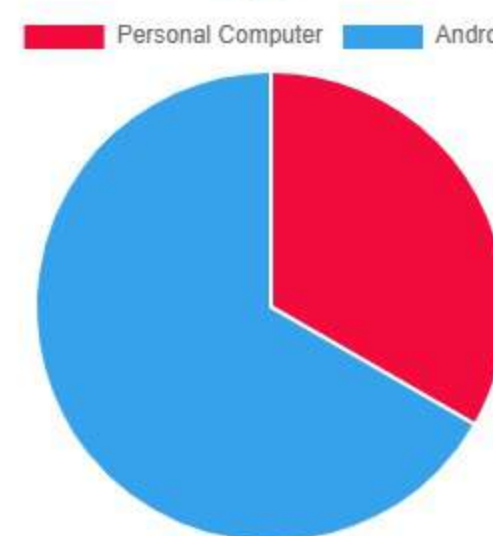
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	16.63	16.83	-0.20	16.15	0.48	16.77	-0.14	16.15
Kecurangan	16.63	16.83	-0.20	16.31	0.32	16.82	-0.19	16.31
Gratifikasi	16.63	16.87	-0.24	16.31	0.32	16.77	-0.14	16.31
Pungli	16.63	16.85	-0.22	16.47	0.16	16.90	-0.27	16.47
Calo	16.63	16.82	-0.19	16.31	0.32	16.85	-0.22	16.31

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

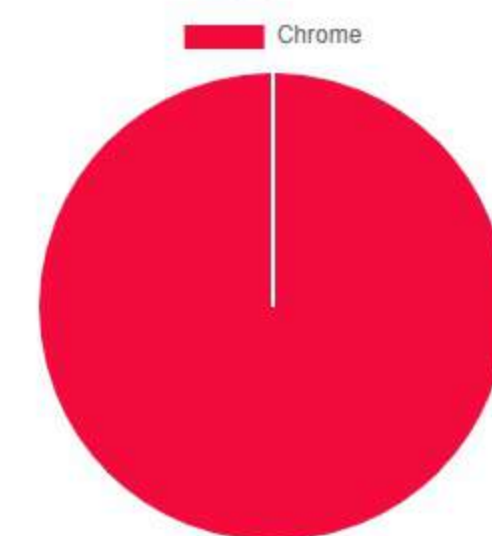
PERANGKAT



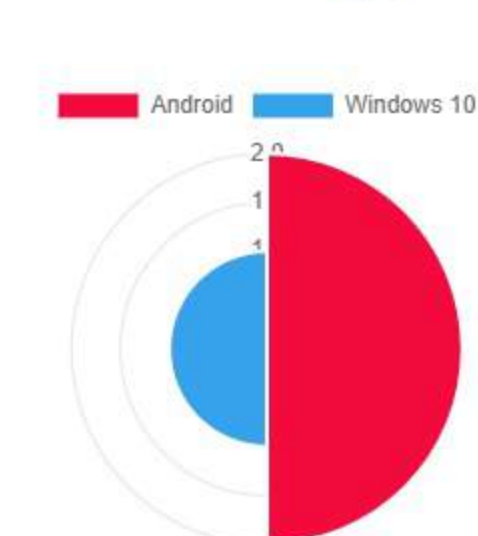
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

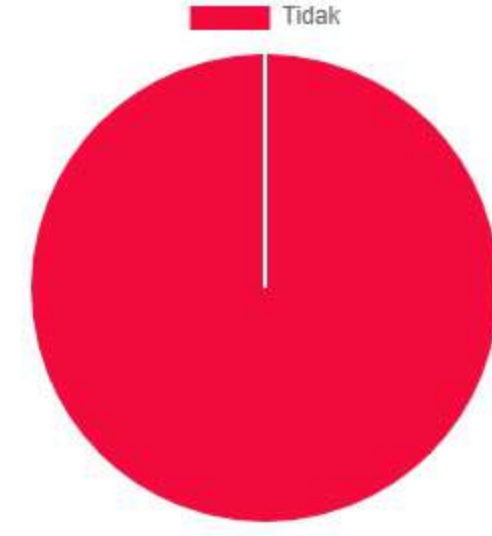


PROFIL RESPONDEN

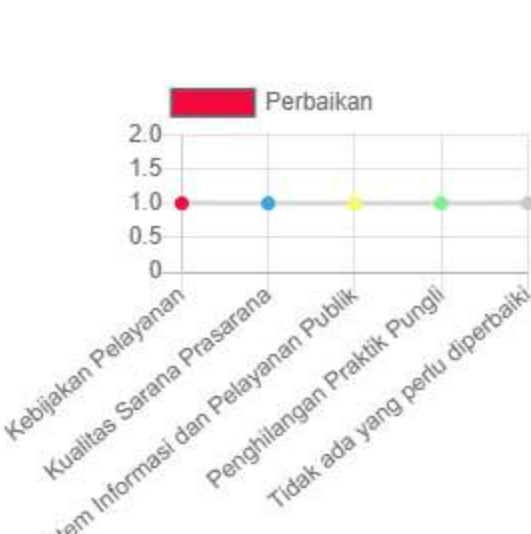
PENCACAHAN



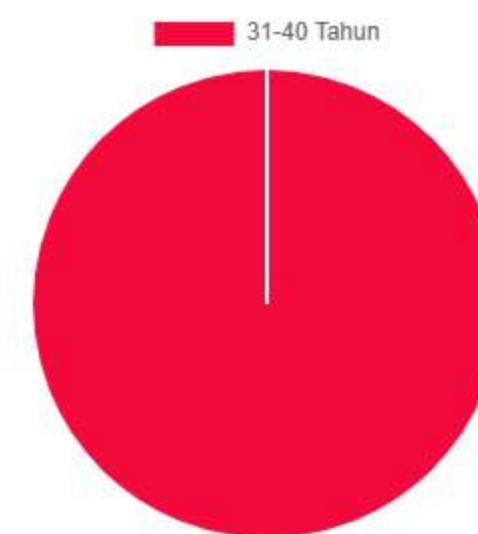
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



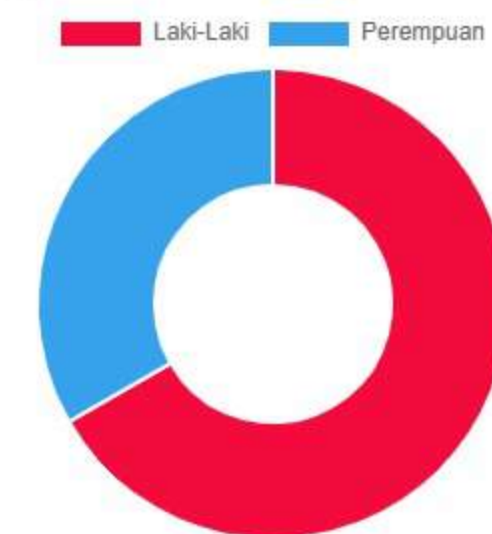
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



SURVEI

-
- IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK September 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK Agustus 2024
- IKM/ IPK

Survei IKM-IPK Juli 2024
- <

>
- 1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.10/17.50

97.71/100 3.91/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.14/17.50

97.95/100 3.92/4

Responden

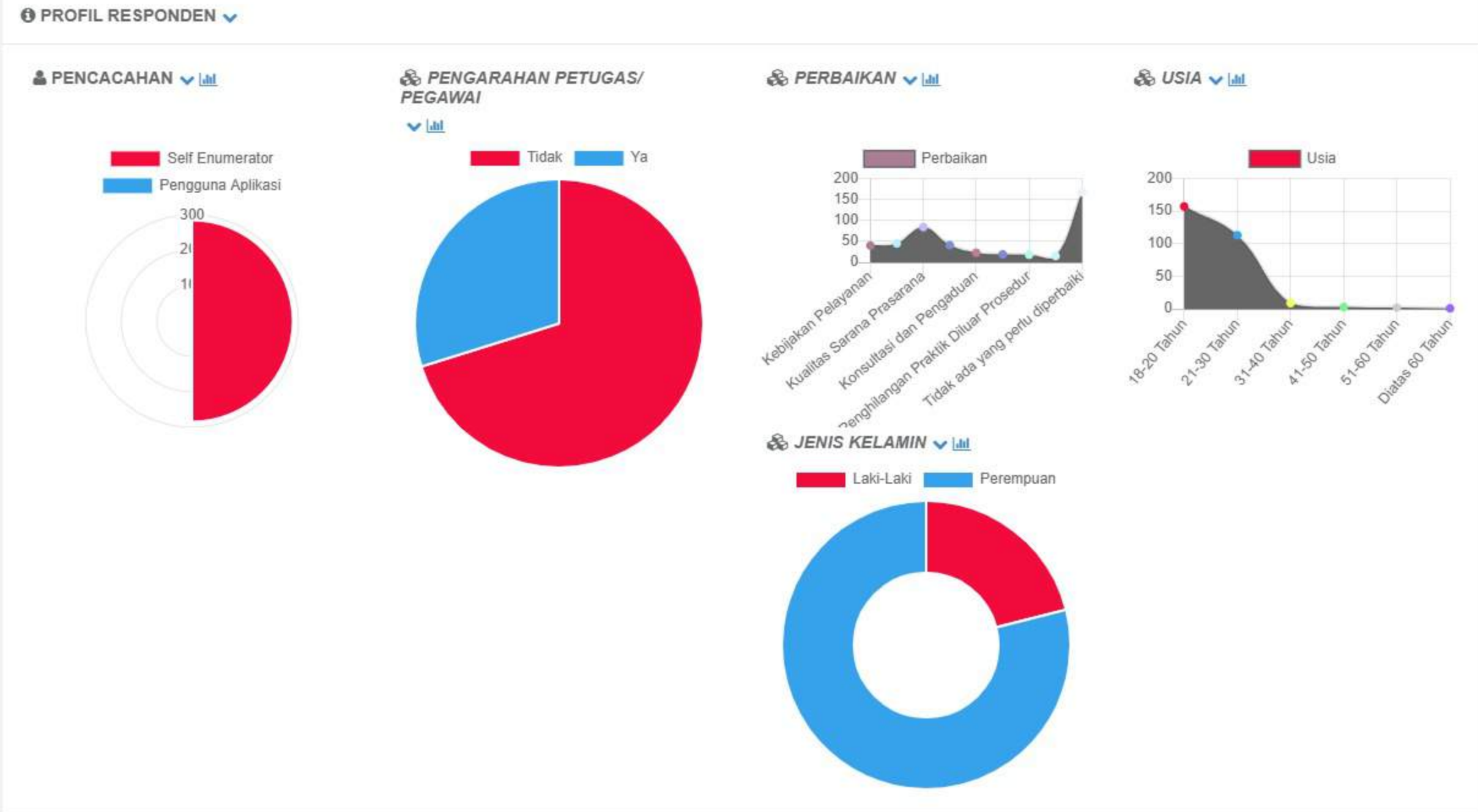
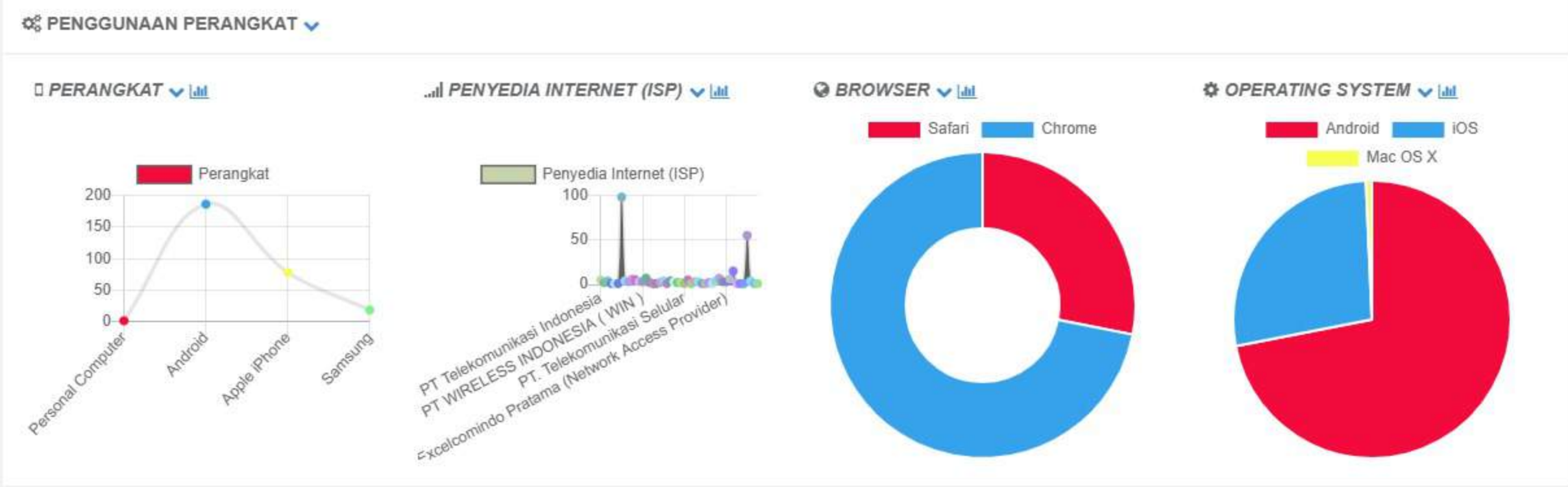
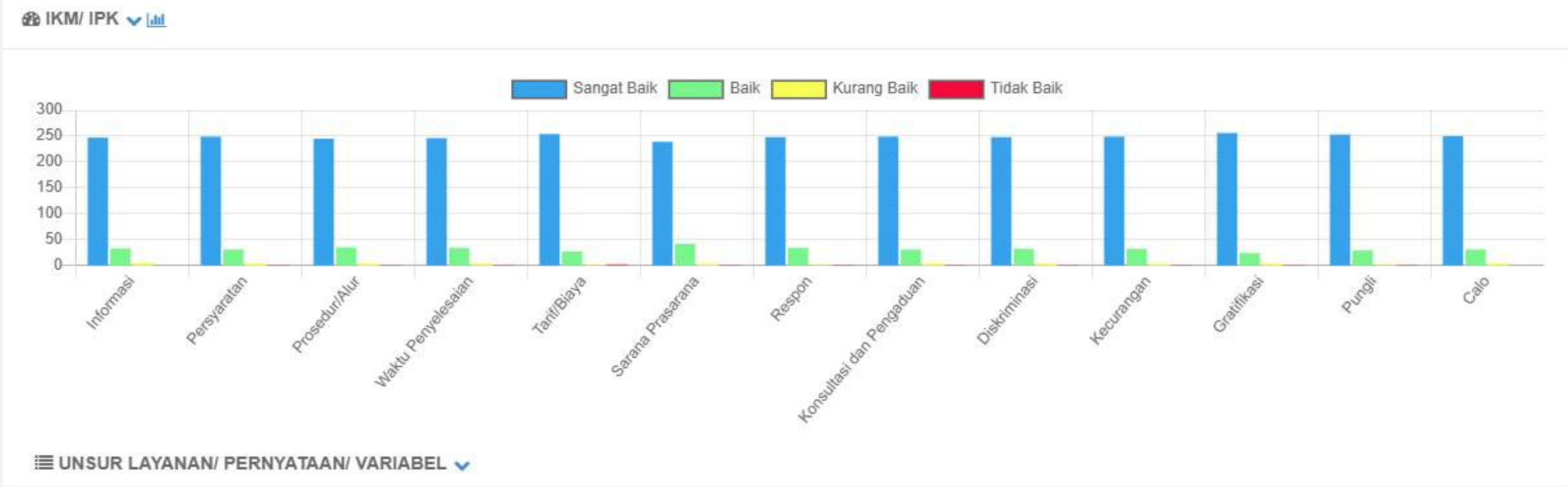
285

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK September 2024
- IKM/ IPK

IKM-IPK Agustus 2024
- IKM/ IPK

Survei IKM-IPK Juli 2024

< >
1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2024

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.16/17.50
98.06/100 3.92/4

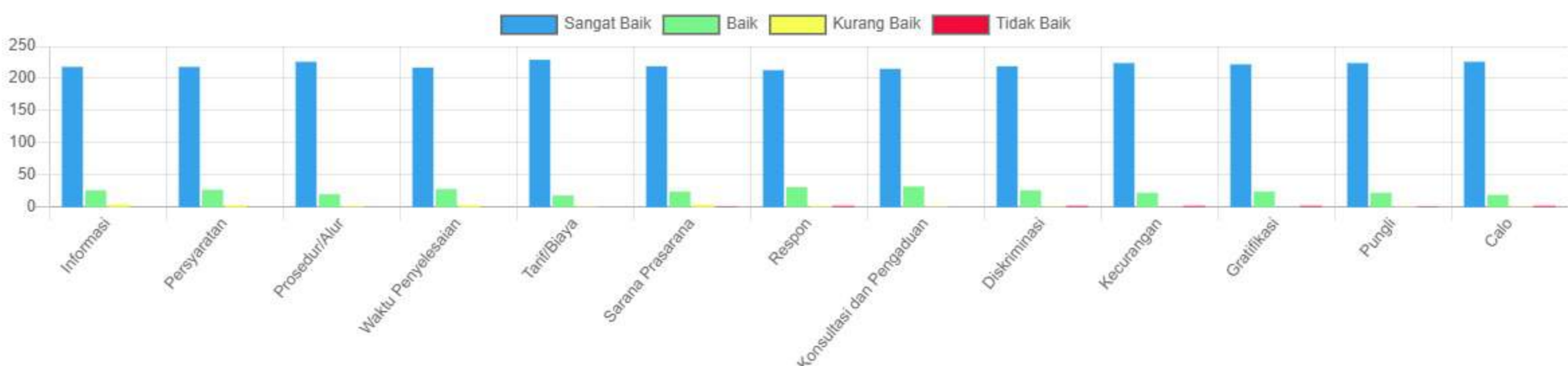
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.16/17.50
98.05/100 3.92/4



Responden
248

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.16/17.50 98.06/100 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jn Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	17.14	16.66	0.48	16.99	0.15	16.61	0.53	16.99
Persyaratan	17.15	16.75	0.40	17.16	-0.01	16.70	0.45	17.16
Prosedur/Alur	17.25	16.76	0.49	17.04	0.21	16.71	0.54	17.04
Waktu Penyelesaian	17.14	16.70	0.44	17.16	-0.02	16.73	0.41	17.16
Tarif/Biaya	17.29	16.77	0.52	17.23	0.06	16.79	0.50	17.23
Sarana Prasarana	17.13	16.69	0.44	17.15	-0.02	16.75	0.38	17.15
Respon	17.06	16.71	0.35	17.11	-0.05	16.62	0.44	17.11
Konsultasi dan Pengaduan	17.14	16.72	0.42	17.16	-0.02	16.74	0.40	17.16

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.16/17.50 98.05/100 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	17.11	16.83	0.28	16.98	0.13	16.77	0.34	16.98
Kecurangan	17.17	16.83	0.34	17.01	0.16	16.82	0.35	17.01
Gratifikasi	17.14	16.87	0.27	16.99	0.15	16.77	0.37	16.99
Pungli	17.19	16.85	0.34	16.85	0.34	16.90	0.29	16.85
Calo	17.18	16.82	0.36	17.18	0	16.85	0.33	17.18

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

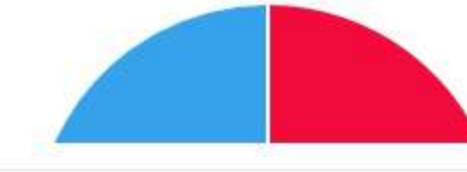
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



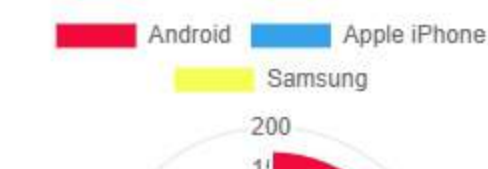
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	17.11	16.83	0.28	16.98	0.13	16.77	0.34	16.98
Kecurangan	17.17	16.83	0.34	17.01	0.16	16.82	0.35	17.01
Gratifikasi	17.14	16.87	0.27	16.99	0.15	16.77	0.37	16.99
Pungli	17.19	16.85	0.34	16.85	0.34	16.90	0.29	16.85
Calo	17.18	16.82	0.36	17.18	0	16.85	0.33	17.18

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

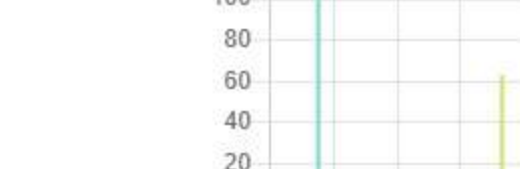
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



[Survei](#) / [Hasil](#) / [Dashboard](#)

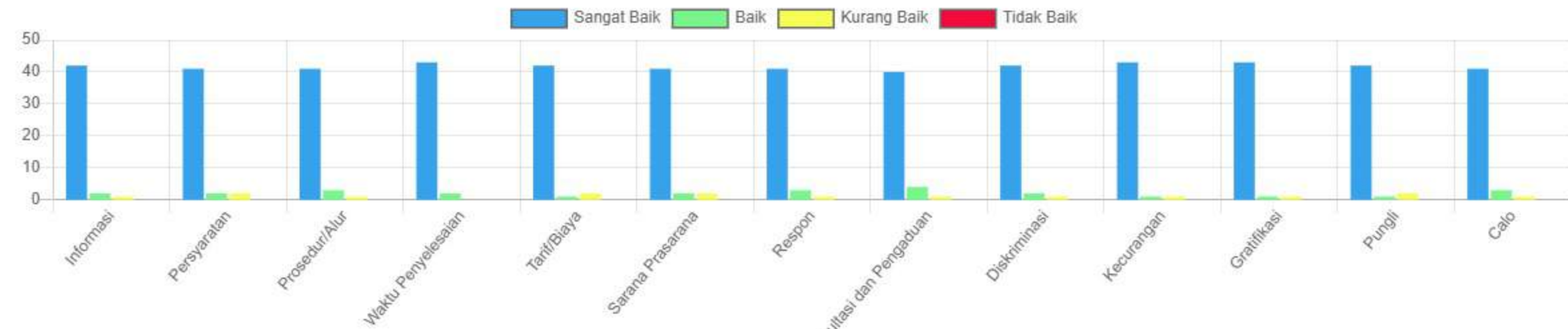
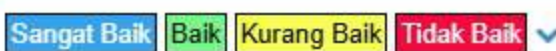
1 - 20 dari ?

1 - 20 dari ?

1 - 20 dari ?

1 - 20 dari ?

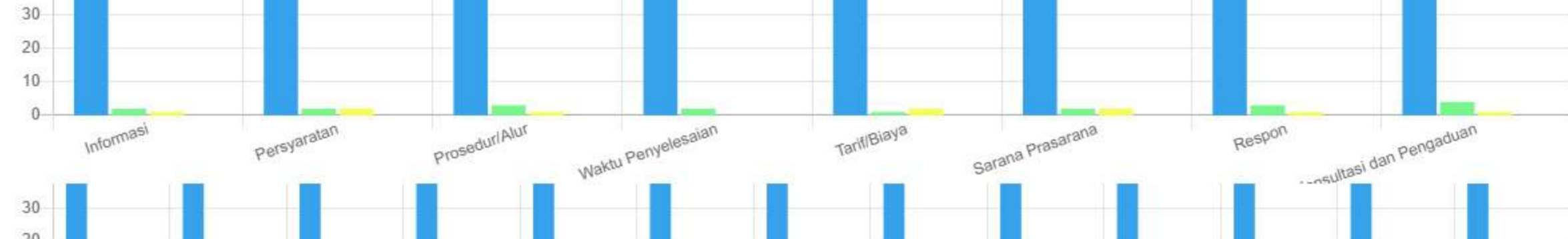
1 - 20 dari ?



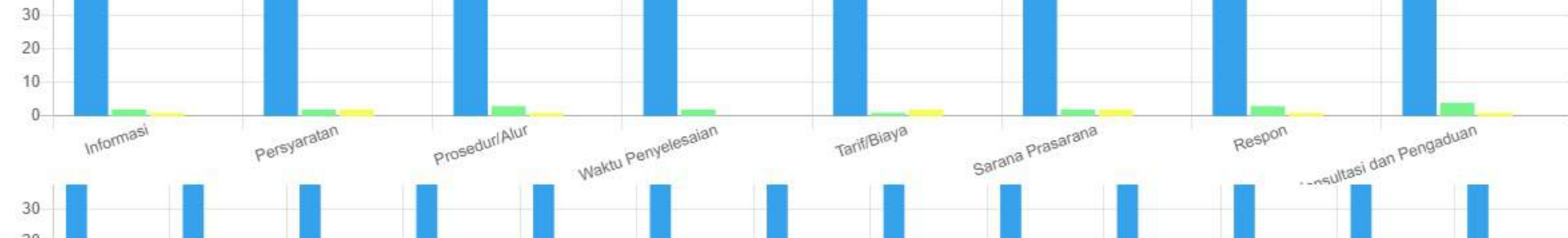
☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼



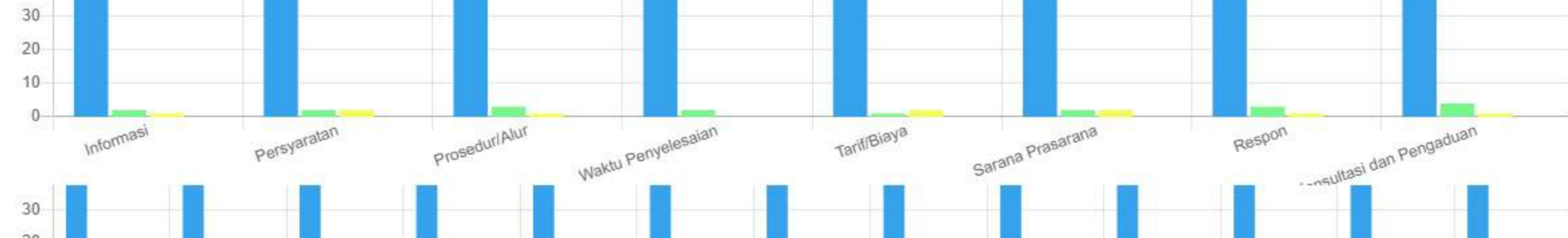
☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼



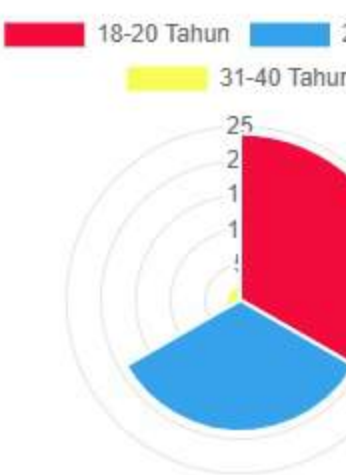
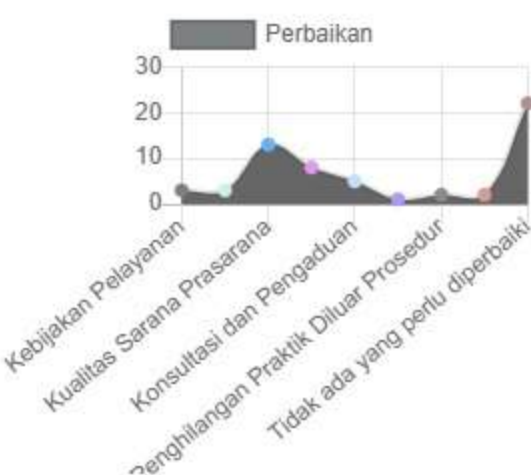
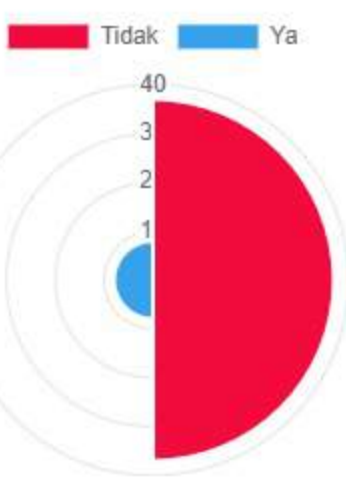
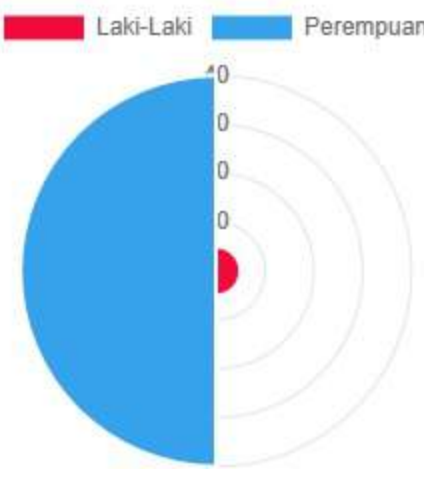
☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼



☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼



☰ UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL ▼

JENIS KELAMIN 

Lampiran 7
Dokumentasi dan Laporan Pembahasan
Capaian Kinerja Tahun 2024
serta Uraian Capaian Lainnya

No. ST	: ST-K1 DJKA 20 Tahun 2025
Lokasi	: Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SERTA LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2025

**PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SERTA LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/1/K1/DJKA/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 20 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Luminor, Bogor
2. Tanggal : Rabu-Jumat, 8-10 Januari 2025
3. Peserta Rapat : Perwakilan dari:
 - a. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Bagian Keuangan;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Bagian SDM dan Umum;
 - i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - l. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - m. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - n. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - o. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - p. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - q. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - r. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - s. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Registrasi
 - b. Konsep Laporan Kinerja Tahun 2024 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. Pemaparan Materi Peningkatan Kualitas Penulisan Dalam Penyampaian Substansi Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - d. Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Kinerja;
 - e. Pembahasan Laporan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.
 - f. Penutupan

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja dan reviu pelaporan kinerja Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Pembahasan Konsep Laporan Kinerja Tahun 2024 unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
 - a) Terdapat 10 Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengacu kepada capaian pada Perjanjian Kinerja (PK), diantaranya:
 - 1) IKK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas yang telah ditindaklanjuti.
 - 2) IKK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian).
 - 3) IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian.
 - 4) IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian.
 - 5) IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian.
 - 6) IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian.
 - 7) IKK7 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - 8) IKK8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.
 - 9) IKK9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian.
 - 10)IKK10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian.

- b) Pada Tahun 2024 terdapat 2 kegiatan rekomendasi yaitu Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan Dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta – Palur (selesai November 2024) dan Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian. Terdapat 2 kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment (AA)* yaitu studi RPM Trem Otonom dan Rencana Induk Perkeretaapian dan *beanchmarking* (akan diusulkan di Tahun 2025).
- c) Realisasi pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 7 peraturan yang telah terbit diantaranya:

No	Nomor	Peraturan Tentang	Keterangan
1.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Diundangkan tanggal 22 Februari 2024
2.	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif PNBPN di DJKA	Diundangkan tanggal 28 Juni 2024
3.	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Diundangkan tanggal 4 Juli 2024
4.	PM 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	Diundangkan tanggal 23 Juli 2024
5.	PM Nomor 27 Tahun 202	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 27 September 2024 Tanggal Pengundangan 14 Oktober 2024
6.	PM 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian	Tanggal Penetapan 29 November 2024 Tanggal Pengundangan 12 Desember 2024
7.	PM 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik	Diundangkan 9 Desember 2024

		Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi	
--	--	--	--

Terdapat arahan arahan dari Inspektorat Jenderal bahwa capaian legislasi agar fokus terhadap peraturan yang bersifat eksternal/teknis. Periode 2020 - Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 51 peraturan yang telah terpublish dalam JDIH, telah tercapai dari target sebanyak 49 peraturan. Apabila Kepdirjen akan di drop dari list peraturan maka capaian tetap tercapai sebanyak 49 peraturan yang telah terbit/dipublikasikan. Upaya peningkatan yang dilaksanakan adalah salah satunya pembahasan dengan BKT mengenai reviu terhadap UU Nomor 23 Tahun 2007, pembahasan mengenai peraturan BUPP, Perpres KA Cepat dan Pembahasan angkutan barang ROLA dengan Direktorat LLAKA.

- d) ASN Ditjen Perkeretaapian saat ini sebanyak 1.823 pegawai terdiri dari PNS sebanyak 1.414 pegawai, CPNS sebanyak 246 pegawai dan P3K sebanyak 163 pegawai serta Non ASN 624 pegawai. Terdapat selisih 1 pegawai antara data SIK dan DUK. Selain itu jumla pegawai yang mengikuti diklat/memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sampai dengan Triwulan IV sebanyak 1.156 pegawai namun sebelumnya terdapat 1.147 pegawai (indikasi penambahan pada diklat *Effective Coaching & Monitoring*). Perlu dilakukan pengecekan dan sonkronisasi data Kembali serta perlu ditambahkan Upaya yang telah dilaksanakan untuk analisis keberhasilan (faktor, kendala, analisis), Upaya peningkatan kinerja kedepanya.
- e) Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 17 kegiatan siaran pers, publikasi sebanyak 365 postingan media sosial (Instagram, fb, dan tiktok), serta keterbukaan sektor informatif berdasarkan penilaian dari PPID DJKA memperoleh predikat informatif dengan nilai 90. Untuk itu perlu menyampaikan konsep analisis keberhasilan pada Tahun 2024 (analisis kegiatan yang telah dilakukan, kendala, dll) serta Upaya peningkatan kinerja kedepanya (Bimtek Kehumasan, FGD/Sosiliasi program perkeretaapian pada kegiatan CFD dll) kepada Bagian Perencanaan.
- f) Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian progres sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1,2 T dari target 2024 (92,2%). Belum tercapainya realisasi pendapatan PNBP

terjadi pada akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana. Terdapat kendala diantaranya:

- 1) Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya pengajuan sewa untuk sarana.
 - 2) Terdapat perubahan/transisi regulasi perhitungan nilai PNB/TAC .
 - 3) Kurangnya sosialisasi dengan stakeholder, ketersediaan SDM di bidang perkeretaapian, dan
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan BMN DJKA (sewa lahan).
- g) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 diperoleh berdasarkan penyerapan anggaran pada Om SPAN sebesar 5,8T dari 10,7 T (54,24%). Akan ada indikasi penambahan/update capaian penyerapan anggaran menjadi 54,36% dan saat ini sedang diusulkan revisi LMAN, sehingga berpengaruh pada capaian. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kendala diantaranya:
- 1) Sumber dana RM tidak terserap karena adanya *Automatic Adjustment (AA)*, blokir perjadi dan selisih pagu/kontrak. Selisih signifikan ada pada pelaksanaan pada pelaksanaan kegiatan IMO BTP Kelas II Padang dikarenakan terdapat jalur yang masuk dalam perjanjian konsesi sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan perawatan (tidak terserap).
 - 2) Sumber dana SBSN tidak terserap dengan maksimal diantaranya pada kegiatan yang direncanakan SYC namun karena dokumen teknis belum selesai sampai dengan TW II Tahun 2024 sehingga KTJ tidak dapat direalisasikan. Untuk kegiatan MYC dikarenakan ada nya gagal tender/tender ulang, pengadaan lahan, reu dokumen teknis,kasus hukum, keterbatasan waktu sehingga fisik terlambat sehingga mempengaruhi terhadap pengoptimalan anggaran.
 - 3) Sumber dana PLN terdapat blokir dan terdapat kegiatan yang tidak terserap karena salah satunya perbedaan/selisih kurs.
 - 4) Sumber dana BLU signifikan pada belanja Listrik BPKAR Sumsel yang mengalami perubahan lebih rendah.
- h) Setiap bagian/satker untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan

kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya.

3. Pembahasan Materi Peningkatan Kualitas Penulisan Dalam Penyampaian Substansi Pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a) Menindaklanjuti masukan dari Kementerian PUPR terdapat saran/rekomendasi untuk penulisan laporan kinerja melibatkan *expert* dan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Pada penerapannya dari segi teknis/substansi sudah terpenuhi namun perlu diperhatikan dalam tata cara untuk implementasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah.

b) Dalam penulisan/penyampaian pada laporan kinerja diharapkan dapat mengacu kepada kaidah bahasa yang benar. Untuk saat ini kaidah Bahasa Indonesia dapat mengacu kepada beberapa pedoman, diantaranya:

- 1) Ejaan BI yang disempurnakan (EYD) Edisi V
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi VI
- 3) Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI) Edisi III
- 4) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBB) Edisi IV

Saat ini kemudahan untuk mengakses kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar selain diakses melalui web dapat juga diakses melalui aplikasi halo Bahasa dan aplikasi KBBI V (pada play store dan app store).

c) Laporan terdiri dari laporan ilmiah dan laporan teknis, laporan kinerja merupakan salah satu jenis laporan teknis. Ciri – ciri laporan yang baik diantaranya:

- 1) Logis dimana informasi yang disajikan masuk akal
- 2) Sistematis dimana informasi yang disampaikan memperlihatkan urutan dan pertalian satu sama lain.
- 3) Jelas dimana Bahasa yang digunakan tidak ambigu.
- 4) Lugas dimana Bahasa yang digunakan langsung mengungkapkan pokok permasalahan dan tidak berbelit – belit sehingga mudah dipahami.

d) Penggunaan Bahasa dalam penulisan kalimat pada pelaporan kinerja juga perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- 1) Laporan harus menggunakan bahasa Indonesia baku (penulisan ejaan, bentuk kata, pilih kata, kalimat);
- 2) Penulisan ejaan baku: mengikuti EYD;

- 3) Bentuk kata: sesuai dengan kaidah pembentukan kata;
 - 4) Penggunaan kalimat baku: mengikuti struktur bakukalimat bahasa Indonesia;
 - 5) Laporan harus menggunakan kalimat yang efektif;
 - 6) Laporan harus menggunakan paragraf yang baik.
- e) Dalam penulisan kalimat pada pelaporan kinerja juga perlu memperhatikan kelengkapan unsur kalimat, hal – hal yang harus diperhatikan:
- 1) Subjek tidak didahului kata depan;
 - 2) Tidak terdapat subjek ganda;
 - 3) Penggunaan kata hubung yang tepat;
 - 4) Tidak terjadi pengulangan subjek;
 - 5) Penghematan kata dalam kalimat;
 - 6) Tidak ambigu, mubazir dan rancu.
- f) Terdapat penulisan ejaan yang kurang tepat pada pelaporan kinerja DJKA Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

Salah	Benar
Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif; 3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.	Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut: 1. meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif; dan 3. meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.
Rencana Strategis 2020-2024	Rencana Strategis 2020 – 2024
Handal	Andal
Tolak ukur	Tolok ukur
Rincian	Perincian
Standarisasi	Standardisasi
Perijinan	Perizinan
Antar kota	Antarkota
Monitoring	<i>Monitoring</i>
Gotong-royong	Gotong royong

Salah	Benar
Rp 7.776.454.929.000,-	Rp7.776.454.929.000,00
RIPNAS	Ripnas
Didalam	Di dalam
Diantaranya	Di antaranya

Terkait dengan penulisan yang sudah menjadi ketentuan/aturan dari masing – masing K/L untuk dapat menyesuaikan kepada aturan tersebut, seperti penulisan Grafik Perjalan Kereta Api (GAPEKA), Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) dan lainnya.

- g) Setelah laporan kinerja dan laporan lainnya sudah selesai penulisan/pembahasan/final untuk dapat dilakukan pengecekan kembali kalimat – kalimat sesuai dengan kaidah/pedoman pada web/aplikasi yang telah disediakan seperti pada link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> dan <https://pasti.kemdikbud.go.id/>

4. Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Kinerja:

- a) Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja berdasarkan LMCK Triwulan III, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:

- 1) Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis (BTP Medan);
- 2) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (BTP Medan, BTP Padang);
- 3) Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perkeretaapian (BTP Jakarta, BPKAR Sumsel).

Berikut rata – rata capaian kinerja berdasarakan LMCK Triwulan III Tahun 2024:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan LMCK TW III Tahun 2024 (%)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	104,38
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	103,82
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	103,19
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	102,60
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,52
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	102,50
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,23
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	101,08
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	101,05
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	101,05
11	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,97
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	100,85
13	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,08
14	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	97,94
15	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	95,49
16	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	90,46

Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:

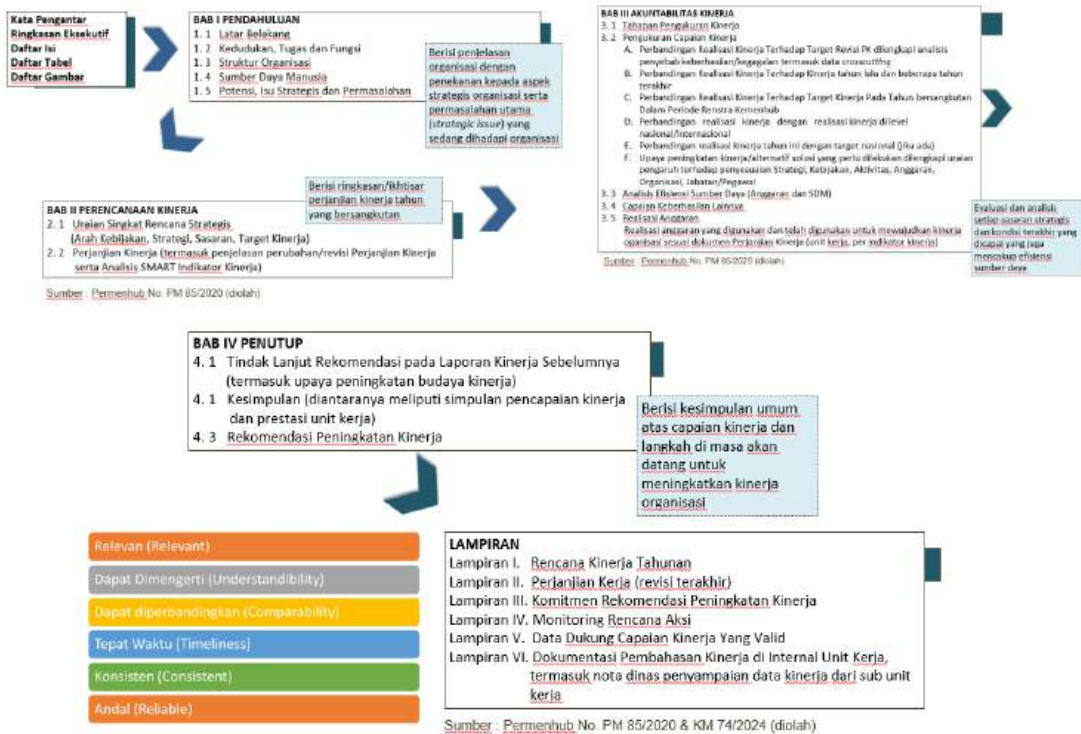
- 1) Koordinasi dengan operator/PT.KAI untuk percepatan perbaikan sarana KA perintis termasuk pemantauan intensif terhadap realisasi perjalanan KA perintis sesuai kontrak dan pemenuhan standar pelayanan yang berlaku;
 - 2) Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui percepatan penyerapan anggaran termasuk proses penyesuaian skema MYC Kegiatan Strategis, peningkatan pencapaian output (CRO) serta pengurangan deviasi RPD guna mendukung nilai konsistensi;
 - 3) Penyelesaian status aset barang milik negara (lahan, bangunan, lainnya) yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan perolehan PNBP.
- b) Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan III Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian

Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi). Rata-Rata TW III 2024 : 88,29%. Rincian nilai masing – masing unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan LMCK TW III Tahun 2024 (%)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	104,38
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	103,82
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	103,19
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	102,60
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	102,52
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	102,50
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,23
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	101,08
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	101,05
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	101,05
11	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	100,97
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	100,85
13	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	98,08
14	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	97,94
15	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	95,49
16	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	90,46

- c) Telah dilakukan pemantauan pelaporan kinerja pada aplikasi E-Sakip Reviu, E-Performance, SILAKI, E-Monev Bappenas dimana masih terdapat beberapa balai/unit kerja yang belum melakukan pengisian/upload data dukung. Diharapkan masing – masing unit kerja untuk dapat mengecek kembali dan melengkapi pengisian pada aplikasi kinerja tersebut.
5. Pembahasan Laporan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024:
- a) Laporan Kinerja merupakan Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan VISI, MISI dan STRATEGI Instansi Pemerintah (berdasarkan PK, Renstra).
 - b) Format penulisan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana terdiri dari 4 BAB dan 6 lampiran.



c) Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran dan masing – masing indikator kinerja minimal memuat:

- 1) Perbandingan realisasi kinerja terhadap target revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan termasuk data crosscutting.
- 2) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada).
- 3) Perbandingan realisasi kinerja terhadap kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 4) Perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun bersangkutan dalam periode Renstra Kemenhub
- 5) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
- 6) Upaya peningkatan kinerja/alternatif Solusi yang perlu dilakukan dilengkapi uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai.

d) Pada laporan kinerja 2024, pengukuran kinerja yang membandingkan capaian kinerja dilakukan dengan range waktu 4 tahun (2020 – 2024) termasuk dengan capaian renstra.

e) Analisis Sumber daya manusia tidak harus membahas mengenai SDM, namun sumber daya lainya yang dapat mempengaruhi capaian kinerja seperti sumber daya keuangan dll. Analisis efisiensi sumber daya (Anggaran,SDM, dan sarana prasarana) dapat menggunakan/mengacu kepada pedoman SAKIP/ yang mendukung sasaran kinerja, selain itu alternatif lainya sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon I dan Efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
- 2) membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
- 3) jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- 4) Efisiensi dapat diperoleh dari blokir AA/sisa perjalanan dinas, sisa kontak yang tidak terserap
- 5) Selain itu Analisa SDM dapat dihitung dengan rumus rasio SDM dimana membandingkan kebutuhan SDM sesuai beban kerja dengan SDM yang tersedia saat ini, kemudian setelah itu disandingkan dengan rasio output. Adapun perhitungan sebagai berikut:

1. Hitung rasio SDM terhadap kebutuhan ABK:
$\text{Rasio SDM} = \frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} = \frac{10}{12} = 0,8333 (83,33\%)$
2. Hitung rasio output aktual terhadap target output:
$\text{Rasio Output} = \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} = \frac{80}{100} = 0,8 (80\%)$
3. Hitung efisiensi SDM:
$E_{\text{SDM}} = (0,8333 \times 0,8) \times 100\% = 66,67\%$

f) Waktu penyusunan laporan kinerja berdasarkan Permenhub Nomor 85 tahun 2020, laporan kinerja unit kerja eselon I ditargetkan penyampaianya paling lambat 45 hari, unit kerja eselon II 30 hari, satker/balai 25 hari. Selain itu perlu diperhatikan terdapat target pelaporan kinerja triwulan IV. Adapun secara rinci sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA	DISUSUN	DITANDATANGANI	DISAMPAIKAN KE	KAPAN
Kementerian	Sesjen c.q Kepala Biro Perencanaan	Menteri	•Menteri Keuangan •Kepala Bappenas/ Men PPN •Menteri PAN & RB	2 bulan
Unit Kerja Eselon I	Pimpinan Tinggi Madya	Pejabat JPT Madva	Menteri Perhubungan	45 hari
Unit Kerja Eselon II	Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat JPT Pratama	Pejabat JPT Madva	30 hari
Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Pimpinan Satuan Kerja	Atasan Langsung	25 hari

g) Penyusunan laporan kinerja selain mengacu kepada pedoman SAKIP/Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 juga dilakukan *beanchmarking* terhadap laporan kinerja dari Kemenkeu dan PUPR. Adapun format laporan kinerja dari Kemenkeu terdiri dari:

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi C. Mandat dan Peran Strategis D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2022 E. Sistematika Laporan Bab II Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2022 dan 2023 C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 D. Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2022 dan 2023	Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi • Perbandingan dengan tahun sebelumnya (Tren); • Perbandingan dengan target Renstra atau Standar lainnya • Pengungkapan Faktor Kendala, <i>Extra Effort</i> , dan Upaya Peningkatan Capaian Kinerja Tahun berikutnya A. Realisasi Agenda Prioritas B. Realisasi Anggaran C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya D. Kinerja Lain-lain (<i>Achievement</i> , Penghargaan, Inovasi, Replikasi) E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bab IV Penutup Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran (Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Reviu oleh Itjen)
--	--

Selain itu untuk menjadi referensi dapat dilakukan *beanchmarking* pada pelaporan kinerja PUPR, yang terdiri dari:

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTUR JENDERAL KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi** 1.4 Isu Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)** 1.5 Peran Strategis Kementerian PUPR (khusus laporan kinerja kementerian) 1.6 Sistematika Laporan	BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.1.1 Visi 2.1.2 Misi 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan 2.2 Perjanjian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir 2.2.3 Kronologi Perubahan PK 2.3 Target Kinerja Tahun Yang dilaporkan Menurut Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) 2.3.1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja) (periode Renstra yang dilaporkan) 2.3.2 Target Keluaran Utama (khusus laporan kinerja kementerian)
BAB III KAPASITAS ORGANISASI 3.1 Sumber Daya Manusia 3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan 3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia 3.2 Sarana Prasarana 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran	

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA**

- 4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja*
- 4.2 Capaian Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)**
 - 4.2.1 Analisis Capaian Kinerja (Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan) x (x=nomenklatur SS/SP/SK)
- 4.3 Perbandingan Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)**
 - 4.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**
 - 4.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 - 4.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja *Output* terhadap Target Nasional (khusus laporan kinerja kementerian)*
 - 4.3.4 Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)*
- 4.4 Realisasi Anggaran**
 - 4.4.1 Analisis Penyerapan Anggaran TA-n (n=tahun yang dilaporkan)
 - 4.4.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*
- 4.5 Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja*
- 4.6 Penghargaan Atas Kinerja (Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja)*
- 4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penggunaan Layanan Publik Kementerian PUPR (khusus laporan kinerja kementerian)*

BAB V PENUTUP**

- 5.1 Simpulan Umum
- 5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan
- 5.3 Permasalahan
- 5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

LAMPIRAN*

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kementerian
- Lampiran 2 Penghargaan
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja
- Lampiran 4 Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja
- Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan

h) Beberapa hal yang dapat ditambahkan pada pelaporan kinerja Ditjen Perkeretaapian adalah:

- 1) Penambahan realisasi agenda prioritas (RPJMN, PSN dll);
- 2) Analisis sumber daya menjelaskan/membahas mengenai sarana dan prasarana perkantoran serta DIPA;
- 3) Berita acara revidi kegiatan laporan kinerja;
- 4) Untuk menjaga kualitas penulisan dan penyampaian substansi didalam laporan kinerja dilakukan sesi bedah laporan kinerja yang melibatkan expert dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

i) Dilakukan pembahasan terhadap indikasi capaian Triwulan IV Tahun 2024 tingkat unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian, diantaranya:

- 1) Rasio Konektivitas Antar Wilayah untuk saat ini terdapat penambahan pada pekerjaan muara satu dimana saat ini masih dalam proses TL perbaikan uji rancang bangun. Namun capaian tetap dihitung menjadi capaian;
- 2) Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 95,02%. Telah dilakukan evaluasi antara DJKA, PT KAI serta Balai Teknik Perkeretaapian, secara berkala akan dilaksanakan evaluasi bersama terhadap hasil pengukuran serta pelaporan dari BTP;
- 3) Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) saat ini menggunakan base 0,07 dimana terdapat 5 kejadian (anjlok) dengan km tempuh 67 juta;
- 4) Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api saat ini sebesar 96,11%;
- 5) Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api (Desember) sebanyak 506.251.459 penumpang;

- 6) Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api (Desember) sebanyak 69.401.018 ton barang.
6. Reviu Konsep Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.
- a) Berdasarkan timeline pelaksanaan SAKIP 2025, pada tanggal 8 – 10 Januari 2024 akan dilakukan pembahasan terhadap pembahasan dan reviu konsep LKIP 2024 untuk mengantisipasi pelaksanaan reviu oleh ITJEN pada akhir Januari 2025.
- b) Reviu dilaksanakan guna melaksanakan rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk secara konsisten melaksanakan Reviu terhadap *draft* Laporan Kinerja.
- c) Telah dilakukan reviu pelaporan kinerja masing – masing unit kerja, diantaranya:

1) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	• <i>Policy Brief</i> SID telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian • Studi Kelayakan Pengembangan Stasiun Tanah Abang telah ditetapkan/disahkan oleh Dirjen Perkeretaapian
2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian (%)	100,00	100,00	100,00	• Data dukung terkait hasil rapat pembahasan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur bersama Bagian Hukum agar dilampirkan. • Perlu dipastikan dengan Bagian Hukum terkait penetapan Addendum Perjanjian Konsesi yang masih berproses di Bagian Hukum).
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA (%)	92,00	95,42	104,00	• Untuk realisasi perjalanan GAPEKA sudah sesuai. • Agar di update s.d Desember 2024.
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu (%)	90,50	96,10	106,00	Agar di update s.d Desember 2024.
5	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	74,46	80,65	108,00	• Untuk angkutan barang posisi masih 30 Desember dan angkutan penumpang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					sudah 31 Desember 2024 (data sementara/data harian). Analisis terkait KA Perintis dapat ditambahkan.
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA (%)	100,00	100,00	100,00	Sudah diuraikan NSPK yang telah mendapatkan penetapan (Menteri/Dirjen).
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	3,70	3,69	99,00	- Responden agar ditingkatkan kembali minimal 30 responden sesuai keputusan bersama (apabila tidak memungkinkan disesuaikan dengan kriteria <i>sampling</i>). - Perlu diuraikan lebih rinci terkait upaya peningkatan kinerja dengan memperhatikan hal-hal yang masih belum optimal.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA (%)	100,00	82,11	82,00	- Penerimaan PNBPN dari TAC tidak tercapai (pada tahun 2024 pembayaran TAC untuk tahun 2023) - Agar diuraikan analisa kegagalan dan upaya peningkatan kinerja yang implementatif untuk tindak lanjut pada tahun 2025.
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (%)	88,00	85,60	97,00	- Untuk nilai konsistensi masih rendah karena perlu dilakukan pengecekan kembali terkait pengisian target disesuaikan dengan realisasi pada RPD - Agar dicek kembali terkait CRO dan efisiensi
10	Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai)	83,40	82,10	98,00	Terkait upaya peningkatan kinerja terhadap poin-poin apa saja yang masih rendah dan memungkinkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan pada tahun 2025.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Nilai)	3,00	3,00	100,00	- Perlu dilakukan identifikasi terhadap poin/komponen yang dibawah level 3,00 agar menjadi perbaikan kedepannya. - Terkait upaya peningkatan kinerja terhadap poin-poin apa saja yang masih rendah agar dirinci lebih detail.

2) Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Keterhubungan Prasarana Perkeretaapian Antar Wilayah (Rasio)	0,46	0,46	100,00	• Perlu diuraikan penjelasan terkait penyelesaian Lhoksumawe. • Perlu penjelasan rencana target tahun 2025 memperhitungkan <i>baseline</i> dan penambahan target.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II (%)	94,00	95,02	101,09	• Penetapan standar pedoman TQI diharapkan dapat diselesaikan secepatnya, termasuk penjelasan kapan pelaksanaan FGD akan dilaksanakan. • Untuk <i>baseline</i> 2025 masih menggunakan data dari KAI.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal (%)	64,43	64,43	100,00	• Perlu disampaikan/ diuraikan terkait rencana kedepan untuk peningkatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	3,80	3,87	102,11	• Terdapat perbaikan perhitungan dengan menggunakan rata-rata capaian setiap bulannya dari aplikasi IKM. • Total responden dalam setahun adalah 121 responden dari pelayanan perizinan. • Masukan dari responden terkait peningkatan pelayanan dapat ditambahkan. • Disarankan untuk target 2025 tetap dapat ditambahkan walaupun realisasi saat ini sudah cukup tinggi.
5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	100,79	100,79	• Perlu diuraikan rencana target tahun 2025.
6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	105,26	-	• Perlu konfirmasi lanjut terkait Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Prasarana apakah masuk ke dalam kategori atau tidak. • Perlu dijelaskan uraian terkait NSPK yang tidak sesuai target.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat	91,76	95,41	-	• Perlu dilakukan pengecekan perhitungan terhadap nilai Efisiensi karena tidak mungkin melebihi 100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Prasarana Perkeretaapian (%)				karena menjadi data Anomali. • Penghitungan CRO perlu pengecekan lebih lanjut.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	100,00	99,02	99,02	• Perlu dilakukan pengecekan kembali dengan data Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	84,00	82,10	97,74	Perlu menindaklanjuti arahan Itjen dan penjelasan Analisis per komponen.
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Level)	3,00	3,00	100,00	Perlu dilakukan mana saja yang dibawah level 3,00 agar menjadi perbaikan kedepannya.

3) Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)	66,67	66,67	100,00	- Realisasi masih sama dengan <i>baseline</i> 2023. Perhitungan capaian belum dijelaskan secara detail. - Agar kajian/studi yang dihitung sebagai capaian adalah studi/kajian yang telah dilakukan penetapan/ pengesahan mengacu ke PM 112/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023. - Saat ini, 4 studi/kajian yang sudah menjadi capaian belum mendapatkan pengesahan/penetapan.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	3,7	3,72	98,92	- Terdapat perbaikan perhitungan dengan menggunakan rata-rata capaian setiap bulannya. - Agar dilakukan upaya lain untuk meningkatkan responden selain dengan sosialisasi. Selain itu, perlu diuraikan secara detail dan spesifik terkait analisa kegagalan dalam pencapaian target dan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					upaya peningkatan kinerja di periode selanjutnya.
3	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (%)	100	100,49	100,49	- Realisasi periode Tahun 2020 - 2024 telah terlaksana sebanyak 206 kegiatan dari target sebanyak 205 kegiatan pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara. - Realisasi terdiri dari baseline pada Tahun 2023 sebanyak 168 kegiatan (pengoperasian dan pengadaan) dan 38 pengoperasian SMN pada Tahun 2024. - Terdapat beberapa kegiatan pengadaan dan modifikasi yang tidak masuk dalam perhitungan capaian diantaranya: - Pengadaan 1 Unit Railways Crane - Pengadaan 1 Unit Kereta Penolong - Modifikasi 1 unit Gerbong Datar
4	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	82,86	119,40	-	- Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal Direktorat Sarana Perkeretaapian. - Perlu dicek kembali perhitungan capaian karena apabila perhitungan capaian termasuk yang masih proses approval/validasi maka capaian 144,10% ini menjadi Anomali. - Agar capaian cukup menghitung sertifikat yang sudah terbit (tidak termasuk sertifikat yang masih proses).
5	Persentase Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Baik/ Temuan Minor (%)	91	96	105,59	- Angka realisasi dan capaian agar menggunakan 2 angka di belakang desimal. - Agar dilakukan pendetailan perhitungan dan analisis terhadap hasil <i>rampcheck</i> nataru dan <i>rampcheck</i> tahun baru.
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana	100	100	-	Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Perkeretaapian (%)				Direktorat Sarana Perkeretaapian. Agar dicek kembali terkait <i>output</i> hasil studi yang akan dilakukan penetapan/pengesahan.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian (%)	86,40	87,86	-	- Menunggu <i>final</i> perhitungan di internal Direktorat Sarana Perkeretaapian. - Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian (%)	100	105,15	105,15	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya tidak normatif namun dapat lebih dispesifikan. - Akan dicek kembali dengan Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
9	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	80,60	81,20	100,74	Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif).
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level)	3	3	100	Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

4) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian/SM KP (%)	87,50	87,50	100,00	- Perlu diuraikan lebih detail penjelasan hambatan apa saja yang ditemui pada bagian Analisis. - Upaya Peningkatan kinerja/rencana tindak lanjut agar lebih detail dan dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 - Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran - Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
2	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian (%)	84,00	82,32	98,00	• Untuk data dukung penghitungan kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian akan disampaikan melalui Nota Dinas. • Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran
3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian (%)	182,72	182,72	100,00	• Data dukung akan disampaikan dalam bentuk Nota Dinas dan Rekapitulasi. • Agar dilengkapi analisa terhadap penyesuaian strategi/kebijakan/kegiatan/anggaran • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
4	Persentase Rekomendasi Keselamatan dan Keamanan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah Ditindaklanjuti (%)	72,00	73,20	101,66	Data dukung rekomendasi yang telah ditindaklanjuti agar dilengkapi dengan surat tindaklanjut dari Stakeholder dan Nota Dinas dan Data Rekapitulasi dari Subdit.
5	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian (%)	100,00	100,00	100,00	• Perlu dijelaskan upaya yang sudah dilakukan terkait analisis keberhasilan serta penjelasan mengenai rencana tindak lanjut kedepannya. • Agar diuraikan NSPK yang telah disusun dan ditetapkan pada Tahun 2024 (PM, Perdirjen dan SOP).
6	Persentase Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian (%)	66,67	66,67	100,00	• Diuraikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 apa saja dan ditambahkan rencana kedepannya termasuk fitur akreditasi walaupun IKK nya tidak ada karena akan digabung. • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat	3,85	3,83	99,48	• Perlu dijelaskan lebih detail mengapa IKK IKM ini tidak tercapai, termasuk upaya peningkatan kinerja apa saja yang akan dilakukan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)				• Standar Responden yang dapat diacu yaitu minimal 30 Responden namun menyesuaikan dengan lingkupnya. • Agar dilengkapi analisa terkait crosscutting/hub kerja dengan unit kerja lain
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (%)	90,00	86,32	95,91	• Penghitungan realisasi anggaran tetap memperhitungkan Pagu termasuk <i>Automatic Adjustment</i>. • Agar dicek kembali terkait perhitungan CRO dan Efisiensi.
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (%)	100,00	113,21	113,21	• Terdapat Anomali capaian kinerja yakni 113,21% yang disebabkan karena terdapat usulan dari Dinas Perhubungan untuk permohonan baru/perpanjangan dan telah dilaksanakan pengujian pada Desember 2024 (usulan Dinas Perhubungan tersebut setelah Revisi PK ditandatangani). • Perlu dilakukan pengecekan angka pasti dengan Bagian Keuangan. • Perlu diuraikan justifikasi terhadap data anomali capaian PNBP tersebut.
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	83,35	83,65	100,35	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan komponen pada LKE SAKIP yang mendapatkan poin rendah.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level)	3,00	3,00	100,00	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan Kertas Kerja Penilaian SPIP yang mendapatkan poin rendah.

5) BTP Kelas I Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Rasio)	0,62	0,62	100,00	• Ditambahkan untuk upaya peningkatan seperti kegiatan penertiban lahan, reviu design, dan lainnya. • Agar dikaji potensi konektivitas ke terminal tipe A belum ada datanya. Saat ini data yang tersedia antara KRL dengan LRT, KRL dengan MRT dan lainnya.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	90,8	91,51	100,78	• Sementara untuk TQI masih menggunakan data periode III • Kegiatan fasop bukan perpanjangan MYC namun seperti garansi s.d januari. • Terkait kegiatan pendukung IMO masuk ke kegiatan pendukung keselamatan. • Laporan IMO agar dapat di share ke Bagian Perencanaan
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	98,88	98,88	100,00	• Tidak terdapat pekerjaan peningkatan sehingga berimplikasi tidak ada penambahan Fasop andal di Tahun 2024 (menggunakan <i>baseline</i> 2023).
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	82,51	81,7	99,02	• Penumpang masih data sementara per November, indikasi di akhir tahun masih ada selisih 1%. • Untuk angkutan barang masih data sementara per November 2024.
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	100	99,83	99,83	• Terdapat 1 kejadian kecelakaan (anjlokkan di bulan April 2024). • Terkait upaya peningkatan kinerja agar diprioritaskan untuk uraian penanganan kecelakaan seputar sarana, prasarana, dan SDM. Sedangkan terkait perlintasan sebiang diurutan terakhir.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	82	122,42	-	• Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. Agar capture/update per tanggal 15 januari 2025.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)	100	34,82	34,82	- Agar dicek kembali dengan Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI. - Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target PNBP antara lain bongkaran, lelang mobil, pemanfaatan aset yang batal karena kendala koordinasi.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Nilai)	81	78,6	97,04	Analisis dapat mengacu uraian evaluasi internal, sedangkan upaya dapat diacu rekomendasi berdasarkan surat Dirjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Nilai)	3	3	100	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.

6) BTP Kelas I Bandung

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Rasio)	0,55	0,55	100%	Terkait kegiatan AMDAL agar diuraikan lebih spesifik terkait kendalanya
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	88	88,38	100%	Agar memasukan daftar wilayah pada BTP Bandung yang sesuai dengan TQI kategori I dan II
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	70,65	70,65	100%	Telah dilakukan switch over segmen Haurpugur-Cicalengka pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga jalur ganda Kiaracondong - Cicalengka telah beroperasi sepenuhnya
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	53,4	55,55	105%	- Agar dilengkapi data angkutan penumpang dan angkutan barang bulan Oktober 2024 - Agar dicek kembali kepastian nilai jumlah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					angkutan barang dan penumpang
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	100	98,44	98%	Agar diuraikan lebih rinci terkait 2 kecelakaan yang terjadi di Tahun 2024 termasuk hasil investigasinya untuk tindakan lanjut peningkatan keselamatan kedepannya.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (%)	82	90,25	110%	Agar dilakukan pengecekan ulang tidak menggunakan berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu, melainkan dengan metode penghitungan Manual sesuai template Excel semula.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Nilai)	81,75	80,00	98%	Agar .dapat menindaklanjuti komponen yang masih rendah sesuai arahan Itjen
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (Nilai)	3	3,866	100%	Terhadap upaya peningkatan kinerja agar diuraikan berdasarkan Kertas Kerja Penilaian SPIP yang mendapatkan poin rendah.

7) BTP Kelas I Semarang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Rasio)	0,42	0,42	100	- Rasio diperoleh dari capaian <i>baseline</i> Tahun 2023 dimana jalur yang telah terhubung sebanyak 15 dari 36 titik konektivitas yang direncanakan terhubung. Pada Tahun 2024 tidak ada penambahan rasio konektivitas - Reaktivasi Semarang Tawang dan Tanjung Mas masih belum beroperasi (tahap pengujian) dan diusulkan kegiatan pengujian pada Tahun 2025
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	99,52	99,46	99,94	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI menggunakan pengukuran jalur periode jalur III Tahun 2024 dimana jalur yang terukur sepanjang 1.640,300 km dari total panjang jalur sepanjang 1.649,124 km

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					• Perlu adanya pemilahan lokasi yang tidak memenuhi sehingga menjadi prioritas peningkatan pada 2025
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	87,5	87,5	100	• Total persinyalandi yang telah terbangun sebanyak 120 unit dengan rincian (105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik) • Rekomendasi tindak lanjut bukan menjelaskan tentang progres kegiatan(lelang) namun perlu menjelaskan langkah percepatan
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	164,57	169,79	103,17	• Realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 83.894.121 penumpang dan 11.718.192 ton barang. • Capaian berasal dari jumlah prosentase angkutan penumpang dan angkutan barang yang disandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024 • Capaian penumpang agar dibuatkan kumulatif bukan per Triwulan IV saja • Rekomendasi tindak lanjut agar menambahkan hasil kajian, KA printis dioptimalkan, tambahkan upaya peningkatan untuk angkutan barang • Realisasi angkutan barang agar dipisah untuk mempermudah analisis
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	100	100	100	• Frekuensi perjalanan kereta api perintis telah terealisasi sebanyak 1.464 dari target 1.464 frekuensi perjalanan kereta api • Rekomendasi tindak lanjut agar menambahkan hasil kajian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	100	100	100	• Tidak ada kejadian kecelakaan kereta api periode Tahun 2024 sehingga analisis capaian agar fokus kelaikan operasi, sarpras dan SDM.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	81	76,62	76,62	Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (%)	100	103	103	Data sudah sesuai realisasi pendapatan PNPB sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp723.653.476,00 dari target sebesar Rp701.994.916,00.
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Nilai)	81	81,7	101	Rencana tindak lanjut periode/kedepannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif).
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (Nilai)	3	3	100	- Rekomendasi tindak lanjut agar diuraikan dibagian kewenangan balai saja - Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

8) BTP Kelas I Surabaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Rasio)	0,375	0,375	100,00	Terkait konektivitas dengan Terminal Tipe A akan dimasukan di Tahun 2025.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	98,4	98,02	99,61	Agar diuraikan kendala dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara rinci.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	37,9	37,9	100,00	Agar dimasukan uraian kegiatan pendukung berupa peningkatan Sistem Telekomunikasi di segmen Kertosono-Talun.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai	152	157	103,29	Menggunakan data per-akhir November dan untuk bulan Desember masih menggunakan prognosa.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)				Agar untuk LKIP 2024, data bulan Desember dapat dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	100	98,71	98,71	- Menggunakan data per-akhir November dan untuk bulan Desember masih menggunakan prognosa. - Agar untuk LKIP 2024, data bulan Desember dapat dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	88,5	56,28	-	Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (%)	100	100	110	Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Nilai)	82,5	83,35	101,03	Agar dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (Nilai)	3	3	100	Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik.

9) BTP Kelas I Medan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Rasio)	0,50	-	100.00	- Kegiatan Aceh masih menunggu pengujian, agar dimasukan ke dalam capaian dan disampaikan uraian progresnya. - Upaya peningkatan kinerja kedepannya untuk yang belum terhubung bisa berupa koordinasi, perencanaan teknis dan lainnya.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah	91,5	95,33	104,20	- Sudah menggunakan data periode III. - Analisis data segmen mana saja yang butuh peningkatan dan menjadi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)				rekomendasi di 2025 bisa menjadi perawatan atau peningkatan Hasil analisa pada kegiatan pendukung pada dapat di spesifik/didetailkan sebagai upaya peningkatan kedepanya.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	55,35	55,35	100,00	- Kegiatan tahun 2025 agar dicek untuk upaya peningkatan di periode berikutnya. - Analisa keberhasilan atau kegagalan agar dapat dispesifikan.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	59,8	60,13	102,00	- Penyajianya agar dapat di sesuaikan/diperingkat agar dapat dipahami - Perlu pemilahan antara angkutan barang dan angkutan penumpang. - Agar data diupdate menggunakan data Desember 2024.
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	-	-	- KA Cut Mutia tidak beroperasi dari September s.d November 2024, serta beroperasi kembali pada 24 Desember 2024. - Untuk memperhatikan kembali Kontrak Perintis serta konfirmasi program pada September dan Desember.
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik PerkeretaapianKelas I Medan (%)	100	92,50	92,50	- Terdapat 2 kali anjlokkan KA pada bulan Februari dan bulan Maret 2024. - Agar analisis fokus kepada analisis SDM kemudian analisis terhadap kecelakaan.
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik PerkeretaapianKelas I Medan (%)	85,58	72,63	84,86	- Agar koordinasi dengan Bagian Keuangan terkait data yang terupdate. - Agar capture/update per tanggal 15 januari 2025 - Nilai efisiensi masih ditemukenali anomali, perlu dilakukan pengecekan kembali
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (%)	100	100	100	Agar dilakukan update terkait nilai PNBP per TW IV 2024.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Nilai)	81,7	80,35	98,35	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif). - Rekomendasi ITJEN dapat dimasukkan ke dalam upaya peningkatan kinerja.
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan (Level)	3	3	100	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat setditjen

10)BTP Kelas II Padang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Rasio)	0,5	0,5	100	Dilakukan revisi PK menjadi 0,5 dari sebelumnya target 0,63 dikarenakan kegiatan Sawahlunto tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan PT KAI tidak mampu memenuhi data dukung yang dibutuhkan.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	78	84,4	108,20	- Lokasi yang tidak memenuhi segmen mana dan beberapa lokasi sehingga menjadi prioritas ditingkatkan pada 2025 - Usulan perawatan IMO kedepannya agar dianalisis segmen mana saja yang diprioritaskan Tahun 2025.
3	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	114,79	114,18	99,46	- Penyajian data capaian penumpang agar disajikan secara kumulatif dalam 1 tahun. - Pada Analisis dan upaya peningkatan kinerja agar dipisahkan penyajian data angkutan penumpang dan angkutan barang. - Agar diperhatikan kembali penghitungan capaiannya karena Realisasi TW IV 2024 114,18%.
4	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	100	100	Uraian pembatalan keberangkatan KA Perintis agar dijelaskan justifikasinya pada analisis keberhasilan/kegagalan dan menjadi bahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					rekomendasi peningkatan kinerja kedepannya
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	100	100	Perlu diuraikan secara rinci daftar kecelakaan yang terjadi selama Tahun 2024.
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	86	31,37	33,79	- CRO dari tim Satker agar dilakukan pembaharuan/<i>update</i> - Terkait nilai Efisiensi perlu dilakukan pengecekan ulang bersama Tim Satker, karena seharusnya tidak minuse. - Agar capture/update per tanggal 15 januari
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%)	100	105,65	105,65	- Perlu diuraikan secara rinci pada Analisa Keberhasilan/Kegagalan terkait nilai penerimaan PNBP tersebut. - Agar menggunakan angka PNBP sesuai dengan data dari Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian.
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Nilai)	82,50	79,60	96,48	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (Nilai)	3,00	3,00	100,00	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatan kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.

11)BTP Kelas II Palembang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (Rasio)	0,71	0,71	100,00	- Tidak ada dukungan anggaran dan tidak ada kegiatan rutin/swakelola yang mendukung indikator kegiatan rasio konektivitas. sebagai contoh minitoring rapat dan lainnya. - Upaya peningkatan berupa kegiatan rutin/swakelola pendukung. Untuk kegiatan kajian/studi yang mendukung pembangunan/

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					pengembangan perkeretaapian di BTP tidak dianggarkan di tahun 2025. Agar dilakukan pendetailan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya pada LKIP 2024 termasuk ditambahkan informasi terkait dukungan anggaran.
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	92,1	93,03	101,01	- Menggunakan periode III. - Agar diinventarisasi segmen mana saja yang kualitas jalurnya masih rendah untuk diprioritaskan ditingkatkan di tahun 2025/tahun selanjutnya.
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	27,71	27,71	100	- Agar diuraikan kendala terkait usulan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada bagian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja. - Agar diuraikan hasil koordinasi dengan operator beberapa stasiun yang dilakukan konsesi guna mendukung pencapaian indikator.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100	103,36	103,36	- Agar dapat dijelaskan secara rinci terkait hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target, seperti: penamabahan moda, penyesuaian tarif dan lainnya - Agar analisa keberhasilan pencapaian target dan upaya peningkatan kinerja untuk angkutan penumpang dan angkutan barang dipisah.
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik	100	100	100,00	Agar diuraikan faktor-faktor pendukung pencapaian target (sarana/prasarana/ lalu lintas/SDM).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	PerkeretaapianKelas II Palembang (%)				
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (%)	93,9	76,74	-	- Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. - Agar <i>capture/update</i> per tanggal 15 januari 2025.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (%)	100	100	100,00	Perlu dilakukan pengecekan kembali dengan data Bagian Keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.
8	Nilai AKIP Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (Nilai)	81,9	81,50	99,51	Analisis dapat mengacu uraian evaluasi internal, sedangkan upaya dapat diacu rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang (Nilai)	3	3	100,00	Analisis dapat melihat sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya dapat diacu dari rekomendasi berdasarkan surat Sesditjen.

12) Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	100	107,91	109,41	- Realisasi pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian periode 2020 - 2024 sebanyak 47.047 unit. Capaian diperoleh berdasarkan realisasi periode 2020 - 2024 yang dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 43.000 unit. - Terkait upaya peningkatan kinerja masing-masing unit kerja dapat memilah strategi, aktivitas, anggaran, dan atau jabatan/pegawai. - Meminimalisir penggunaan aplikasi, karena tahun depan hanya 1 aplikasi Superapps lebih kepada

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
					fitur/modul layanan pengujian karena sudah menjadi kebijakan di Kemenhub.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%)	65,66	69,22	108,36	- Terdapat kesalahan perhitungan capaian. Total realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 39.134 orang dari target Renstra 2020 - 2024 sebanyak 55.000 orang. - Data dukung SDM selain Nota Dinas bisa berupa rekapan aplikasi - Upaya peningkatan kinerja pada hal yang sifatnya normatif bisa dispesifikkan
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	98,82	101,06	102,27	- Total realisasi Tahun 2020 - 2024 sebanyak 1.137 unit dan 4.605,58 km dari target Renstra 2020 - 2024 sebanyak 990 unit dan 5.277 km. - Upaya peningkatan kinerja kedepannya agar terkait dengan kebijakan lebih kepada keputusan Dirjen/Kabai yang telah ditetapkan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	3,66	3,86	105,46	Realisasi capaian berdasarkan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat PPTB dengan jumlah responden 3.930 Orang.
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian (%)	96,50	85,94	88,42	- Terdapat penyesuaian Perhitungan NKA sehingga capaian menjadi 85,33% dengan rincian sebagai berikut: - Penyerapan: 93,45% - Konsistensi: 99,97% - CRO: 100% - Efisiensi: 50,96%
6	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian (%)	100	102,80	102,80	- Realiasi pendapatan PNBP sampai dengan Desember sebesar Rp64.113.868.630,00 dari target sebesar Rp62.370.326.000,00 - Perlu dilakukan <i>cross check</i> kembali dengan bagian keuangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	82	80,30	97,93	- Rencana tindak lanjut periode/ke depannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan (tidak normatif). - Rekomendasi ITJEN dapat dimasukkan ke dalam upaya peningkatan kinerja.
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	3	3	100	- Rekomendasi dari Surat SPIP agar ditindaklanjuti secara mendetail dan spesifik - Upaya kegiatan Sosialisasi lebih kepada kegiatan

13) Balai Perawatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi (%)	100	97,79	-	- Agar dilakukan pengecekan dan perhitungan ulang - Jika belum selesai butuh justifikasi waktu misal tenaga ahli, waktu agar diuraikan - Angka capaian kinerja agar dicek lanjut
2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	91	83,12	-	- Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap capaian masing-masing parameter penilaian NKA sesuai kondisi <i>real</i> pencapaian di akhir Tahun 2024. - Terkait konsistensi seharusnya tidak 100% karena tingkat konsistensi pada bulan juli s.d desember tidak 100%. - CRO ada terdampak AA/belum terealisasi (rambu K3) agar dijelaskan apa yang tidak terealisasi
3	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	100	100,45	100,45	- Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI. - Rekomendasi tindak lanjut agar lebih spesifik untuk kegiatan yang akan di lakukan di tahun 2025
4	Nilai AKIP Balai Perawatan	82,50	81	98,18	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
	Perkeretaapian (%)				rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
5	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Level)	3	3	100,00	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatn kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.

14)BPKARS Sumsel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	85,89	86,78	101,04	Jumlah PNP sampai dengan Triwulan IV 2024 sebanyak 4.350.217 penumpang dengan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	3,57	3,58	100,28	- Reponden lebih banyak manual, untuk sistem responden sedikit. - Total responden selama TW IV sebanyak 4.596
3	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu (%)	99	99,64	100,64	Data OTP telah menggunakan rata-rata realisasi OTP dalam setahun
4	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Total jumlah gangguan s.d Des 2024 sebanyak 132 dan telah selesai ditindaklanjuti
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	100	100	100	<i>Zero Accident</i>

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	81,7	70,88	86,75	• agar dicek lagi di span dan perhitungannya agar dikoordinasikan • karna ada AA, maka CRO tidak 100% (koordinasi dengan Tim Keuangan)
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	100	97,76	97,76	• Terdapat permasalahan status aset target semester I 2025 sudah bisa berjalan • Nilai PNBP sebesar Rp 27.703.093.098,-
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	79	80,35	101,7	• rekomendasi mengacu pada surat setditjen dan parameter LKE yang belum maksimal
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	3	3	100	• rekomendasi mengacu pada surat setditjen

15) BPKA Sulsel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan (Rasio)	0,24	0,24	100	• Pada analisis keberhasilan/ hambatan agar dijelaskan wilayah mana saja yang belum terkoneksi di Pulau Sulawesi. • Upaya peningkatan kinerja agar dijelaskan secara rinci progresnya. • Upaya peningkatan kinerja merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 sebagai contoh dapat berupa penyiapan dokumen teknis, rapat koordinasi teknis, pemantauan dimasing-masing wilayah, dan lainnya. • Perlu dipastikan terdapat kegiatan pendukung/swakelola untuk indikator kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
2	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	- Upaya peningkata kinerja merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 sebagai contoh usulan penyiapan anggaran untuk mendukung penyelesaian/kendala yang ada. - Analisis keberhasilan/hambatan dapat dijelaskan secara rinci kendala dan dampak yang dihasilkan untuk mendukung justifikasi prioritas dianggarkan di tahun 2026. - Perlu dipastikan terdapat kegiatan pendukung/swakelola untuk indikator kegiatan
3	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	113	-	- Analisis keberhasilan dapat dijelaskan secara rinci dan melampirkan data dukung yang valid. - Capaian kinerja penumpang agar dibuatkan secara kumulatif. - Agar dicek kembali manual indikator.
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu (%)	94,5	96,44	102	- Analisis keberhasilan dapat dijelaskan secara rinci waktu pelaksanaan. - Analisis kendala/hambatan agar dijelaskan secara kumulatif/ditampilkan hambatan di triwulan sebelumnya.
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3,1	3,22	103,22	- Survei IKM masih dilakukan manual. - Upaya peningkatan kinerja selanjutnya dapat diusulkan menggunakan aplikasi, peningkatan ticketing, layanan yang perlu ditingkatkan, dan lainnya.
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	Analisis hambatan dapat dijelaskan secara rinci kendalanya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Semula)	Capaian Kinerja (%)	Hasil Reviu/Catatan Perbaikan/Keterangan
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	88,93	80,50	-	• CRO perlu dicek kembali dikarenakan gap besar dengan realisasi penyerapan anggaran. Agar melakukan penyesuaian target dan realisasi pada Januari - Desember 2024 pada aplikasi SAKTI (koordinasi dengan Satker) • Penyerapan anggaran merupakan pagu total dan termasuk AA. Cek kembali realisasi pagu pada aplikasi OM SPAN. • Analisis keberhasilan/kegagalan agar diuraikan secara detil masing-masing variabel NKA.
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	80	80,25	100,31	Agar dilakukan perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya sesuai rekomendasi Surat Setditjen Perkeretaapian.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3	3	100	Analisis keberhasilan atau kegagalan agar memperhatikan sub unsur yang kurang nilainya, sedangkan upaya peningkatan kinerja dapat mengacu pada rekomendasi berdasarkan Surat Setditjen Perkeretaapian.
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (%)	100	100	100	Agar dicek kembali dengan data Bagian keuangan dan aplikasi OM SPAN/SIMPONI.

D. KESIMPULAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja dan revidi laporan kinerja Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Setiap unit kerja untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya.
3. Setelah laporan kinerja dan laporan lainnya sudah selesai penulisan/pembahasan/final untuk dapat dilakukan pengecekan kembali kalimat – kalimat sesuai dengan kaidah/pedoman pada web/aplikasi yang telah disediakan seperti pada link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> dan <https://pasti.kemdikbud.go.id/>
4. Diharapkan masing – masing unit kerja untuk dapat mengecek kembali dan melengkapi pengisian pada aplikasi kinerja Kementerian PANRB (e-SAKIP revidi), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi).
5. Penyusunan laporan kinerja selain mengacu kepada pedoman SAKIP/Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 juga dilakukan *beanchmarking* terhadap laporan kinerja dari Kemenkeu dan PUPR.
6. Masing – masing unit kerja untuk dapat menindaklanjuti catatan sesuai dengan hasil revidi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2025

Notulensi



(Tim Notulensi)

DOKUMENTASI





**DAFTAR PEROLEHAN PENGHARGAAN / PRESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023 – 2024**

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)	DOKUMENTASI
1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	<i>Certificate Of Registration ISO 9001:2015, Quality Management System (QMS)</i> “QMS for The Provision of Business & Operation License for Public & Special Railway Operation”	Lembaga Sertifikasi CBQA Global	9 Agustus 2024	
		Peringkat Terbaik dalam Satuan Kerja Terbaik Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV	Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN, Kementerian Keuangan	16 Agustus 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)	DOKUMENTASI
		Peringkat Harapan II dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Kategori Unit Kerja Eselon II	Kementerian Perhubungan	30 Januari 2024	
		Peringkat Kedua dalam Evaluasi Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Januari 2023	
		Peringkat Kedua dalam Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Desember 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Ketiga dalam Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan I Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Juni 2024	
		Peringkat Ketiga dalam Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2024	
2.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penerima Penghargaan Sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah Dengan Pembayaran Pajak Terbesar Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu (piagam diberikan pada Juni 2023)	KPP Pratama Jakarta, Gambir Satu	Juni 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Pertama Dalam Evalausi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	
		Peringkat Kedua Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2023 di lingkungan Direkotrat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	
		Penghargaan Satuan Kerja dengan Implementasi Zero Retur Pagu Jumbo Terbaik Kedua T.A. 2023	-	16 Februari 2024	-

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
3.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Certificate Quality Management Systems sebagai Penyedia Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian SNI ISO 9001:2015	PT. Management Systems Assessment Certification	23 Oktober 2024	
		Peringkat ke-1 unit kerja dengan capaian kinerja terbaik berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Februari 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat ke-3 unit kerja dengan capaian kinerja terbaik Triwulan I Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Mei 2023	
		Peringkat II sebagai unit kerja dengan capaian kinerja terbaik berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Maret 2024	
		Peringkat II sebagai unit kerja dengan capaian kinerja terbaik triwulan I Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Juni 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat III sebagai unit kerja dengan capaian kinerja terbaik triwulan II Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Agustus 2024	
4.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	<i>Certificate Of Registration SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems</i> <i>"Provision of Railway Safety Services (Including Formulation, Implementation & Evaluation of Policies & Procedures, Technical Guidance & Supervision)"</i>	PT. TSI Sertifikasi Internasional	-	
		<i>Appreciation Stakeholder</i> sebagai Mitra Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kurikulum	PTDI - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	21 Agustus 2024	-

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Terbaik Ketiga “Satuan Kerja Dengan Implementasi Zero Retur Pagu Besar Tahun 2023”	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	16 Februari 2024	
		Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan UP/TUP Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV	KPPN Jakarta IV, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	16 Agustus 2024	
		Peringkat Ketiga “Unit Kerja Dengan Kepatuhan Pelaporan Kinerja Terbaik Triwulan II Tahun 2024”	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Agustus 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Pertama Dalam Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2024	
		Peringkat I Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan I Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Mei 2023	
		Peringkat II Unit Kerja Dengan Kepatuhan Pelaporan Kinerja Terbaik Triwulan I Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Mei 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Terbaik Unit Kerja Dengan Kepatuhan Pelaporan Kinerja Terbaik Triwulan II Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	September 2023	
		Peringkat Ketiga Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	
		Peringkat Ketiga Unit Kerja Dengan Kepatuhan Pelaporan Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
5.	BTP Medan	Kinerja Sangat Baik pada Tahun 2022 - 2023, sebagai Terbaik Kedua Kategori (1-15 Satker) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif untuk Wilayah Kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara	Kanwil DJKN Sumatera Utara	5 Desember 2023	
		Penghargaan atas Kontribusi Pembayaran Pajak (PPH, PPN, PPnBM, dan PBB P5L) selama tahun 2023 di lingkungan Kanwil DJP Sumut 1	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut 1	22 Januari 2024	
6.	BTP Padang	Penghargaan terkait kinerja pensertipikatan barang milik negara berupa tanah dari Kanwil DJKN Kemenkeu	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	22 Agustus 2024	
		Peringkat 2 Kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester I Tahun 2024	-	29 Januari 2024	-

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Apresiasi sebagai ASN Pejuang Integritas Kementerian Perhubungan a.n. Zul Rafsanjani	-	5 Desember 2024	-
7.	BTP Palembang				
8.	BTP Jakarta	Peringkat 3 Satuan Kerja dengan Implementasi Zero Retur Pagu Jumbo	KPPN JAKARTA IV	16 Februari 2024	
		Satuan Kerja Mitra Strategis Terbaik Dalam Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024	KPPN JAKARTA IV	16 Agustus 2024	
		Peringkat I (satu) dengan Nilai "Memuaskan" pada Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	20 November 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat 3 Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Januari 2023	
		Kategori Informatif Pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik Tingkat PPID Pelaksana UPT Eselon III	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	November 2023	
		Piagam Penghargaan sebagai Terbaik I Kategori Akurasi SPM Periode Semester I Tahun 2024	-	11 September 2024	-
9.	BTP Bandung	<i>Best</i> Fasilitator PKL Tahun 2024	Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat	20 Agustus 2024	-

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
10.	BTP Semarang	Penghargaan sebagai Satker Terbaik Peringkat I: Kategori IKPA Terbaik SATKER BESAR (Pagu Non Belanja Pegawai > 1.000 Milyar)	KPPN Semarang II	16 Maret 2023	 
		Penghargaan 10 Besar Badan Publik Informatif Tingkat Kementerian Tahun 2024	Kementerian Perhubungan	2024	
		Nominasi pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan kategori "INFORMATIF" tingkat Eselon III di Kementerian Perhubungan	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
11.	BTP Surabaya	Penghargaan Instansi Pemerintah dengan kontribusi pembayaran pajak diatas 50 Milyar	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	29 Januari 2024	
		Penghargaan dalam Sinergitas dan kolaborasi dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Pasuruan	Pj. Bupati Pasuruan	19 Desember 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan kategori "INFORMATIF" tingkat Eselon III di Kementerian Perhubungan	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	14 November 2023	
		Penghargaan Peringkat ketiga dalam evaluasi internal implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Januari 2023	
		Penghargaan Peringkat ketiga dalam evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	
		Penghargaan peringkat ke dua dalam unit kerja dengan kepatuhan pelaporan kinerja terbaik Triwulan III Tahun 2023.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan peringkat terbaik dalam unit kerja dengan kepatuhan pelaporan kinerja terbaik Triwulan II Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Agustus 2023	
		Penghargaan Peringkat ke tiga Kepatuhan Pelaporan Kinerja terbaik triwulan I tahun 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	31 Mei 2023	
		Peringkat pertama dalam evaluasi kepatuhan aplikasi pelaporan kinerja di lingkungan DJKA di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Januari 2023	
		Peringkat kedua dalam evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
12.	Balai Pengujian Perkeretaapian	Piagam Penghargaan sebagai Terbaik I Kategori Akurasi SPM Periode Semester I Tahun 2024	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bekasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan-	11 September 2024	
		PPID Pelaksana UPT Balai Pengujian Perkeretaapian Kategori Menuju Informatif Tingkat UPT Tahun 2024	Kementerian Perhubungan	21 November 2024	
13.	Balai Perawatan Perkeretaapian	Penghargaan Atas Kinerja yang baik di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap UTILITAS ASET BMN Tahun 2024	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang	4 November 2024	

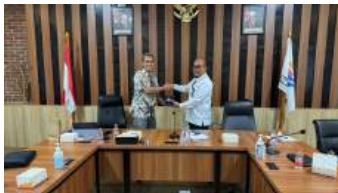
NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan Unit Kerja Kementerian Perhubungan yang memperoleh predikat INFORMATIF dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2024	Kementerian Perhubungan	21 November 2024	
		Peringkat III Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan DJKA di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2023	
		Peringkat II Unit Kerja dengan Kepatuhan Pelaporan Kinerja Terbaik Triwulan I Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Juni 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat I Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan I Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Juni 2024	
		Penghargaan Peringkat II (dua) pada Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	20 November 2024	
		Piagam Penghargaan Kinerja baik Bidang Pengelolaan BMN Utilitas Aset Tahun 2024 sebagai Perolehan PNBP Terbesar di Wilayah KPKNL	-	4 November 2024	-

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
14.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Penghargaan Predikat Pelayanan Prima dalam Kelompok Kementerian dari Kementerian PANRB	Kementerian PANRB	8 Oktober 2024	
		Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memperoleh predikat dengan kategori “ Cukup Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2024	Kementerian Perhubungan	21 November 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Kebersihan Prasarana Transportasi Stasiun Kereta Api Lomba Kebersihan Harhubnas Tahun 2024	Kementerian Perhubungan (Panitia Pusat Penyelenggara HARHUBNAS 2024)	6 September 2024	
		Tim Humas Terproduktif 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Piagam Penghargaan sebagai Juara Terbaik Prasarana Transportasi Perkeretaapian dalam Rangka Harhubnas	-	-	-
		Piagam Penghargaan sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPP Tahun 2024 dengan preikat "Layanan Prima"	-	-	-
15.	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Penghargaan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan atas Dukungan dan Komitmen dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kab.Maros tahun 2023	Bupati Kab. Maros	17 Agustus 2023	
		Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mendapat penghargaan dari Palang Merah Indonesia atas Peran Aktif dan Kerjasama yang Baik dalam Mendukung Ketersediaan Darah yang Aman dan Berkualitas di Kota Makassar melalui Kegiatan Donor Darah Sukarela	PMI Provinsi Sulawesi Selatan	14 September 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah TA 2023	Kanwil DJKN Sulseltrabar	25 Januari 2024	
		Penghargaan sebagai PPK Pengadaan Tanah terfavorit Tahun 2023	Direktur utama LMAN	20 Februari 2024	
		Penghargaan Kerjasama Fakultas Teknis Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Dosen Teknis Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB	7 Desember 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan untuk Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagai Humas Terkomunikatif di lingkup DJKA	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	24 Mei 2023	
16.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<i>Appreciation Stakeholder</i> sebagai Mitra Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kurikulum	PTDI - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	21 Agustus 2024	-
		Penghargaan terkait kinerja pensertifikatan barang milik negara berupa tanah dari Kanwil DJKN Kemenkeu	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	22 Agustus 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peringkat Ketiga Unit Kearsipan II dengan Kategori A "Memuaskan" dalam rangka Penilaian Kearsipan Internal di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan	8 Desember 2024	
		Piagam Penghargaan Unit Kerja Peringkat II Terbaik sesuai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Januari 2024	
		Piagam Penghargaan Unit kerja Peringkat I dengan kategori Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Agustus 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 oleh ANRI, Kategori Unit Kearsipan II Terbaik	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	20 November 2024	 
		Peringkat I dalam Penghargaan Unit Kerja Dengan Capaian Kinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	November 2024	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Penghargaan sebagai satuan kerja dengan jumlah sertifikasi BMN terbanyak di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu realisasi terbit Sertifikat Hak Pakai sebanyak 1.350 bidang tanah pada Tahun 2023.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	7 Desember 2023	
		Peringkat II dalam Penghargaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Desember 2024	
17.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api Makassar – Parepare Tahap I segmen Barru – Pangkep – Maros	Diresmikan oleh Presiden RI	29 Maret 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN**	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)***	DOKUMENTASI
		Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian LRT Jabodebek	Diresmikan oleh Presiden RI	28 Agustus 2023	
		Peresmian hasil pembangunan dan pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	Diresmikan oleh Presiden RI	2 Oktober 2023	
		Piagam Penghargaan Terbaik Pertama Kategori Lelang Selain Hak Tanggungan untuk Wilayah Kerja Kanwil DJKN Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	5 Desember 2023	

NO	UNIT KERJA	URAIAN PENGHARGAAN*	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	WAKTU PEMBERIAN (Tanggal, Bulan, Tahun)	DOKUMENTASI
		Penghargaan terkait <i>LRT Jabodebek Project For 2023 Outstanding Civil Engineering Achievement Award</i> dalam acara <i>Japan Society of Civil Engineers</i>	Kedutaan Besar Jepang	12 November 2024	 
		Penghargaan predikat “Informatif” Penilaian Layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	-	11 Desember 2024	-